



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

MENGAKSELERASI INTERMEDIASI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI

Kajian Stabilitas Keuangan
No. 46, Februari 2026



Perahu kokoh yang melaju kencang melambangkan stabilitas sistem keuangan yang kuat. Sinergi Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan beserta Kementerian dan Lembaga terkait melalui bauran kebijakan Bank Indonesia sejalan dengan program Pemerintah sehingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Perahu yang tetap melaju menunjukkan bahwa dengan kerja sama dan koordinasi yang solid, tantangan sebesar apa pun dapat diarungi.

Arus air yang deras merupakan simbol kuat tentang perjalanan ekonomi di tengah tantangan yang dinamis. Arus tersebut merepresentasikan tekanan dan tantangan dari global maupun domestik yang harus dihadapi dengan ketahanan dan strategi yang tepat. Merespons ketidakpastian dan tekanan juga diperlukan sikap “eling lan waspodo” sehingga respons kebijakan yang diambil tepat untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

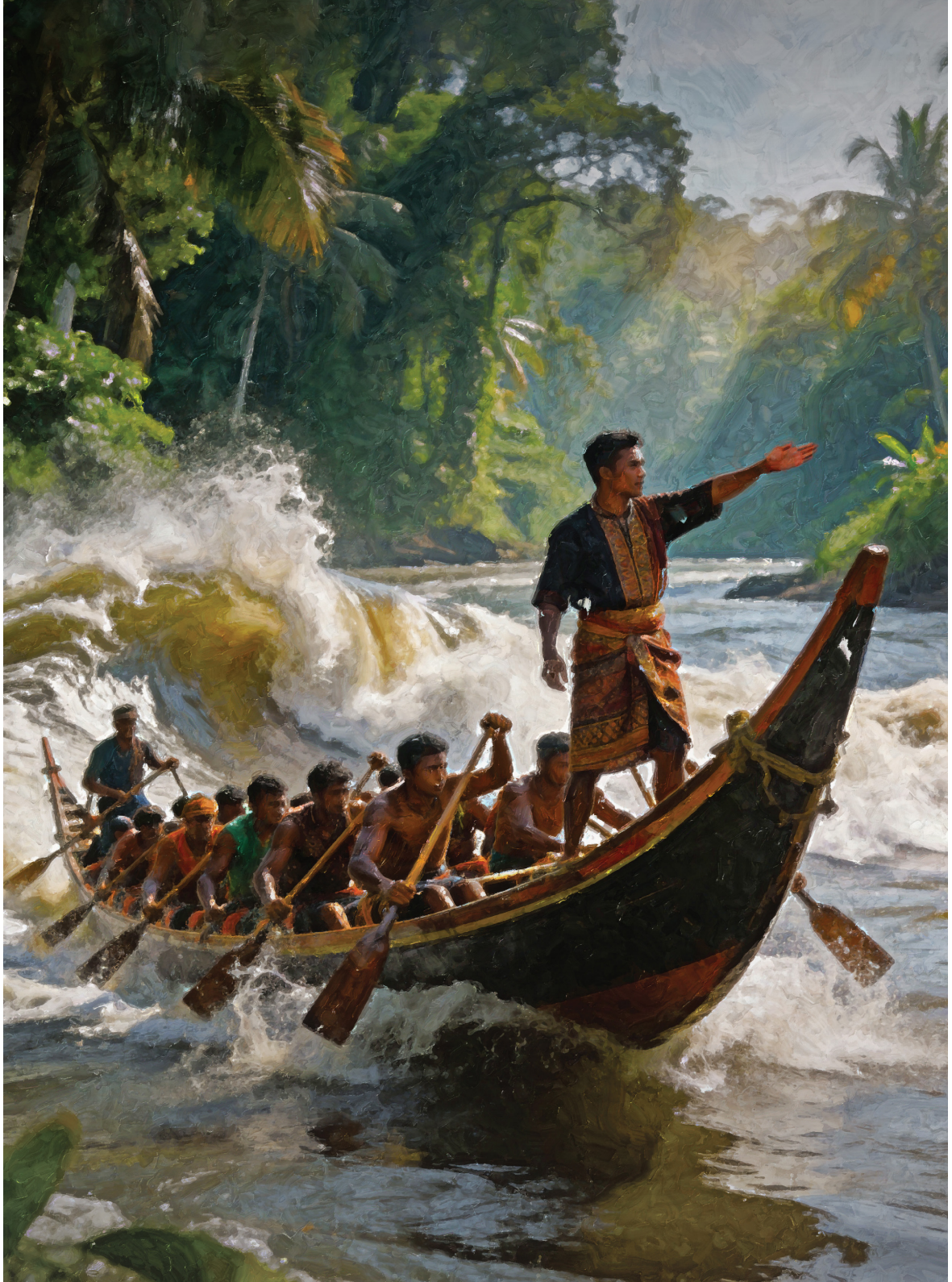
Gerakan serempak para pendayung menggambarkan sinergitas antarlembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sosok pemimpin di bagian depan perahu melambangkan arah kebijakan yang fokus dan terarah. Dengan kejelasan arah kebijakan perekonomian ke depan, kolaborasi yang erat, dan strategi yang tepat, ekonomi Indonesia mampu menembus arus deras menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Bank Indonesia menjadi bank sentral yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi intermediasi dengan menjaga stabilitas sistem keuangan tetap kuat.







BANK INDONESIA



ISSN 2620-9241
DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Daftar Isi

Daftar Tabel	iv	Daftar Singkatan	x
Daftar Gambar	v	Prakata	xii
Daftar Grafik	vi	Ringkasan Eksekutif	2

Bab 1 7

Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global yang Tinggi

1.1	Dinamika Global: Tantangan Baru dalam Stabilitas Makro dan Stabilitas Sistem Keuangan	8
1.2	Kinerja Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Meningkat, Stabilitas Tetap Terjaga	11
1.3	Kerentanan dan Sumber Guncangan Sistem Keuangan Indonesia	12
Boks 1.1	Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Global di Tengah Tingginya Kerentanan dan Ketidakpastian	14
Boks 1.2	Risiko <i>Fraud</i> pada Transaksi Aset Kripto	15
Boks 1.3	Risiko IKNB terhadap Stabilitas Sistem Keuangan	17

Bab 3 37

Resiliensi Kuat, Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

3.1	Industri Perbankan Tetap Kuat Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan	38
3.2	Ketahanan Korporasi dan Rumah Tangga Masih Terjaga Baik	41
3.3	Ketahanan Nonbank Masih Terjaga	44
3.4	Perkembangan Risiko ULN Korporasi dan Perbankan	46
Boks 3.1	Penguatan Ketahanan Sektor Keuangan dari Krisis Secara Terintegrasi Sebagai Bagian Menjaga SSK	47
Boks 3.2	Risiko Operasional dari Pihak Ketiga dan Potensi Dampaknya Terhadap SSK	49

Bab 2 19

Pertumbuhan Kredit Perbankan Terus Ditingkatkan

2.1	Sisi Penawaran: Kapasitas Pembiayaan Perekonomian Perbankan Membaik	20
2.2	Sisi Permintaan: Permintaan Pembiayaan Perbankan Terjaga Namun Belum Merata	23
2.3	Ketidakseimbangan Penawaran dan Permintaan di Pasar Kredit Berdampak pada Perlambatan Pertumbuhan Kredit 2025	29
2.4	Aktivitas Pembiayaan Nonbank Tumbuh Positif Namun Melambat	30
Boks 2.1	<i>Market Imperfection</i> dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Kredit	32
Boks 2.2	Inovasi Instrumen Keuangan untuk Pembiayaan Ekonomi	34

Bab 4 51

Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan Terus Dikembangkan

4.1	Pembiayaan Inklusif: Mendorong Pembiayaan UMKM Sebagai Penopang Ekonomi	52
4.2	Pembiayaan Berkelanjutan: Optimalisasi Pembiayaan ke Sektor-Sektor yang Berorientasi pada Prinsip Keberlanjutan	55
4.3	Pembiayaan Syariah: Mendorong Pembiayaan Untuk Mendukung Penguatan Rantai Ekonomi Halal	57
Boks 4.1	Inovasi Pembiayaan Inklusif dan Syariah	60
Boks 4.2	Tantangan dan Peluang Keuangan Berkelanjutan di Indonesia	61

Bab 6 75

Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

6.1	Prospek Intermediasi 2026 Diprakirakan Membaik Terbatas Sejalan dengan Prakiraan Perbaikan Perekonomian	76
6.2	<i>Demand</i> Pembiayaan Korporasi Diprakirakan Membaik	78
6.3	Sinergi Meningkatkan Pembiayaan Perekonomian	78
Boks 6.1	Penguatan Sisi <i>Demand</i> Melalui Kegiatan Percepatan Intermediasi Indonesia	80
Boks 6.2	Sinergi Program Prioritas Pemerintah dengan Potensi Pembiayaan 2026	81
Boks 6.3	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan	82

Bab 5 63

Kebijakan Makroprudensial untuk Mengakselerasi Intermediasi dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

5.1	Kebijakan Makroprudensial: Respons Kebijakan Mendorong Intermediasi dengan Tetap Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	64
5.2	Penguatan KLM Untuk Mendukung Efektivitas Transmisi Kebijakan dan Optimalisasi Intermediasi	66
5.3	Sinergi Kebijakan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menjaga Sistem Keuangan	67
Boks 5.1	Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial <i>Forward Looking Lending Channel</i> dan <i>Interest Rate Channel</i>	69
Boks 5.2	Penguatan PLM Untuk Menjaga SSK dan Mendukung Pembiayaan Ekonomi	71
Boks 5.3	Sinergi KSSK Untuk Mendorong Intermediasi	71

Daftar Tabel

Bab 1

Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global yang Tinggi

Tabel 1.1.1	Kebijakan Moneter: Negara Maju dan <i>Emerging Economies</i>	9
--------------------	--	----------

Bab 2

Pertumbuhan Kredit Perbankan Terus Ditingkatkan

Tabel 2.1.1	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Segmen, Penggunaan dan Sektor Ekonomi	20
Tabel 2.1.2	Perkembangan DPK berdasarkan Golongan Pemilik	22
Tabel 2.1.3	Perkembangan Suku Bunga Kredit Rupiah	23
Tabel 2.2.1	Perkembangan Penjualan, Profitabilitas dan <i>Capex</i> Korporasi Menurut Sektor	24
Tabel 2.2.2	Perkembangan Porsi Pembiayaan Internal dan Kredit Bank dalam Struktur Pembiayaan Korporasi	26

Tabel 2.2.3	Pemetaan <i>Upside Potential</i> Program Pemerintah terhadap Permintaan Kredit Sektoral Korporasi pada 2025	26
--------------------	---	-----------

Tabel B2.2.1	Perbandingan Rasio <i>Outstanding</i> Obligasi terhadap Produk Domestik Bruto	34
---------------------	---	-----------

Bab 3

Resiliensi Kuat, Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Tabel 3.1.1	Perkembangan <i>Non Performing Loan</i> per Sektor Ekonomi	38
--------------------	--	-----------

Bab 4

Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan Terus Dikembangkan

Tabel 4.1.1	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	53
--------------------	---	-----------

Daftar Gambar

Bab 1

Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global yang Tinggi

Gambar B1.2.1	Tahapan Umum Pelarian Dana Aktivitas Illegal	16
----------------------	--	----

Bab 4

Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan Terus Dikembangkan

Gambar B4.1.1	Skema Umum Model Bisnis SRIA	60
----------------------	------------------------------	----

Bab 5

Kebijakan Makroprudensial untuk Mengakselerasi Intermediasi dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Gambar B5.1.1	Capaian Rasio KLM Berdasarkan Kelompok Bank dan Sektoral	70
----------------------	--	----

Bab 6

Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Gambar B6.3.1	Kerangka Kerja Kebijakan IEKB	83
----------------------	-------------------------------	----

Daftar Grafik

Bab 1

Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global yang Tinggi

Grafik 1.1.1	Kebijakan Tarif Resiprokal AS Terhadap Tiongkok dan Negara Lainnya	8
Grafik 1.1.2	Indeks Ketidakpastian Pasar Keuangan Global	8
Grafik 1.1.3	Inflasi Global	9
Grafik 1.1.4	<i>Return</i> Aset Global	9
Grafik 1.1.5	Indeks Nilai Tukar Dolar AS, Negara Maju dan Negara Asia	10
Grafik 1.1.6	Aset IKNB Terhadap Total Aset Keuangan Global	10
Grafik 1.1.7	Tingkat <i>Leverage</i> IKNB Global	10
Grafik 1.2.1	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	12
Grafik 1.3.1	Perkembangan Transaksi Aset Kripto	13
Grafik 1.3.2	Perkembangan Top 5 <i>Shock</i> SSK	13
Grafik 1.3.3	Perkembangan Top 5 Kerentanan SSK	13
Grafik B1.1.1	Pangsa Top 10 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Tertinggi Berdasarkan Negara	15
Grafik B1.1.2	Aset dan Kewajiban IKNB Terhadap Bank	15
Grafik B1.2.1	Tren Pengaduan Konsumen Terkait <i>Fraud</i>	15
Grafik B1.2.2	Tren Rasio Frekuensi <i>Fraud</i> Terhadap Volume Transaksi	16
Grafik B1.3.1	Perubahan Kontribusi Interkoneksi Bank-IKNB	17
Grafik B1.3.2	Interkoneksi Bank-IKNB Berdasarkan Aset dan Kewajiban	18

Bab 2

Pertumbuhan Kredit Perbankan Terus Ditingkatkan

Grafik 2.1.1	Pangsa Kredit Bank BUMN dan Non-BUMN	21
Grafik 2.1.2	Perkembangan Rasio Alat Likuid/ Kredit Berdasarkan Kelompok Bank	21
Grafik 2.1.3	Pertumbuhan DPK Berdasarkan Bank Penerima SAL dan Bank Lainnya	21
Grafik 2.1.4	Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i>	22
Grafik 2.1.5	Perkembangan Suku Bunga DPK Rupiah	22
Grafik 2.2.1	Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Orientasi Penjualan pada Sektor Pertanian dan Perdagangan	23
Grafik 2.2.2	Perkembangan Harga Emas dan CPO serta Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	24
Grafik 2.2.3	Saldo Bersih Tertimbang berdasarkan SKDU	24
Grafik 2.2.4	Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Agregat dan Berdasarkan Orientasi Penjualan	25
Grafik 2.2.5	Margin Keuntungan Bersih Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan	25
Grafik 2.2.6	Pertumbuhan Biaya Produksi Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan	25
Grafik 2.2.7	Posisi Kas dan Pembiayaan Obligasi Korporasi	25
Grafik 2.2.8	Pertumbuhan Penjualan Produktif	26
Grafik 2.2.9	<i>Business Confidence Index Indonesia</i> dan <i>Global Supply Chain Pressure Index</i>	27
Grafik 2.2.10	Konsumsi RT Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	27
Grafik 2.2.11	Indeks Keyakinan Konsumen	27

Grafik 2.2.12	Andil Pertumbuhan Kredit Konsumsi RT Menurut Jenis Kredit	27
Grafik 2.2.13	Pertumbuhan Penjualan Rumah Pasar Primer Harga Properti	28
Grafik 2.2.14	Pertumbuhan Indeks Residensial (IHPR) Primer	28
Grafik 2.2.15	Pertumbuhan KPR	28
Grafik 2.2.16	Proporsi Tabungan Menurut Tingkat Pengeluaran	29
Grafik 2.3.1	Indeks <i>Lending Requirement</i>	29
Grafik 2.3.2	Perkembangan <i>Undisbursed Loan</i> Perbankan	30
Grafik 2.3.3	Perkembangan Rasio <i>Undisbursed Loan to Plafond</i> Korporasi pada Triwulan IV 2025	30
Grafik 2.4.1	Perkembangan Pembiayaan Nonbank	30
Grafik 2.4.2	Perkembangan Penerbitan EBUS	31
Grafik 2.4.3	Perkembangan Aktivitas Penawaran Umum	31
Grafik B2.1.1	Rasio Tolakan Aplikasi Kredit Baru	32
Grafik B2.1.2	Estimasi Premi Resiko Kredit pada Komponen Suku Bunga Dasar Kredit	33
Grafik B2.1.3	Suku Bunga Kredit Rupiah dan NPL Kredit Konsumsi	33
Grafik B2.1.4	Pangsa DPK <i>Special Rate</i> Rupiah Terhadap Total DPK	33

Bab 3

Ketahanan Sistem Keuangan Tetap Kuat

Grafik 3.1.1	Perkembangan <i>Non Performing Loan</i> (bruto) Berdasarkan Segmen	38
Grafik 3.1.2	Perkembangan Komposisi <i>Loan at Risk</i> Perbankan	39
Grafik 3.1.3	Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen	39
Grafik 3.1.4	Perkembangan <i>Coverage</i> Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Terhadap Risiko Kredit	39

Grafik 3.1.5	Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Kelompok Bank	39
Grafik 3.1.6	Perkembangan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> dan <i>Net Stable Funding Ratio</i>	40
Grafik 3.1.7	<i>Return on Assets</i> , <i>Net Interest Margin</i> , dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Perbankan	40
Grafik 3.1.8	Selisih Total <i>Net</i> Pendapatan Nonbunga dengan <i>Overhead Cost</i> (Disetahunkan)	40
Grafik 3.1.9	Perkembangan Pendapatan Bersih Non-Bunga Bank (Disetahunkan)	41
Grafik 3.1.10	Perkembangan Permodalan	41
Grafik 3.1.11	Perkembangan Komposisi Modal	41
Grafik 3.2.1	Perkembangan Kemampuan Bayar Korporasi (ICR)	41
Grafik 3.2.2	Perkembangan Rasio Likuiditas (<i>Cash Ratio</i>) Korporasi	42
Grafik 3.2.3	Perkembangan Indikator <i>Financial Distress</i> (Altman Z-Score) Korporasi	42
Grafik 3.2.4	Perkembangan Tenaga Kerja Formal dan Informal	42
Grafik 3.2.5	Perkembangan Indeks Penghasilan RT	43
Grafik 3.2.6	Perkembangan Proporsi Pengeluaran RT	43
Grafik 3.2.7	Kenaikan UMP dan Upah Aktual	43
Grafik 3.2.8	Perkembangan NPL RT	43
Grafik 3.2.9	Perkembangan NPL RT per Jenis Kredit	44
Grafik 3.2.10	Perkembangan NPL RT Berdasarkan Kelas Pendapatan	44
Grafik 3.3.1	Eksposur PP dan Pindar pada Total DPK Perbankan	44
Grafik 3.3.2	Eksposur PP dan Pindar pada Total Kredit Perbankan	45
Grafik 3.3.3	NPF dan GR Perusahaan Pembiayaan	45

Grafik 3.3.4	TWP 90 Pinjaman Daring	45
Grafik 3.3.5	Kinerja dan Valuasi IHSG	45
Grafik 3.3.6	Valuasi Bursa Saham Kawasan ASEAN	45
Grafik 3.4.1	Perkembangan ULN Indonesia Menurut Institusi	46
Grafik 3.4.2	Perkembangan ULN Swasta Menurut Institusi	46
Grafik 3.4.3	Perkembangan ULN Korporasi Nonkeuangan dan Pangsa Berdasarkan Tenor	46
Grafik 3.4.4	Perkembangan <i>Outstanding</i> ULN Bank	47
Grafik 3.4.5	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Jangka Panjang Bank Berdasarkan Jatuh Tempo	47
Grafik 3.4.6	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Berdasarkan Jenis	47
Grafik B3.2.1	Jumlah Insiden Siber di Perbankan Indonesia	49

Bab 4 Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan Terus Dikembangkan

Grafik 4.1.1	Pertumbuhan Kredit dan Kredit UMKM	52
Grafik 4.1.2	Perkembangan Kredit UMKM per Segmen	52
Grafik 4.1.3	Indeks <i>Lending Standard</i> Kredit UMKM	54
Grafik 4.1.4	Rasio <i>Non-Performing Loan</i> Kredit UMKM dan Non UMKM Perbankan	54
Grafik 4.1.5	Indeks Kinerja UMKM	54
Grafik 4.1.6	Indeks Kinerja UMKM per Sektor	54
Grafik 4.2.1	Pertumbuhan KPR Hijau, KKB Hijau, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	56

Grafik 4.2.2	Rasio NPL KPR dan KKB Hijau	56
Grafik 4.3.1	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	57
Grafik 4.3.2	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Segmen Nasabah	57
Grafik 4.3.3	Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah Berdasarkan Instrumen	58
Grafik 4.3.4	Perkembangan Rasio Alat Likuid BUS Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti	58
Grafik 4.3.5	Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah	59
Grafik 4.3.6	Perkembangan Realisasi RIM Syariah	59
Grafik 4.3.7	Perkembangan Realisasi PLM dan Realisasi Insentif KLM	59

Bab 5 Kebijakan Makroprudensial untuk Mengakselerasi Intermediasi dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Grafik 5.1.1	Perkembangan <i>Credit to GDP Gap</i>	64
Grafik 5.1.2	Perkembangan RIM Perbankan	65
Grafik 5.2.1	Penurunan BI-Rate dan Suku Bunga Perbankan	66
Grafik B5.1.1	Pertumbuhan Kredit Sektor KLM <i>Forward Looking</i>	70

Bab 6 Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Grafik B6.1.1	Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia	77
----------------------	---------------------------------------	-----------



Halaman ini sengaja dikosongkan.

Daftar Singkatan

AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
AS	Amerika Serikat
BNPL	<i>Buy Now Pay Later</i>
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	basis points
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
Capex	<i>capital expenditure</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CoF	<i>cost of fund</i>
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
DaR	<i>Debt at Risk</i>
DAR	<i>Debt to Asset Ratio</i>
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSK-IAI	Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>
EBUS	Efek Bersifat Utang/Sukuk
FaR	<i>Financing at Risk</i>
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FFR	<i>Federal Funds Rate</i>
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FSB	Financial Stability Board
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GR	<i>Gearing Ratio</i>

GWM	Giro Wajib Minimum
ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>
IEKB	Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan
IHPR	Indeks Harga Properti Residensial
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
ILR	<i>Indeks Lending Requirement</i>
ILS	<i>Indeks Lending Standard</i>
IMF	International Monetary Fund
ISEF	Indonesia Sharia Economic Festival
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
KBMI	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KDKMP	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KMG	Kredit Multiguna
KMK	Kredit Modal Kerja
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LaR	<i>Loan at Risk</i>
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LDR	<i>Loan-to-Deposit Ratio</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV/FTV	<i>Loan to Value/Financing to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
MBG	Makan Bergizi Gratis
mtm	<i>month to month</i>

NDF	<i>Non-Deliverable Forward</i>	SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
NIM	<i>Net Interest Margin</i>	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
NPF	<i>Non-Performing Financing</i>	SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia	SBN	Surat Berharga Negara
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>	SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
NPM	<i>Net Profit Margin</i>	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>	SKI	Siklus Keuangan Indonesia
OHC	<i>overhead cost</i>	SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	SRIA	<i>Sharia Restricted Investment Account</i>
OM	Operasi Moneter	SSB	Surat-Surat Berharga
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur	SukBI	Sukuk Bank Indonesia
PBI	Peraturan Bank Indonesia	SVBI	Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
PDN	Posisi Devisa Neto	SUVBI	Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia
pindar	pinjaman daring	TBP	Tingkat Bunga Penjaminan
PKP	Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman	TK	Tenaga Kerja
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial	TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
PMK	Protokol Manajemen Krisis	TPIP	Tim Pengendali Inflasi Pusat
PMKT	Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi	TTIS	Tim Tanggap Insiden Siber
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	TWP 90	Tingkat Wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo
PP	Perusahaan Pembiayaan	UL	<i>Undisbursed Loan</i>
PSP	Penyedia Sistem Pembayaran	ULN	Utang Luar Negeri
PYD	Pembiayaan Yang Disalurkan	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
repo	<i>repurchase agreement</i>	UMP	Upah Minimum Provinsi
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial	UU P2SK	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
ROA	<i>Return on Asset</i>	UUS	Unit Usaha Syariah
ROE	<i>Return on Equity</i>	Valas	valuta asing
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	yoy	<i>year on year</i>
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri	ytd	<i>year to date</i>
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah		
RT	Rumah Tangga		
SAL	Saldo Anggaran Lebih		

Prakata



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, Kajian Stabilitas Keuangan No. 46, Februari 2026 dengan tema “Mengakselerasi Intermediasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi” dapat diterbitkan. Kajian ini merupakan bagian strategis dari komunikasi kebijakan Bank Indonesia yang menyajikan gambaran perkembangan, potret terkini, dan prospek stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kajian didasarkan pada asesmen tiga pilar utama kebijakan makroprudensial, yaitu intermediasi, ketahanan sistem keuangan, serta inklusi keuangan dan hijau. Ketiga pilar makroprudensial tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Pada semester II 2025, ketidakpastian global semakin tinggi dengan sumber risiko yang kian meningkat sehingga perekonomian dunia melambat. Terjadi peningkatan intensitas perang dagang dengan arah kebijakan *inward-looking* yang utamanya dipicu oleh pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat, dan eskalasi ketegangan geopolitik. Hal-hal tersebut berdampak pada penurunan volume dan nilai perdagangan dunia, gangguan rantai pasok, dan pelebaran fragmentasi antarnegara. Seiring hal tersebut, volatilitas pasar keuangan global turut meningkat dengan penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara maju. Selanjutnya, terdapat pergeseran aliran modal keluar dari negara berkembang ke aset-aset investasi yang dinilai lebih aman, seperti emas dan obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Kerentanan global juga meningkat seiring dengan perluasan aktivitas Industri Keuangan Non-Bank dan perkembangan inovasi keuangan berbasis kriptografi sehingga menambah sumber risiko baru. Pertumbuhan aset dana investasi memperbesar pangsa aset Industri Keuangan Non-Bank terhadap aset keuangan global dan meningkatkan peran intermediasi di luar perbankan. Selain itu, risiko interkoneksi, risiko *leveraging*, dan risiko pasar juga meningkat. Kerentanan aset kripto global yang ditandai dengan volatilitas harga tinggi saat ini tercatat masih terbatas, namun dapat menambah kompleksitas pemantauan aliran dana, mitigasi risiko operasional, siber, dan perlindungan konsumen.

Di tengah intensitas dinamika dan gejolak eksternal yang tinggi, syukur alhamdulillah stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Resiliensi perekonomian domestik tercermin dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi Pemerintah, serta ekspor. Nilai tukar Rupiah terkendali, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia melalui penguatan strategi

stabilisasi nilai tukar dan operasi moneter *pro-market*, serta penambahan pasokan valuta asing melalui penguatan penerapan kebijakan devisa hasil ekspor. Inflasi Indeks Harga Konsumen 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi.

Intermediasi perbankan mampu tumbuh 9,69% (yoy) pada 2025, berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia dengan kontribusi utama dari investasi, konsumsi dan modal kerja yang terus membaik. Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makroekonomi dan keuangan yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran

tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Bank Indonesia akan terus bersinergi erat dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan mitra strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Permintaan pelaku usaha atas kredit/pembiayaan akan terus didorong dengan memerhatikan kapasitas intermediasi perbankan yang masih besar, didukung sinergi kebijakan otoritas. Untuk ini, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat dan didukung kerja sama antar-Kementerian/Lembaga serta Otoritas terkait melalui program strategis Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026 untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit/pembiayaan kepada sektor riil.

Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 diharapkan menjadi kompas arah kebijakan ke depan bagi pemangku kepentingan, pelaku pasar, akademisi, maupun masyarakat luas dalam memahami perkembangan sistem keuangan nasional. Melalui kajian ini, mari kita tumbuhkan optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dan tangguh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2026, didukung komitmen dan sinergi kuat antarkebijakan. Akselerasi pertumbuhan kredit yang didukung ketahanan sistem keuangan yang kuat dan peningkatan pembiayaan inklusi dan berkelanjutan akan menjadi fondasi kebijakan makroprudensial menuju pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi. Dengan ini, kami optimis akan ketahanan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia, karena “*dengan optimisme, sinergi kebijakan secara kolektif akan membawa perekonomian tumbuh lebih baik dan kuat*”.

Jakarta, Februari 2026



Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo

RINGKASAN EKSEKUTIF



Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia tetap terjaga didukung oleh inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada pada zona Normal sepanjang semester II 2025, didukung oleh ketahanan perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang baik, serta kinerja korporasi dan rumah tangga yang terjaga. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh eskalasi dan meluasnya konflik geopolitik, melebarinya fragmentasi perdagangan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), serta volatilitas pasar keuangan global, keyakinan masyarakat terhadap ketahanan sektor keuangan tetap tinggi. Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif, sejalan dengan dukungan kepada program Asta Cita Pemerintah. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global masih tinggi, dipicu oleh berlanjutnya kebijakan proteksionisme AS dan meluasnya konflik politik di beberapa kawasan. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 seiring dengan disrupsi rantai pasok global serta volatilitas pasar keuangan global dan arus modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pergerakan indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi dan volatilitas pasar masih tetap tinggi. Selain itu, risiko global perlu diwaspadai dari sisi meningkatnya peran IKNB dalam sistem keuangan global dan pesatnya perkembangan aset kripto dan instrumen keuangan berbasis digital yang menambah kompleksitas risiko sistem keuangan, termasuk risiko interkoneksi dan volatilitas harga. Perlambatan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut ke tahun 2026 seiring dengan kebijakan perdagangan yang semakin *inward-looking*, eskalasi ketegangan geopolitik, serta kebijakan moneter global yang ditempuh secara lebih berhati-hati. Dinamika tersebut perlu diwaspadai dan disertai penguatan respons dan koordinasi kebijakan lintas otoritas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memitigasi risiko rambatan gejolak eksternal ke domestik dalam upaya menjaga ketahanan dan stabilitas sistem keuangan domestik.

Di tengah berbagai tantangan global, perekonomian domestik Indonesia tetap berdaya tahan dan perlu terus didorong sesuai kapasitas optimalnya. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga yang didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11%, didukung oleh kinerja perekonomian yang baik di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi domestik juga ditopang oleh ketahanan sektor keuangan dan aktivitas domestik yang terjaga, sejalan dengan implementasi program Asta Cita Pemerintah, serta sinergi kebijakan moneter-fiskal dan makro-mikroprudensial dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK. Pertumbuhan terus didorong, terutama dari sisi permintaan pembiayaan yang belum sepenuhnya kuat seiring perilaku *wait and see* korporasi terhadap kondisi ketidakpastian global serta daya beli rumah tangga kelas menengah bawah yang masih tertahan.

Intermediasi perbankan tumbuh dan terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan. Pada 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,69% (yoy), terutama ditopang oleh Kredit Investasi, khususnya pada sektor-sektor prioritas Pemerintah seperti sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Pertambangan, Pengangkutan, dan Konstruksi. Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi tumbuh lebih terbatas seiring perilaku berhati-hati korporasi yang cenderung menahan ekspansi dan mengoptimalkan dana internal untuk operasional usaha di tengah ketidakpastian global dan daya beli rumah tangga kelas menengah bawah yang masih tertahan. Pada sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan sangat besar, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat menjadi 13,83% (yoy) pada akhir 2025. Perkembangan tersebut ditopang oleh likuiditas perbankan yang longgar, seiring dengan kebijakan ekspansi likuiditas Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah pada beberapa bank, yang mampu meningkatkan ruang ekspansi kredit. Namun demikian, penurunan suku bunga bank perlu diakselerasi agar searah dengan tren pelonggaran kebijakan moneter untuk mendukung pembiayaan ekonomi lebih optimal. Respons kebijakan atas kondisi ini adalah penguatan kebijakan transmisi suku bunga dan dorongan permintaan kredit sebagai salah satu fokus dalam sinergi kebijakan ke depan.

Stabilitas sistem keuangan tetap kuat didukung oleh ketahanan perbankan, korporasi, dan rumah tangga (RT) yang terjaga. Ketahanan perbankan didukung oleh likuiditas yang memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57%, serta rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masing-masing berada jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan. Permodalan perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang tinggi, sehingga mampu menyerap risiko yang dihadapi. Risiko kredit perbankan berada pada level terkendali, tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang rendah sebesar 2,05% pada Desember 2025, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, dan penurunan *Loan at Risk* (LaR) menjadi 8,77%, yang merupakan level terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perbaikan kualitas kredit terutama terjadi di segmen korporasi dan komersial, sedangkan peningkatan risiko perlu dicermati pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kredit konsumsi, sejalan dengan melemahnya daya beli rumah tangga kelas menengah bawah dan berakhirnya relaksasi restrukturisasi COVID-19. Adapun kemampuan bayar dan likuiditas korporasi masih terjaga, tercermin dari peningkatan *Interest Coverage Ratio* (ICR) dan bantalan likuiditas korporasi yang masih memadai pada triwulan III 2025. Pada RT, ketahanan masih relatif terjaga walaupun kapasitas pembayaran mulai menunjukkan kecenderungan lebih terbatas, disebabkan oleh tekanan pendapatan. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah akan difokuskan untuk menahan pelemahan daya beli RT khususnya kelas menengah ke bawah.

Di tengah ketahanan sistem keuangan yang tetap kuat, pembiayaan syariah dan berkelanjutan terus tumbuh, namun dinamika intermediasi pada segmen UMKM perlu dicermati lebih lanjut. Kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 0,30% (yoy) pada Desember 2025, dipengaruhi oleh perilaku hati-hati perbankan seiring pelemahan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan kenaikan risiko kredit, khususnya pada segmen mikro dan menengah. Perlambatan kredit UMKM terutama terjadi pada sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Jasa dan Konstruksi, sementara pertumbuhan positif masih tercatat pada sektor Pertanian, *Real Estate*, Transportasi, dan Akomodasi yang didukung oleh

program Pemerintah. Di sisi lain, pembiayaan syariah dan pembiayaan berkelanjutan tetap tumbuh dengan risiko yang termitigasi. Hal ini didukung oleh kebijakan makroprudensial yang akomodatif utamanya melalui penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, dan sinergi kebijakan antarotoritas dalam upaya pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta ekosistem ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan.

Merespons berbagai perkembangan selama semester II 2025, bauran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia diarahkan *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui peningkatan besaran KLM secara total menjadi 5,5%, berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (*forward looking*), serta memperhitungkan akselerasi penurunan suku bunga kredit bank (*interest rate channel*) dan pencapaian jumlah kredit (*lending channel*) untuk mendorong akselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Pada 16 Desember 2025, KLM *Forward Looking* kembali diperkuat antara lain dengan mengoptimalkan besaran insentif yang diberikan kepada bank dengan respons penurunan suku bunga yang searah dengan penurunan suku bunga kebijakan, mendukung penciptaan lapangan kerja dan sektor prioritas yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) tetap dipertahankan sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dijaga tetap akomodatif, kebijakan *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) dan uang muka dipertahankan longgar, serta Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) diperkuat untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan ketahanan perbankan. Bank Indonesia terus memperkuat aspek inklusif dan berkelanjutan melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), serta mendorong pembiayaan UMKM, pembiayaan hijau, dan pembiayaan berbasis syariah. Respons kebijakan makroprudensial 2025 juga diarahkan untuk memperkuat resiliensi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, termasuk melalui penguatan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT).

Sinergi kebijakan dalam kerangka KSSK akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong intermediasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Koordinasi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka efektivitas implementasi bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan kebijakan otoritas terkait lainnya, seperti fiskal, serta pengawasan dan penjaminan, termasuk melalui *joint stress test* dan simulasi krisis KSSK untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan protokol pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Sinergi KSSK juga diarahkan untuk terus mendukung implementasi program prioritas Pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Perumahan Rakyat, memperkuat daya beli masyarakat, dan memperkuat pembiayaan sektor riil menuju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Ke depan, prospek intermediasi perbankan pada 2026 diperkirakan lebih baik dengan pertumbuhan kredit dalam kisaran 8–12%, sejalan dengan perbaikan prospek ekonomi domestik dan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Tantangan sebagai dampak risiko global dan domestik tetap perlu diwaspadai, termasuk eskalasi ketidakpastian geopolitik, dinamika pasar keuangan global, serta risiko kualitas aset pada segmen tertentu dan potensi dampaknya kepada perekonomian domestik. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan dan sinergi lintas otoritas, termasuk melalui inisiatif Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026 untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih tinggi dan berkelanjutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab 1

KINERJA EKONOMI INDONESIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL YANG TINGGI

Ketidakpastian perekonomian global pada semester II 2025 tetap tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perang dagang antarnegara dan berlanjutnya ketegangan geopolitik, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang memicu tindakan balasan dari sejumlah negara besar telah menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta memperburuk dampak gangguan rantai pasok dunia akibat ketegangan geopolitik yang telah berlangsung sejak 2024. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga semakin tinggi yang ditandai dengan peningkatan premi risiko sehingga mendorong investor melakukan realokasi portofolio ke aset-aset investasi yang dianggap aman (safe haven assets), khususnya komoditas emas. Sementara itu, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan berkurang disertai dengan tingkat imbal hasil (yield) US Treasury tenor 2 dan 10 tahun yang cenderung tetap tinggi sejalan dengan besarnya risiko fiskal pemerintah AS. Perkembangan tersebut memperburuk dampak rambatan ke negara-negara emerging market, tercermin dari meningkatnya volatilitas aliran modal asing dan besarnya tekanan terhadap nilai tukar mata uangnya.

Ekonomi domestik tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi Pemerintah, dan ekspor yang tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global. Dari sisi

Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang terutama oleh LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan eceran, serta LU Pertanian. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Namun demikian, penguatan pertumbuhan dan intermediasi masih perlu terus didorong seiring indikasi permintaan pembiayaan yang belum sepenuhnya kuat, antara lain karena kecenderungan korporasi untuk mengambil sikap kehati-hatian dalam investasi dan ekspansi usaha serta lebih memanfaatkan dana internal.

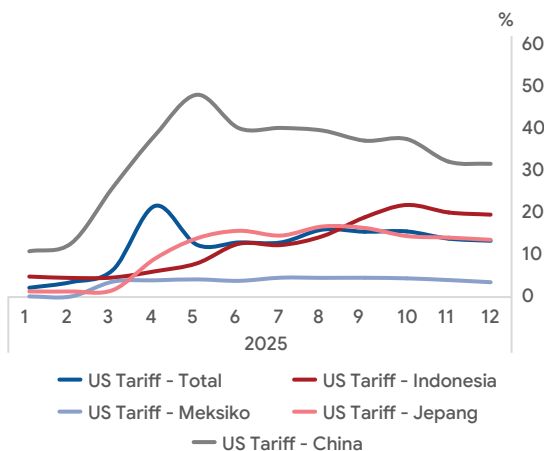
Sejalan dengan ketahanan makroekonomi, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh ketahanan perbankan yang kuat. Kinerja intermediasi perbankan pada paruh kedua 2025 tetap baik. Namun demikian, penguatan intermediasi masih perlu terus didorong, terutama melalui percepatan penurunan suku bunga perbankan agar penyaluran kredit/pembiayaan lebih optimal mendukung pertumbuhan ekonomi. Risiko kredit perbankan secara industri masih terjaga meskipun terdapat peningkatan risiko kredit konsumsi pada segmen rumah tangga, terutama kelas menengah bawah, serta potensi kerentanan dari dinamika pasar keuangan dan sektor nonbank. Di tingkat global, meningkatnya kerentanan terkait aktivitas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) serta maraknya aset digital perlu diwaspadai potensi dampak rambatannya ke stabilitas sistem keuangan.

1.1

Dinamika Global: Tantangan Baru dalam Stabilitas Makro dan Stabilitas Sistem Keuangan

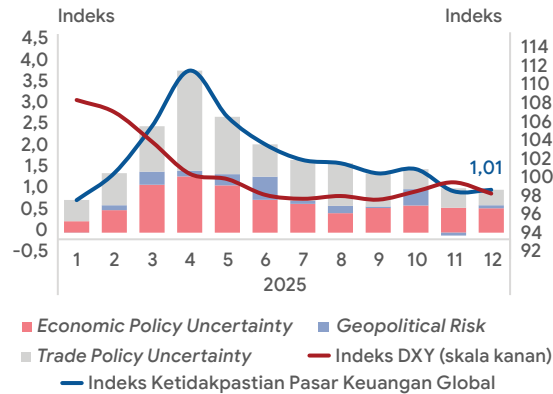
Ketidakpastian global pada semester II 2025 tetap tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Pengenaan tarif sepihak oleh AS memicu tindakan balasan dari sejumlah negara besar, sehingga eskalasi perang dagang antarnegara semakin menguat (Grafik 1.1.1). Sementara itu, ketegangan geopolitik terus berlanjut, antara lain dipengaruhi oleh perang Rusia–Ukraina yang belum selesai dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas seiring dengan peningkatan serangan Israel ke Palestina. Kondisi ini semakin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan sehingga berdampak negatif pada keyakinan para pelaku ekonomi dan investor di berbagai negara (Grafik 1.1.2).

Kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan fragmentasi antarnegara yang semakin melebar. Kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia. Dampak terhadap aktivitas ekonomi lebih terlihat pada memburuknya keyakinan konsumen dan produsen akibat ketidakpastian pendapatan dan keberlangsungan usaha. Pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan sebesar 3,3% dan ke depan akan melambat menjadi 3,2% pada 2026 dan 2027. Divergensi pola



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.1.1. Kebijakan Tarif Resiprok AS Terhadap Tiongkok dan Negara lainnya



Keterangan: Data s.d 31 Desember 2025

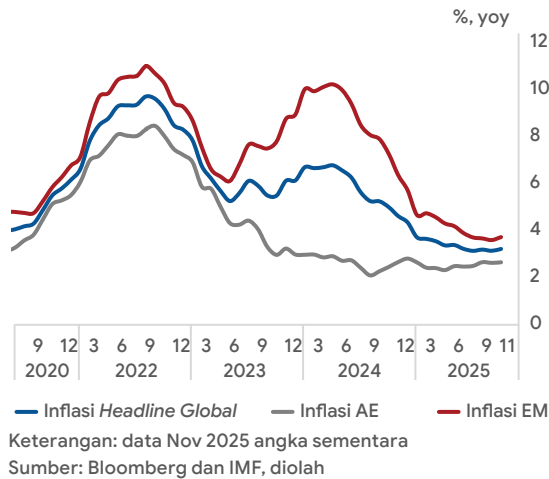
*Indeks ketidakpastian dibentuk menggunakan PCA

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.1.2. Indeks Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

pertumbuhan antarnegara juga berlanjut dengan ekonomi negara maju tetap tumbuh baik, sementara ekonomi negara berkembang tumbuh melambat dengan kecepatan yang berbeda-beda.

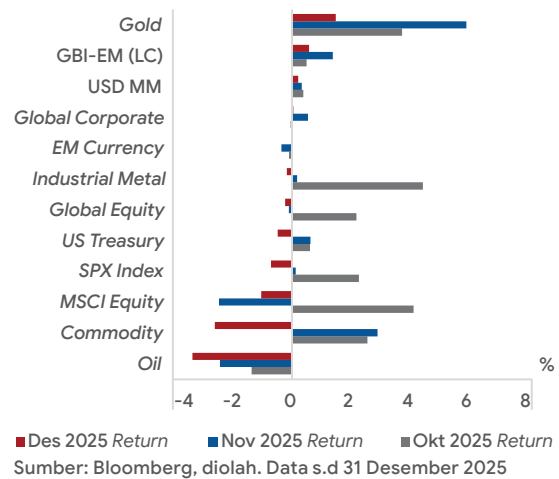
Sementara itu, tekanan inflasi dunia dan berbagai negara diperkirakan masih akan tinggi akibat tetap tingginya harga komoditas nonmigas sebagai dampak pengenaan tambahan tarif impor dan terganggunya rantai perdagangan dunia. Kebijakan tarif AS yang meningkatkan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas yang tinggi di samping kenaikan harga sejumlah komoditas. Akibatnya, penurunan inflasi dunia berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya (Grafik 1.1.3). Dinamika inflasi global tersebut membatasi ruang gerak penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut di banyak negara untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi domestiknya. Meskipun secara umum arah kebijakan moneter global sepanjang 2025 bersifat akomodatif, namun dengan tingginya ketidakpastian global, bank-bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya. Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang mulai menurunkan FFR menjadi 4,50% pada September 2024, lebih memilih untuk menunda penurunan suku bunga berikutnya hingga September 2025 menjadi 4,25%, lalu pada Oktober 2025 menjadi



Grafik 1.1.3. Inflasi Global

4,00% dan terakhir pada Desember 2025 menjadi 3,75% (Tabel 1.1.1). Perbedaan tingkat dan waktu penurunan suku bunga kebijakan juga terjadi di *emerging economies* seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi berdampak pada pergeseran aliran modal keluar dari *Emerging Market Economies*. Kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia meningkatkan premi risiko di pasar keuangan global, sehingga mendorong investor melakukan realokasi portofolio ke aset-aset investasi yang dianggap lebih aman (*safe haven assets*), terutama komoditas emas (Grafik 1.1.4). Proses penurunan inflasi yang berjalan lebih lambat akibat dampak pengenaan tarif impor yang lebih tinggi menyebabkan ruang penurunan FFR ke depan makin berkurang, sementara tingkat



Grafik 1.1.4. Return Aset Global

imbal hasil (*yield*) US Treasury tenor 2 dan 10 tahun cenderung tetap tinggi sejalan dengan besarnya risiko fiskal pemerintah AS. Perkembangan tersebut mendorong indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara utama dunia (DXY) cenderung tetap tinggi, disertai dengan volatilitas yang juga tinggi (Grafik 1.1.5).

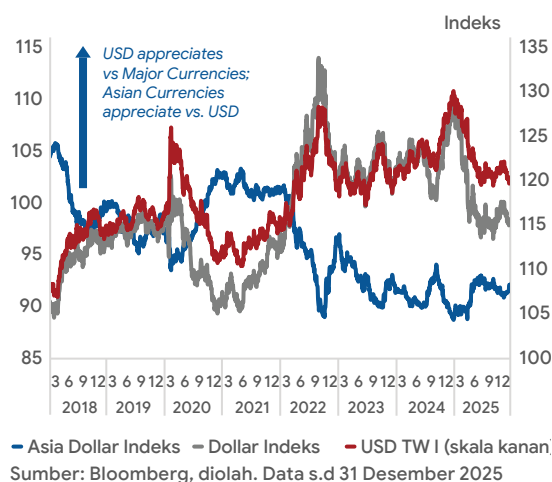
Di tengah ketidakpastian global, kerentanan sistem keuangan global meningkat seiring percepatan inovasi dan perluasan skala aktivitas IKNB dan inovasi keuangan berbasis kriptografi. Pangsa aset IKNB terhadap aset keuangan global mengalami peningkatan (Grafik 1.1.6), terutama didorong oleh pertumbuhan aset dana investasi¹,

1 Berdasarkan *Global Monitoring Report* tahun 2025, Financial Stability Board

Tabel 1.1.1. Kebijakan Moneter: Negara Maju dan *Emerging Economies*

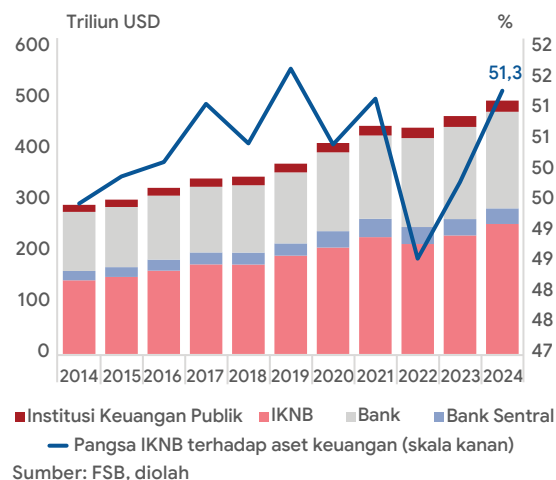
	2024	2025			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Negara Maju					
Federal Reserve (FED)	4,50	4,50	4,50	4,25	3,75
European Central Bank (ECB)	3,00	2,50	2,00	2,00	2,00
Bank of England (BOE)	4,75	4,50	4,25	4,00	3,75
Bank of Japan (BOJ)	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75
Negara Berkembang					
People's Bank of China (PBoC)	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40
Bank of Korea (BOK)	3,00	2,75	2,50	2,50	2,50
Reserve Bank of India (RBI)	6,20	6,25	5,50	5,50	5,25
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)	5,75	5,75	5,25	5,00	4,50

Sumber: Bank Indonesia, diolah



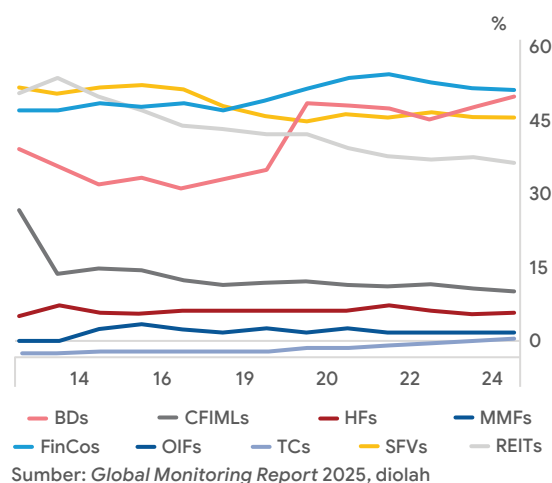
Grafik 1.1.5. Indeks Nilai Tukar Dolar AS, Negara Maju dan Negara Asia

memperkuat peran intermediasi di luar perbankan sekaligus meningkatkan risiko interkoneksi (**Boks 1.3**). Di beberapa yurisdiksi, ekspansi transaksi *derivatif* oleh IKNB berpotensi meningkatkan *leverage* dan risiko pasar (Grafik 1.1.7), khususnya ketika persyaratan *margin* dan permodalan belum sepenuhnya diatur oleh *prudential regulation*. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko *deleveraging* secara mendadak dan memicu *fire sales* jika terjadi pembalikan kondisi pasar yang selanjutnya dapat menjadi risiko kerentanan bagi pasar keuangan global. Sementara itu, dinamika aset kripto global masih ditandai oleh volatilitas harga yang tinggi dan meningkatnya keterkaitan dengan sistem keuangan secara lebih luas, termasuk melalui *stablecoin*. Meskipun kerentanan sistem keuangan

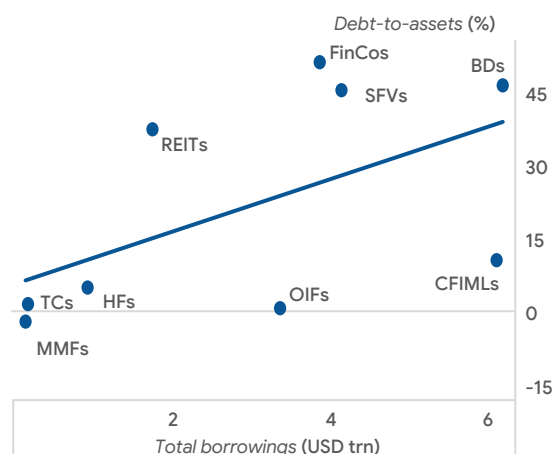


Grafik 1.1.6. Aset IKNB Terhadap Total Aset Keuangan Global

yang bersumber dari pasar aset kripto saat ini relatif terbatas, namun pesatnya transaksi aset kripto perlu diantisipasi melalui pengawasan secara menyeluruh, khususnya dalam konteks pemantauan aliran dana lintas negara di luar perimeter regulasi, penguatan rezim *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*, serta mitigasi risiko operasional, siber, dan penguatan perlindungan konsumen (**Boks 1.2**). Isu perlindungan konsumen menjadi urgensi karena pesatnya adopsi aset kripto pada segmen ritel. Kompleksitas produk, asimetri informasi, serta maraknya penggunaan kripto dalam skema penipuan (*fraud/scam*) berpotensi menimbulkan kerugian luas dan berpotensi menjadi sumber risiko kepercayaan, terutama pada segmen yang berada di luar perimeter regulasi.



Grafik 1.1.7. Tingkat Leverage IKNB Global



1.2

Kinerja Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Meningkat, Stabilitas Tetap Terjaga

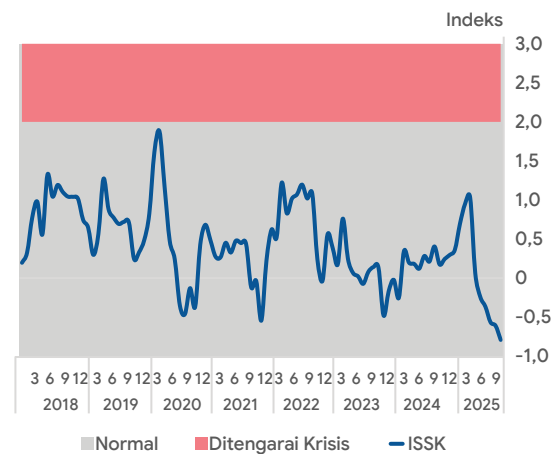
Di dalam negeri, ekonomi domestik tetap tumbuh dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% (yoy), meningkat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,03% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi Pemerintah, serta ekspor yang tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global. Dari sisi LU, pertumbuhan ditopang terutama oleh LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertanian. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik didukung oleh kinerja positif perekonomian di hampir seluruh wilayah. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy) didukung oleh peningkatan permintaan domestik sejalan dengan berbagai bauran kebijakan yang ditempuh untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas.

Ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. NPI pada 2025 diperkirakan tetap berdaya tahan dengan transaksi berjalan yang masih sehat dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan surplus 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 tetap kuat sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tercermin dari nilai tukar Rupiah yang tetap terkendali di tengah besarnya tekanan eksternal akibat tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024. Secara keseluruhan, pergerakan Rupiah relatif stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan dengan mata uang negara maju selain dolar AS. Nilai tukar Rupiah yang tetap terkendali tersebut didukung oleh respons kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, termasuk intervensi

terukur di *off-shore Non-Deliverable Forward* (NDF) dan strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, peningkatan konversi valuta asing ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar Rupiah.

Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, dengan inflasi IHK pada 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), seiring konsistensi kebijakan moneter yang menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas, *imported inflation* yang tetap terkendali serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi kelompok *administered prices* terjaga rendah sebesar 1,93% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* masih relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy) didorong terutama oleh kenaikan harga komoditas bawang merah seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga benih. Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini juga merupakan hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik dan menopang perbaikan kinerja ekonomi. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) sepanjang semester II 2025 tetap berada pada zona Normal (Grafik 1.2.1), mencerminkan resiliensi sistem keuangan nasional dalam menghadapi tekanan yang utamanya bersumber dari global. Momentum pertumbuhan ekonomi sejak akhir 2024 hingga semester II 2025 turut mendorong kinerja intermediasi keuangan yang tetap baik. Kredit perbankan pada 2025 tumbuh 9,69% (yoy), berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu 8–11% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong penurunan suku bunga bank melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) *forward looking* serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan



Grafik 1.2.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

yang terjaga. Dari sisi permintaan, pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan komitmen pembiayaan yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan

tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seiring masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Ketahanan perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit, tercermin dari rasio CAR Desember 2025 yang tercatat tinggi sebesar 25,89%. Di sisi risiko, perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang tercermin dari rasio NPL agregat tetap rendah sebesar 2,05% pada Desember 2025. Hasil *stress test* Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko, sebagaimana tercermin dari tingkat permodalan dan risiko kredit tetap terjaga, didukung oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memitigasi potensi dampak rambatan dari gejolak global dan risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

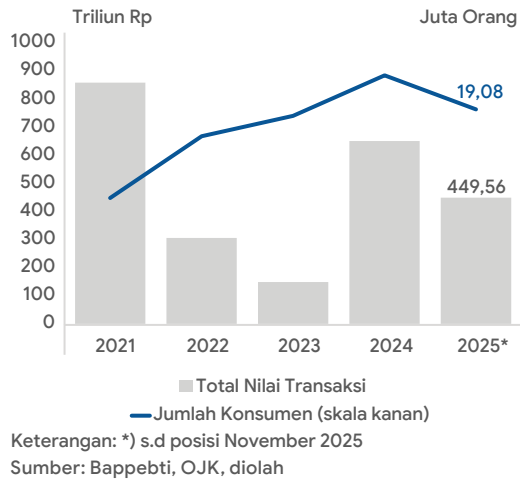
1.3 Kerentanan dan Sumber Guncangan Sistem Keuangan Indonesia²

Fungsi intermediasi tetap berjalan baik selama semester II 2025, namun adanya tekanan struktural perlu menjadi perhatian dan segera direspons. Pertumbuhan DPK yang melambat hingga pertengahan semester II mulai membatasi kapasitas penyaluran kredit, di tengah masih positifnya minat pembiayaan dari perbankan. Perlambatan ini sejalan dengan turunnya kontribusi DPK perorangan seiring perilaku *yield seeking* yang mendorong beralihnya sebagian DPK ke instrumen investasi lainnya yang lebih menarik. Secara komposisi, DPK didominasi oleh swasta non-IKNB sehingga menciptakan ketergantungan terhadap nasabah besar. Kondisi tersebut mendorong persaingan suku bunga yang semakin intensif, ditandai oleh persaingan bank menawarkan suku bunga DPK yang tinggi, termasuk dalam bentuk *special rate*, untuk menjaga dan

menarik pendanaan. Sebagai implikasi, biaya dana bank meningkat dan berpotensi menekan efisiensi intermediasi sebagaimana tercermin dari indikator *net interest margin* (NIM) dan *Return on Asset* (ROA) bank yang sedikit menurun.

Tekanan struktural di sistem keuangan sejalan dengan temuan pada survei persepsi masyarakat atas sumber risiko sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan semester II 2025. Survei tersebut mengidentifikasi beberapa faktor utama yang dipandang sebagai sumber potensi kerentanan sistemik terhadap sistem keuangan. Pertama, ketergantungan pasar keuangan pada aliran modal

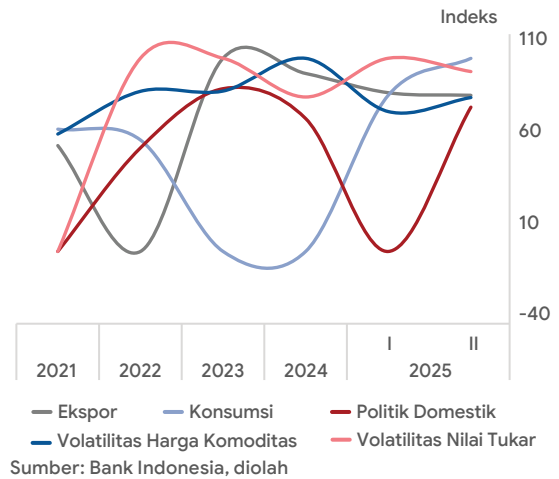
2 Berdasarkan *Risk Assessment Matrix* (RAM) yang disusun dari hasil Survei Risiko Sistemik Semester II 2025 (172 responden terdiri dari institusi keuangan, Korporasi, pengamat ekonomi, dan akademisi), data per 13 Oktober 2025.



Grafik 1.3.1. Perkembangan Transaksi Aset Kripto

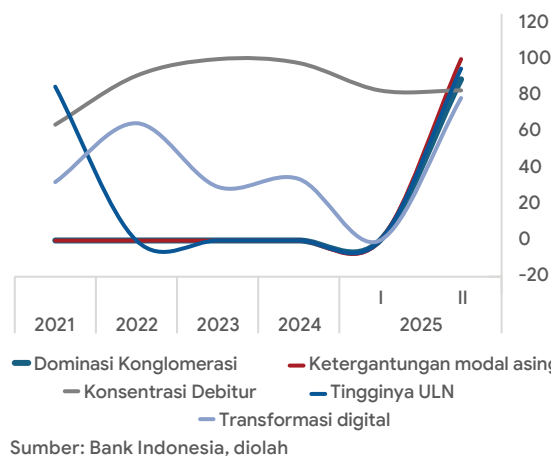
asing. Kedua, tingginya utang korporasi dalam valuta asing. Ketiga, dominasi konglomerasi keuangan dalam sistem keuangan Indonesia. Keempat, pesatnya digitalisasi sistem keuangan. Kelima, kredit yang terkonsentrasi pada sektor dan *value chain* tertentu atau pada debitur-debitur besar. Khusus terkait sumber risiko keempat, meningkatnya pemanfaatan aset keuangan digital, terutama aset kripto, turut menambah kompleksitas pengawasan, khususnya terkait perlindungan konsumen, integritas pasar, serta penguatan rezim *Anti Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism* (Boks 1.2). Namun demikian, ketahanan stabilitas sistem keuangan dari risiko IKNB dan aset keuangan digital terutama aset kripto relatif terjaga seiring dengan tingkat eksposur tidak langsung terhadap sistem keuangan yang masih terbatas. Interkoneksi IKNB dan perbankan masih terbatas sejalan dengan eksposur melalui aset dan kewajiban yang terbatas (Boks 1.3). Karenanya, interkoneksi ekosistem aset kripto dengan sistem keuangan domestik, terutama perbankan, yang terhubung secara tidak langsung melalui aset dan liabilitas ekosistem (mencakup bursa, lembaga kliring, dan pedagang fisik aset kripto) juga masih terbatas. Hingga November 2025, nilai transaksi aset kripto domestik tercatat Rp449,5 triliun dengan jumlah konsumen sebesar 19,08 juta orang (Grafik 1.3.1), relatif menurun dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan penurunan harga Bitcoin global.

Hasil survei juga mengidentifikasi sumber guncangan (*shocks*) utama yang dinilai dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dari survei, terdapat lima sumber guncangan yang perlu mendapat perhatian (Grafik 1.3.2). Pertama, tertahannya konsumsi dan daya beli masyarakat



Grafik 1.3.2. Perkembangan Top 5 Shock SSK

Indonesia. Kedua, ketidakpastian global dan potensi aliran keluar modal asing dari Indonesia. Ketiga, perlambatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang. Keempat, pelemahan/volatilitas harga komoditas ekspor. Terakhir, meningkatnya ketidakstabilan sosial dan politik domestik, antara lain tercermin dari meningkatnya aktivitas unjuk rasa. Meskipun kelima guncangan tersebut bukanlah faktor yang baru, 4 dari 5 sumber kerentanan utama merupakan permasalahan yang kembali menjadi perhatian seiring perkembangan lanskap pembiayaan (Grafik 1.3.3). Ketergantungan terhadap modal asing, tingginya utang luar negeri (ULN), dominasi konglomerasi, konsentrasi debitur, dan transformasi digital merupakan faktor yang dipersepsikan masyarakat sebagai lima kerentanan utama pada semester II 2025.



Grafik 1.3.3. Perkembangan Top 5 Kerentanan SSK

Kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan sektor keuangan Indonesia tetap tinggi di tengah berbagai kerentanan dan potensi guncangan. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden meyakini stabilitas sistem keuangan mampu bertahan dalam menghadapi risiko sistemik yang berpotensi terjadi. Tingkat keyakinan ini didukung oleh sinergi bauran kebijakan nasional yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah serta KSSK, yang difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengendalian inflasi dan nilai tukar, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, serta mitigasi dampak rambatan gejolak dan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik. Sinergi tersebut turut diperkuat oleh respons kebijakan makroprudensial

Bank Indonesia yang tetap akomodatif untuk mendukung fungsi intermediasi secara optimal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Kebijakan dimaksud antara lain meliputi penguatan implementasi KLM *forward looking* yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan guna mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka mengoptimalkan intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, berlaku efektif pada 16 Desember 2025, serta penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor-sektor prioritas sesuai cakupan KLM, termasuk respons perubahan SBDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Boks 1.1

Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Global di Tengah Tingginya Kerentanan dan Ketidakpastian

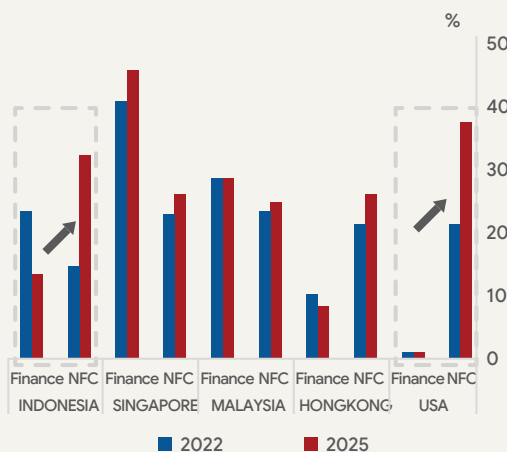
Kondisi pasar keuangan global menunjukkan pemulihan dengan indikasi overvaluasi harga aset. Pasca guncangan tarif AS pada April 2025, kondisi pasar keuangan global memulih meski belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas yang kuat. Laporan *Global Financial Stability Report* Oktober 2025 mengindikasikan valuasi aset kembali ke tingkat yang terlalu mahal (overvaluasi), sementara pelemahan dolar AS serta perubahan korelasi antarkelas aset menciptakan potensi koreksi tajam. Kerangka *growth at risk* International Monetary Fund (IMF) menunjukkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan tetap tinggi dan menilai adanya ketidaksesuaian antara pergerakan pasar dan kondisi fundamental yang berpotensi memicu koreksi tajam dan menimbulkan ketegangan finansial global.

Tekanan kerentanan global sebagian besar bersumber dari dinamika fiskal. Defisit fiskal yang melebar di banyak negara telah memicu lonjakan penerbitan obligasi pemerintah yang semakin bergantung pada investor yang sensitif terhadap perubahan harga. Ketergantungan ini pada akhirnya akan meningkatkan *term premia* dan menekan imbal hasil jangka panjang ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga membuat pasar obligasi lebih rentan. Di negara berkembang, pergeseran menuju pembiayaan dalam mata uang lokal di satu sisi memang memperkuat

ketahanan pasar. Namun, di sisi lain dapat memperdalam keterkaitan antara pemerintah dan sektor perbankan (*sovereign-bank nexus*), sehingga dapat meningkatkan risiko pada sistem keuangan ketika muncul tekanan fiskal.

Di sisi lain, peran lembaga keuangan nonbank (IKNB) semakin meningkat dan menjadi semakin terkoneksi dengan sistem perbankan. IKNB kini menjadi aktor penting dalam pasar obligasi, kredit korporasi, dan produk pembiayaan berbasis investor ritel yang memiliki likuiditas terbatas. IMF melihat bahwa tekanan yang muncul di sektor IKNB berpotensi menular ke perbankan melalui peningkatan risiko likuiditas dan penurunan kualitas aset. Bahkan hasil *stress test* menunjukkan bahwa kombinasi guncangan makroekonomi dan tekanan pada IKNB dapat meningkatkan proporsi bank yang berada dalam kondisi lemah.

Tren yang sama juga terjadi di sistem keuangan domestik, yakni terdapat indikasi overvaluasi aset pada pasar modal. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi tren yang serupa di Indonesia dan negara *peers* di Asia. Emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar mengalami pergeseran, yakni dari yang sebelumnya ditopang oleh emiten keuangan, bergeser menjadi emiten nonkeuangan (Grafik B1.1.1). Pergeseran ini perlu diwaspadai terutama karena mayoritas emiten

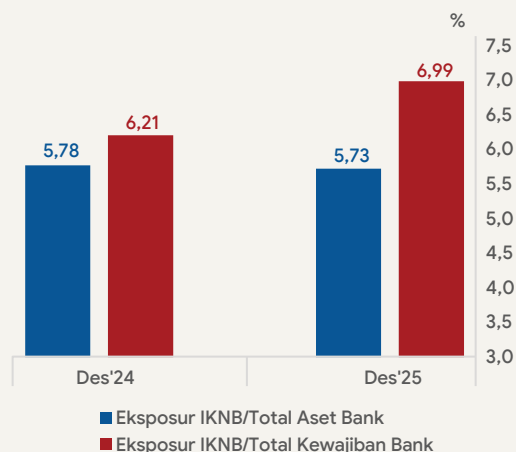


Sumber: Bloomberg, diolah. Data per 27 Sept 2025

Grafik B1.1.1. Pangsa Top 10 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Tertinggi Berdasarkan Negara

dengan kapitalisasi pasar yang besar merupakan grup konglomerasi dengan indikasi overvaluasi dan memiliki *free float* yang terbatas. Ketika timbul *external shock*, kondisi tersebut dapat menjadi sumber risiko bagi sistem keuangan.

Meski demikian, risiko *sovereign*—Bank Nexus dan IKNB terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia masih terbatas. Hal ini terindikasi dari masih terbatasnya kepemilikan SBN oleh IKNB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

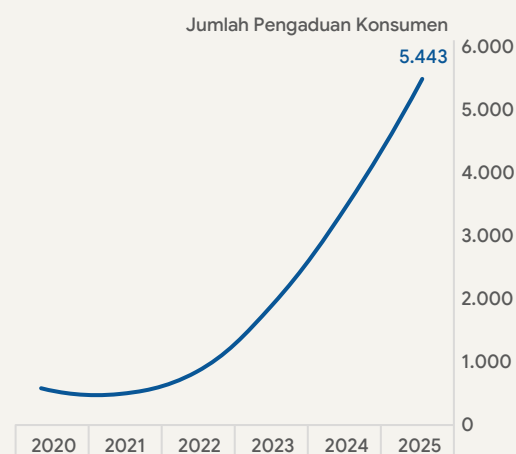
Grafik B1.1.2. Aset dan Kewajiban IKNB Terhadap Bank

dan stabilnya kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Interkoneksi antara bank dan IKNB juga berada dalam level yang rendah, tercermin dari tingkat aset dan kewajiban perbankan terhadap IKNB cenderung terbatas di kisaran 6% dari total aset dan kewajiban bank (Grafik B1.1.2). Dengan demikian, risiko rambatan akibat *shock* yang timbul dari IKNB diperkirakan terbatas terhadap stabilitas sistem keuangan.

Boks 1.2

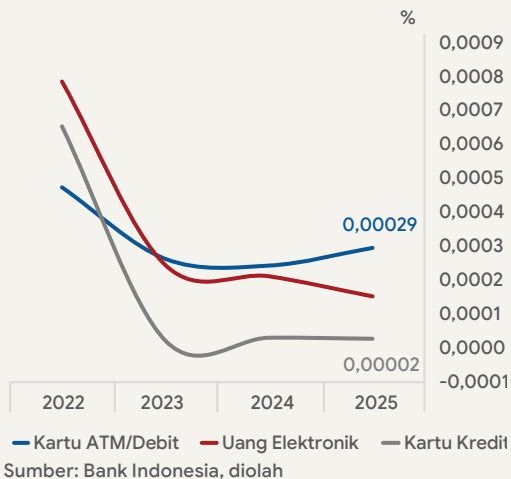
Risiko *Fraud* pada Transaksi Aset Kripto

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan, dinamika risiko turut meningkat, termasuk risiko *fraud*. Berdasarkan data pengaduan konsumen Bank Indonesia (Grafik B1.2.1), dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah aduan nasabah terkait dugaan *fraud* pada layanan sistem pembayaran. Meski demikian, melalui sinergi penguatan perlindungan konsumen yang melibatkan regulator, *self-regulatory organization*, pelaku industri, serta pemangku kepentingan terkait, tingkat *fraud* pada industri sistem pembayaran ritel secara umum masih berada dalam batas yang terkendali (Grafik B1.2.2).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B1.2.1. Tren Pengaduan Konsumen Terkait *Fraud*

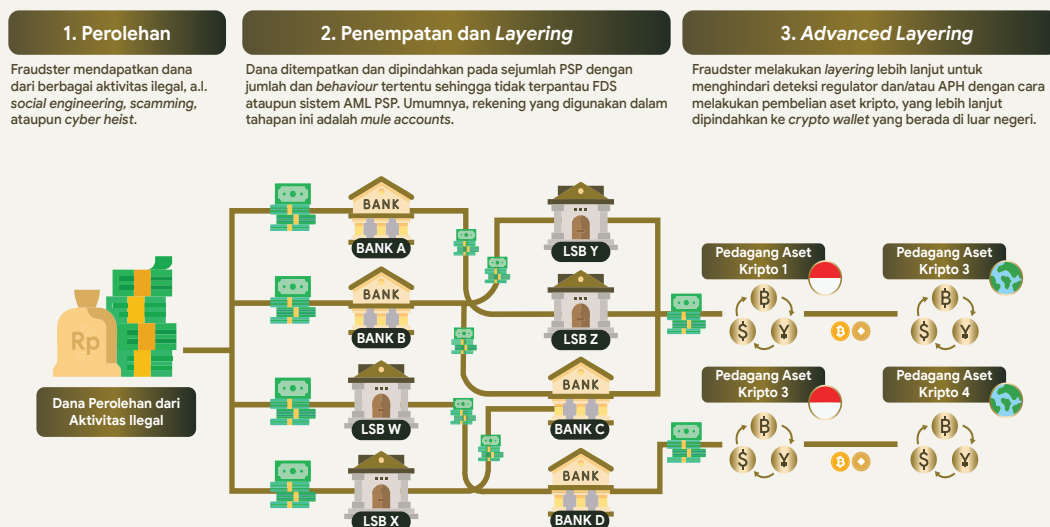


Grafik B1.2.2. Tren Rasio Frekuensi Fraud terhadap Volume Transaksi

Inovasi teknologi memunculkan modus aktivitas ilegal yang semakin kompleks sehingga mitigasi risiko perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pengawasan menunjukkan pola pengaliran dana hasil aktivitas ilegal yang lebih terstruktur dan berlapis, meliputi tahapan perolehan dana, penempatan dan *layering*, hingga *advanced layering* (Gambar B1.2.1). Pada tahap awal, pelaku memperoleh dana dari aktivitas ilegal, misalnya penipuan dan *cyber heist*. Di tahap berikutnya, pelaku mengalirkannya melalui berbagai rekening di bank maupun lembaga

selain bank dengan pola nominal dan frekuensi yang acak untuk menghindari pemantauan *Fraud Detection System* dan rezim *Anti-Money Laundering* yang telah diimplementasikan Penyedia Sistem Pembayaran (PSP), termasuk melalui pemanfaatan rekening *money mule* untuk memutus keterkaitan dengan identitas asli pelaku.

Pada tahap *advanced layering*, pelaku memanfaatkan aset kripto untuk memindahkan aset ke luar yurisdiksi. Pembelian aset kripto awalnya dilakukan melalui *exchanger* domestik kemudian dipindahkan ke dompet kripto di luar yurisdiksi. Alur tersebut membatasi visibilitas transaksi secara *end-to-end* dan menyulitkan penelusuran oleh pengawas, terutama pada transaksi lintas batas. Karakteristik aset kripto yang bersifat *cross-border* dan bersifat *pseudonymous* membuat identifikasi pengguna, penelusuran aliran dana, dan penetapan *beneficial owner* menjadi lebih kompleks dibandingkan transaksi sistem pembayaran konvensional. Kondisi ini menjadi sumber kerentanan bagi sistem keuangan domestik, terutama apabila tidak diimbangi dengan penguatan kerangka regulasi, pengawasan lintas yurisdiksi, serta kapasitas otoritas dalam melakukan pemantauan aktivitas aset kripto yang berisiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar B1.2.1. Tahapan Umum Pelarian Dana Aktivitas Ilegal

Strategi mitigasi difokuskan pada penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber bagi lembaga jasa keuangan dan penerapan prosedur *Know Your Customer* secara ketat di seluruh ekosistem jasa keuangan, termasuk industri aset kripto. Upaya ini didukung penguatan

koordinasi lintas otoritas serta kerja sama kebijakan di tingkat regional dan internasional untuk mencegah pemanfaatan aset kripto sebagai sarana pengaburan dana hasil aktivitas ilegal, termasuk melalui penguatan mekanisme pertukaran informasi lintas yurisdiksi.

Boks 1.3

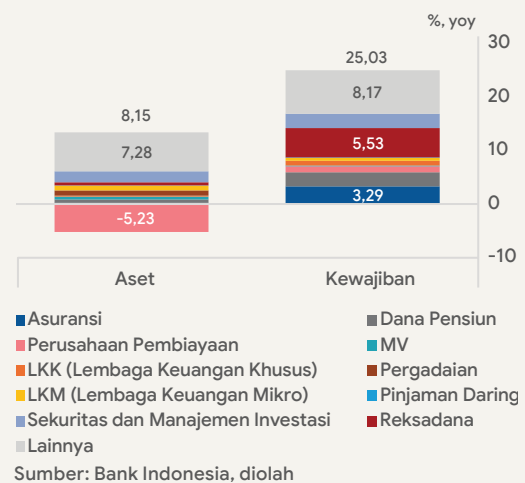
Risiko IKNB Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Sektor IKNB tumbuh signifikan sejalan meningkatnya interkoneksi dengan perbankan. Financial Stability Board (FSB) dalam *Global Monitoring Report on Nonbank Financial Intermediation* (2025) melaporkan ekspansi/pertumbuhan sektor nonbank hingga 2024 sebesar 9,4%, 2 kali lebih besar dibanding perbankan. Porsi aset IKNB global mencapai 51% terhadap aset keuangan global. Sedangkan di domestik, aset IKNB hanya sekitar 21% terhadap aset keuangan. Meskipun demikian, perkembangan kontribusi IKNB terhadap pembiayaan perekonomian berimplikasi pada interkoneksi antara perbankan dan IKNB yang meningkat dan perlu dipantau karena dapat menjadi salah satu sumber kerentanan bagi sistem keuangan.

IKNB berpotensi menjadi sumber risiko sistemik bagi stabilitas sistem keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks risiko sistemik, dimensi *cross-section* yang berkaitan dengan interkoneksi antar lembaga keuangan berpotensi menjadi jalur transmisi risiko sehingga pengukuran interkoneksi dapat menjadi indikator *potential contagion*. Interkoneksi dan *contagion* dapat muncul karena adanya keterkaitan (*linkage*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank dan IKNB dapat memiliki keterkaitan secara langsung melalui berbagai *channel*, termasuk melalui simpanan dan pinjaman. Di sisi lain, keterkaitan tidak langsung dapat berasal dari eksposur terhadap suatu aset. Survei FSB mengindikasikan terdapat 3 bentuk utama keterkaitan antara bank dan IKNB yaitu (1) penempatan IKNB di bank berupa simpanan; (2) pinjaman, repo, dan eksposur kredit lain dari bank

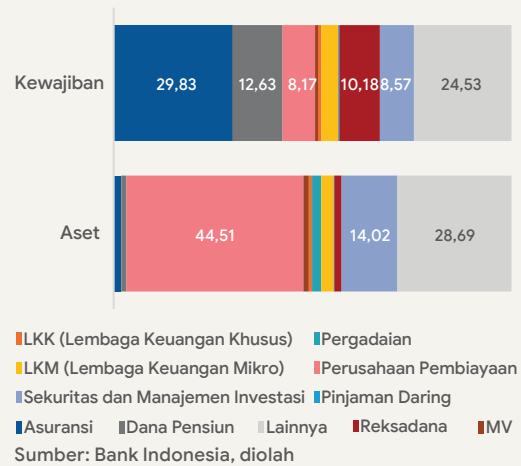
kepada IKNB; dan (3) kepemilikan surat berharga yang diterbitkan bank oleh *investment funds*, lembaga asuransi, dan dana pensiun.

Eksposur perbankan terhadap IKNB mengalami peningkatan baik dari sisi aset maupun kewajiban, namun masih relatif terbatas. Dari asesmen FSB, interkoneksi antara bank dan nonbank di sejumlah negara menunjukkan bahwa eksposur perbankan terhadap IKNB paling tinggi adalah sebesar 11,3% dari aset perbankan dengan eksposur terbesar salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Eksposur bank kepada IKNB terutama melalui pinjaman dan *debt securities*, sedangkan klaim IKNB kepada bank terkonsentrasi pada simpanan dan *debt instruments*. Di Indonesia, interkoneksi perbankan dengan IKNB melalui aset dan kewajiban perbankan kepada IKNB dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan



Grafik B1.3.1. Perubahan Kontribusi Interkoneksi Bank-IKNB

sebesar 8,15% dan 25,03% (yoy) (Grafik B1.3.1). Namun demikian, interkoneksi tersebut masih relatif terbatas, tercermin dari pangsa aset dan kewajiban perbankan kepada IKNB terhadap total aset & kewajiban perbankan yang berada pada kisaran 6%. Identifikasi kewajiban perbankan terbesar kepada IKNB adalah melalui penempatan (DPK) oleh lembaga perasuransian. Dalam hal ini, penempatan dana lembaga perasuransian pada sisi kewajiban perbankan menjadi kontributor utama peningkatan interkoneksi. Di sisi aset, aset perbankan terbesar adalah kepada Perusahaan Pembiayaan (PP) melalui pemberian kredit (Grafik B1.3.2).



Grafik B1.3.2. Interkoneksi Bank-IKNB Berdasarkan Aset dan Kewajiban

Bab 2

PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN TERUS DITINGKATKAN

Pertumbuhan intermediasi keuangan utamanya didukung oleh pertumbuhan kredit investasi di segmen korporasi pada sektor-sektor terkait program prioritas Pemerintah yaitu sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Pengangkutan, Pertambangan, dan Konstruksi. Di sisi lain, pertumbuhan kredit modal kerja melambat sejalan dengan kecenderungan korporasi menahan ekspansi usaha dan optimalisasi penggunaan dana internal untuk membiayai kebutuhan operasional. Pertumbuhan kredit konsumsi di segmen Rumah Tangga (RT) juga melambat seiring perilaku berhati-hati bank untuk menjaga kualitas kredit konsumsi di tengah masih terbatasnya daya beli RT kelas menengah bawah. Program stimulus sektor Perumahan dari Pemerintah serta dukungan KLM Bank Indonesia membantu pertumbuhan kredit konsumsi tetap terjaga positif. Dari sisi nonbank, pertumbuhan pembiayaan dikontribusikan oleh Pegadaian sejalan dengan preferensi RT kelas atas untuk berinvestasi emas di tengah tren apresiasi harga emas dan melakukan pinjaman daring (pindar) karena kemudahan akses pembiayaan digital.

Kapasitas intermediasi bank membaik ditopang oleh akselerasi pertumbuhan DPK di seluruh kelompok bank. Selain dana nasabah, pertumbuhan DPK terakselerasi oleh penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah yang mendorong bank penerima untuk mengurangi dana mahal (deposito special rate). Penurunan suku bunga DPK pada bank penerima SAL berdampak pada perpindahan dana dari bank dimaksud ke kelompok bank lainnya sehingga terjadi pemerataan funding surplus di seluruh kelompok bank. Funding surplus meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan

sehingga memberi ruang untuk ekspansi penyaluran kredit lebih tinggi di 2026. Perbaikan kapasitas intermediasi bank juga didukung pelonggaran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia, terutama penguatan KLM berupa kenaikan besaran insentif menjadi 5.5%, berorientasi kedepan, dan memperhitungkan akselerasi penurunan suku bunga kredit bank (interest rate channel) dan pencapaian jumlah kredit (lending channel).

Penyaluran kredit bank perlu terus didorong melalui strategi realokasi aset dan penguatan transmisi penurunan suku bunga. Kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki preferensi untuk menyalurkan kredit dengan mengurangi alat likuid, sedangkan kelompok bank non-BUMN cenderung menjaga likuiditas yang tinggi. Rasio alat likuid terhadap kredit bank non-BUMN yang lebih tinggi dibandingkan bank BUMN menunjukkan bahwa ruang untuk realokasi alat likuid pada penyaluran kredit ke depan masih besar. Selain itu, penyaluran kredit juga perlu didorong melalui penguatan transmisi penurunan suku bunga di tengah minat penyaluran kredit perbankan yang lebih berhati-hati

Intermediasi keuangan yang terjaga didukung oleh kinerja positif korporasi di tengah kinerja RT yang masih terbatas. Pertumbuhan penjualan pada korporasi utamanya ditopang oleh sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Likuiditas korporasi juga kuat dengan ekspansi usaha yang lebih berhati-hati dan penerbitan obligasi untuk kebutuhan pembiayaan di tengah tren penurunan yield obligasi korporasi sehingga mendorong preferensi penggunaan

dana internal. Sementara, sektor RT mencatatkan pertumbuhan konsumsi di tengah perlambatan indeks penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja, serta porsi pekerja informal yang masih besar. Daya

beli dan repayment capacity yang terbatas pada kelas menengah bawah menjadi perhatian utama dalam mendorong permintaan dan akses untuk mendapatkan kredit konsumsi RT.

2.1

Kebijakan Makroprudensial: Respons Kebijakan Mendorong Intermediasi dengan Tetap Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Pertumbuhan kredit 2025 terjaga dan perlu terus ditingkatkan sesuai kapasitas optimalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pertumbuhan kredit sejalan dengan berlanjutnya pelonggaran suku bunga kebijakan, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang akomodatif, dan realisasi program prioritas Pemerintah. Kredit tumbuh sebesar 9,69% pada 2025, sedikit melambat dari 10,39% pada 2024. Pertumbuhan kredit ditopang oleh segmen korporasi dan kredit investasi. Sektor terkait sumber daya alam dan sumber daya energi yang bersifat *capital intensive* seperti Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Pengangkutan, mendorong pertumbuhan kredit investasi. Implementasi program

Pemerintah jangka panjang seperti Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong pertumbuhan kredit investasi di sektor Pertanian dan Konstruksi. Di sisi lain, kredit modal kerja dan kredit konsumsi dengan pangsa pasar sekitar 69% dari total kredit perbankan masih perlu didorong agar tumbuh lebih tinggi. Pelemahan pertumbuhan kredit modal kerja terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan di sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Jasa Dunia Usaha. Perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja turut disumbang oleh kontraksi kredit UMKM sebesar 0,30% (Tabel 2.1.1). Sementara perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi terutama

Tabel 2.1.1. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Segmen, Penggunaan dan Sektor Ekonomi

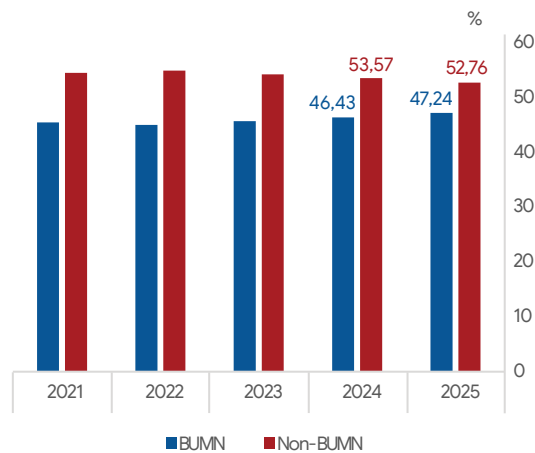
		Pertumbuhan Kredit (% , yoy)					Kontribusi Pertumbuhan Kredit Des 25 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
Segmen	Kredit Konsumsi	4,67	9,42	9,10	10,61	6,58	1,80
	Kredit Komersial	-6,04	2,11	7,99	5,82	4,22	0,55
	Kredit Korporasi	7,22	17,34	13,52	15,59	18,33	7,41
	UMKM	12,19	10,47	8,03	3,37	-0,30	-0,06
Penggunaan	Kredit Investasi	4,01	12,00	12,26	13,62	21,06	5,87
	Kredit Konsumsi	4,67	9,42	9,10	10,61	6,58	1,80
	Kredit Modal Kerja	6,32	12,17	10,05	8,35	4,52	2,02
Sektor Ekonomi	A. Pertanian	8,11	10,10	8,45	4,84	14,20	0,99
	B. Pertambangan	23,42	54,35	22,36	28,59	7,17	0,34
	C. Industri Pengolahan	6,43	12,19	4,72	9,56	5,95	0,93
	D. Listrik Gas Air	-5,44	1,64	13,33	19,75	35,15	0,99
	E. Konstruksi	1,04	4,26	-0,37	0,02	27,85	1,41
	F. Perdagangan	3,48	6,61	8,77	4,27	4,04	0,68
	G. Pengangkutan	15,05	2,22	19,28	19,16	11,77	0,67
	H. Jasa Dunia Usaha	2,89	26,60	16,98	13,09	10,30	1,08
	I. Jasa Sosial	6,74	18,23	35,06	21,15	18,53	0,81
	J. Lain - lain	4,38	9,55	9,10	10,61	6,58	1,80
Industri		5,24	11,35	10,38	10,39	9,69	9,69

Sumber: Bank Indonesia, diolah

dikontribusikan oleh pelemahan segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi sejalan dengan sikap kehati-hatian bank dalam upaya memperbaiki kualitas kredit UMKM dan kredit konsumsi.

Bank BUMN menjadi penopang utama pertumbuhan kredit 2025. Kontribusi bank BUMN³ terhadap pertumbuhan kredit semakin meningkat sebagaimana tercermin dari kenaikan pangsa kredit bank BUMN dari 46,43% pada Desember 2024 menjadi 47,24% pada Desember 2025 (Grafik 2.1.1). Likuiditas tambahan dari penempatan dana SAL Pemerintah turut mendorong penyaluran kredit bank BUMN terutama pada korporasi besar, termasuk korporasi BUMN. Bank BUMN juga mengakuisisi debitur korporasi bank non-BUMN dengan menawarkan suku bunga kredit yang lebih kompetitif. Strategi penyaluran kredit dengan mengakuisisi debitur bank lain berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit bank non-BUMN. Pada triwulan IV 2025, kredit bank BUMN tumbuh mencapai 11,61% (yoy), sementara kredit kelompok bank non-BUMN hanya tumbuh sebesar 8,03% (yoy).

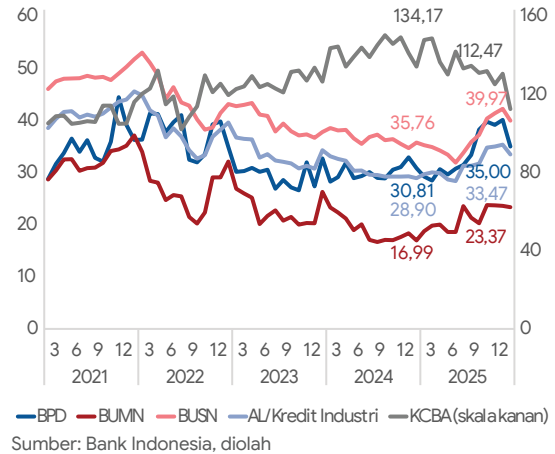
Perbedaan pertumbuhan kredit antara bank BUMN dan non-BUMN turut disebabkan oleh perbedaan preferensi terkait penyaluran kredit dan penempatan surat berharga. Peningkatan kontribusi bank BUMN dalam pertumbuhan kredit sejalan dengan rasio alat likuid terhadap kredit bank BUMN yang menurun dan paling rendah dibandingkan kelompok bank lainnya (Grafik 2.1.2). Hal ini mengindikasikan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.1. Pangsa Kredit Bank BUMN dan Non-BUMN

3 Bank BUMN terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Unit usaha syariah BTN telah *spin-off* menjadi BUSN dan BSI digolongkan sebagai BUSN

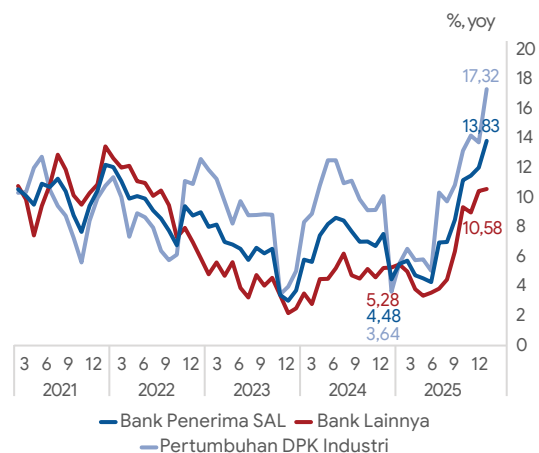


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.2. Perkembangan Rasio Alat Likuid/Kredit Berdasarkan Kelompok Bank

preferensi bank BUMN untuk mendorong penyaluran kredit dengan mengurangi alat likuid. Sementara rasio alat likuid terhadap kredit pada kelompok bank lainnya yang lebih tinggi menunjukkan kehati-hatian yang lebih dalam penyaluran kredit dan kecenderungan untuk menjaga likuiditas yang tinggi. Perilaku berhati-hati ini turut berdampak pada penurunan kontribusi pertumbuhan kredit kelompok bank non-BUMN.

Kapasitas intermediasi membaik ditopang oleh sinergi pelonggaran kebijakan likuiditas Bank Indonesia, stimulus fiskal untuk kebutuhan pembayaran proyek dan belanja Pemerintah, dan penempatan dana SAL Pemerintah. Pertumbuhan DPK perbankan meningkat menjadi 13,83% pada Desember 2025 dari 4,48% pada Desember 2024 (Grafik 2.1.3). Sejalan dengan ini, pertumbuhan DPK terutama dikonstruksikan oleh golongan Pemerintah non-BUMN. Kenaikan pertumbuhan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.3. Pertumbuhan DPK Berdasarkan Bank Penerima SAL dan Bank Lainnya

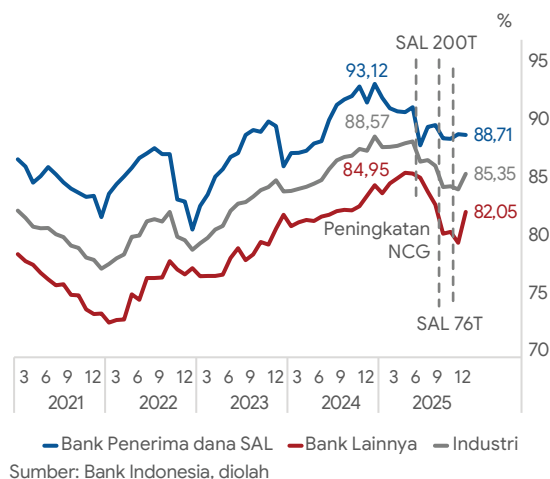
DPK juga berkontribusi oleh golongan korporasi swasta non-IKNB seiring kenaikan kas korporasi (Tabel 2.1.2). Dalam kondisi ini, penempatan dana SAL Pemerintah mendorong bank penerima untuk mengurangi dana mahal (*deposito special rate*) sehingga terjadi perpindahan dana ke kelompok bank lainnya dan berdampak pada pemerataan *funding surplus* di seluruh kelompok bank. Selanjutnya, *funding surplus* meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan yang tercermin pada penurunan LDR dari 88,57% pada Desember 2024 menjadi 85,35% pada Desember 2025 (Grafik 2.1.4). Dengan meningkatnya kapasitas intermediasi perbankan, maka ruang untuk ekspansi penyaluran kredit perbankan menjadi lebih besar di 2026.

Meskipun kapasitas intermediasi perbankan meningkat, transmisi penurunan suku bunga DPK dan kredit masih perlu terus didorong untuk akselerasi kredit. Penurunan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025 masih berdampak terbatas pada penurunan suku bunga DPK perbankan sebesar 37 bps, dari 3,08% pada Desember 2024 menjadi 2,71% pada Desember 2025. Penurunan suku bunga DPK terutama berkontribusi oleh penurunan suku bunga DPK *special rate* sebesar 123 bps, dari 6,19% pada Desember 2024 menjadi 4,96% pada Desember

Tabel 2.1.2. Perkembangan DPK berdasarkan Golongan Pemilik

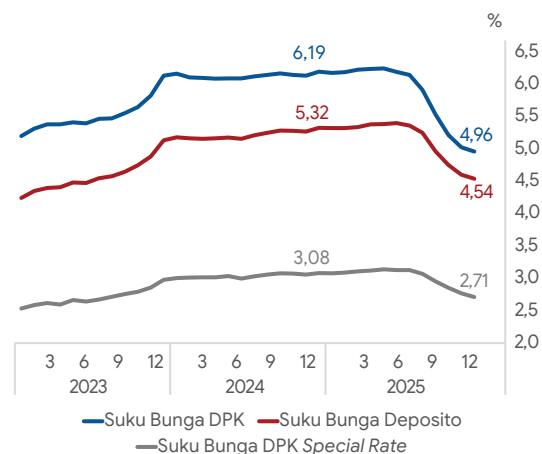
Golongan Pemilik	Pangsa DPK (%) 2025	Pertumbuhan DPK (% yoy)		Kontribusi DPK (%)	
		2024	2025	2024	2025
Bukan Penduduk	1,11	16,98	13,71	0,17	0,15
Pemerintah BUMN	7,28	(1,94)	24,46	(0,14)	1,63
Pemerintah Non BUMN	7,44	4,53	80,35	0,21	3,77
Perseorangan	40,18	(2,19)	2,73	(1,04)	1,21
Swasta IKNB	5,52	35,05	31,04	1,30	1,49
Swasta Non IKNB	38,47	11,07	14,57	3,98	5,57
Total	100,00	4,48	13,83	4,48	13,83

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Grafik 2.1.4. Perkembangan Loan to Deposit Ratio

2025, di tengah likuiditas perbankan yang longgar (Grafik 2.1.5). Transmisi penurunan ke suku bunga kredit juga masih terbatas, yaitu sebesar 38 bps, dari 9,20% pada Desember 2024 menjadi 8,81% pada Desember 2025. Penurunan suku bunga kredit yang terbatas terutama pada segmen kredit UMKM dan kredit konsumsi. Secara tahunan, suku bunga kredit UMKM hanya turun sebesar 24 bps, sementara suku bunga kredit konsumsi masih



Grafik 2.1.5. Perkembangan Suku Bunga DPK Rupiah

mengalami peningkatan sebesar 11 bps (Tabel 2.1.3). Risiko kredit konsumsi dan kredit UMKM yang meningkat mendorong peningkatan premi risiko di kedua segmen sehingga memperlambat transmisi penurunan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga

kredit perbankan diharapkan berlanjut lebih besar di 2026 seiring berlakunya KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (KLM *Forward Looking*) melalui *interest rate channel* sejak Desember 2025.

Tabel 2.1.3. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rupiah

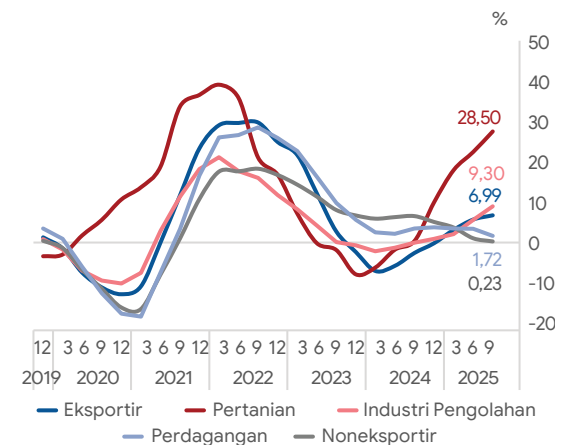
	SB Kredit Rp (%)	2023	2024	2025				Δ Des 2025-2024
		Des	Des	Mar	Jun	Sep	Des	
	BI Rate	6	6	5,75	5,5	4,75	4,75	-1,25
	Suku Bunga Agregat	9,25	9,20	9,19	9,16	9,05	8,81	-0,38
Jenis Penggunaan	Kredit Investasi	8,81	8,71	8,58	8,49	8,25	8,06	-0,65
	Kredit Konsumsi	10,13	10,36	10,37	10,42	10,48	10,47	0,11
	Kredit Modal Kerja	8,86	8,62	8,66	8,62	8,46	8,07	-0,55
Segmen	Kredit Konsumsi	10,13	10,36	10,37	10,42	10,48	10,47	0,11
	Kredit Komersial	8,30	8,25	8,20	8,21	8,11	7,93	-0,32
	Kredit Korporasi	7,41	7,33	7,33	7,29	7,01	6,71	-0,63
	Kredit UMKM	11,00	10,79	10,80	10,76	10,67	10,56	-0,24
Kelompok Bank	BPD	9,94	9,88	9,87	9,88	9,88	9,77	-0,12
	BUMN	9,15	8,93	8,96	8,90	8,72	8,45	-0,48
	BUSN	9,27	9,35	9,30	9,29	9,26	9,03	-0,32
	KCBA	7,39	8,28	8,54	8,63	8,21	7,90	-0,38

Sumber: Bank Indonesia, diolah

2.2

Sisi Permintaan: Permintaan Pembiayaan Perbankan Terjaga Namun Belum Merata

Permintaan kredit perbankan tumbuh ditopang kinerja korporasi yang secara umum masih terjaga, terutama sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Penjualan korporasi tercatat tumbuh sebesar 4,67% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkat dari capaian pada akhir 2024 yang tumbuh sebesar 1,60% (yoy) (Tabel 2.2.1). Kinerja positif ini ditopang oleh penjualan korporasi eksportir (Grafik 2.2.1), terutama dari sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan positif harga *Crude Palm Oil* dan produk turunannya (Grafik 2.2.2). Selain itu, implementasi program strategis Pemerintah seperti MBG dan KDKMP turut menopang kinerja noneksportir di kedua sektor tersebut sehingga menjaga optimisme korporasi di tengah ketidakpastian global. Optimisme ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang tetap positif dan diperkirakan masih berada di zona optimis sampai dengan akhir 2025 (Grafik



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 2.2.1. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Orientasi Penjualan pada Sektor Pertanian dan Perdagangan

Tabel 2.2.1. Perkembangan Penjualan, Profitabilitas dan Capex Korporasi Menurut Sektor

Sektor	Pertumbuhan Penjualan (%yoy)					Kontribusi Penjualan (%)	Tren 4Y	Return on Equity (%)					Tren 4Y	Pertumbuhan Capex (% yoy)					Kontribusi Capex (%)	Tren 4Y
	2021	2022	2023	2024	2025			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025		
	Des	Des	Des	Des	Sep			Des	Des	Des	Des	Sep		Des	Des	Des	Des	Sep		
Pertanian	37,89	17,38	-8,19	10,32	28,50	1,45		9,88	15,29	6,60	9,74	13,49		-10,32	33,52	16,64	-11,31	1,65	0,07	
Pertambangan	44,94	67,89	-5,66	-4,60	-4,94	-0,87		22,62	36,53	20,20	15,90	10,18		22,64	60,26	35,40	16,60	21,88	6,57	
Industri Pengolahan	18,87	12,15	-0,72	0,90	9,30	3,60		8,56	9,40	9,15	8,11	11,00		2,46	13,97	23,39	17,30	1,40	0,35	
Listrik Gas Air	4,47	18,51	7,43	5,51	4,73	0,10		9,41	9,49	8,68	9,03	8,13		7,15	-39,40	23,90	41,45	51,44	0,82	
Konstruksi	8,99	15,17	10,71	1,00	-7,88	-0,43		1,97	1,99	1,51	5,95	1,41		60,81	-38,07	19,94	-12,26	-8,56	-0,41	
Perdagangan	17,17	26,81	5,77	3,90	1,72	0,28		10,93	18,85	15,42	14,11	12,02		-11,67	58,45	68,08	-15,46	-6,29	-0,54	
Pengangkutan	5,07	20,52	8,44	6,49	2,27	0,21		-15,78	39,25	15,63	12,74	10,09		-3,59	12,99	0,16	-12,88	-6,88	-1,51	
Jasa Dunia Usaha	19,61	26,52	4,46	2,16	6,37	0,19		0,66	7,30	2,36	2,93	7,49		-23,71	17,19	9,61	4,22	74,80	0,86	
Jasa Sosial	19,35	-2,71	-8,88	7,08	8,43	0,19		9,15	5,59	-0,10	5,23	8,36		-13,08	19,17	7,84	-9,47	-28,65	-0,91	
Grand Total	20,22	23,30	0,34	1,60	4,67	4,67		7,75	15,72	10,24	9,84	9,24		4,74	16,75	21,10	2,94	5,31	5,31	

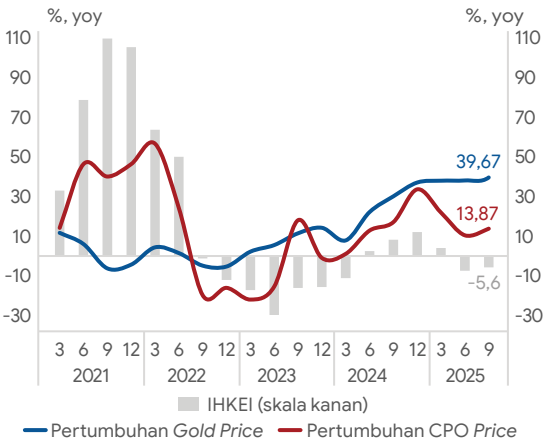
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

2.2.3). Di sisi lain, penjualan sektor Pertambangan masih terkontraksi akibat tekanan harga komoditas ekspor sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia negatif, kendati harga emas tumbuh signifikan.

Profitabilitas korporasi tetap terjaga baik sampai dengan triwulan III 2025. Hal ini tercermin dari pencapaian ROE sebesar 9,24% (Tabel 2.2.1) dan pertumbuhan belanja modal (*Capital Expenditure/ capex*) sebesar 5,13% (yoy), terutama didukung sektor Pertambangan yang mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan *capex* sektor Pertambangan di tengah tekanan penjualan mengindikasikan upaya korporasi memelihara kapasitas produksi saat ini

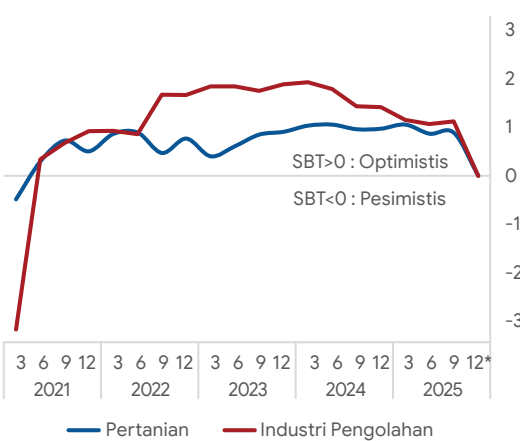
dan antisipasi peningkatan permintaan di masa mendatang, sejalan dengan ekspektasi peningkatan harga komoditas dalam jangka menengah. Di luar sektor Pertambangan, korporasi cenderung masih *wait-and-see* dalam merealisasikan belanja modal jangka panjang.

Kinerja penjualan korporasi berorientasi ekspor melanjutkan pertumbuhan, namun terbatas di tengah hambatan perdagangan yang menekan margin keuntungan. Pada triwulan III 2025, korporasi eksportir tercatat mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 6,99% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan korporasi secara umum sebesar 4,67% (yoy) (Grafik 2.2.4). *Net Profit Margin*



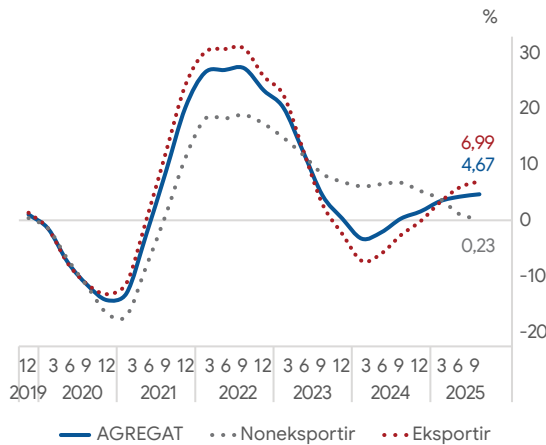
Sumber: CEIC dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.2. Perkembangan Harga Emas dan CPO serta Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.3. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Orientasi Penjualan pada Sektor Pertanian dan Perdagangan

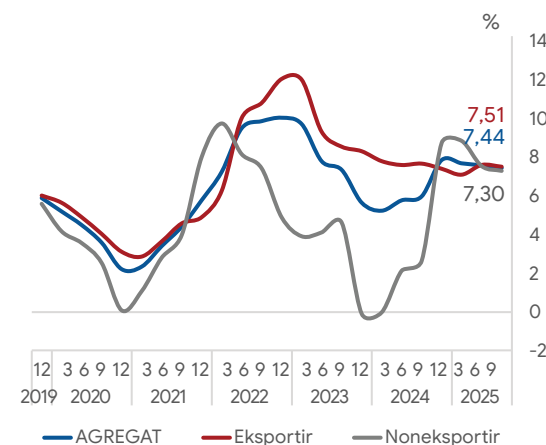


Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 2.2.4. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Agregat dan Berdasarkan Orientasi Penjualan

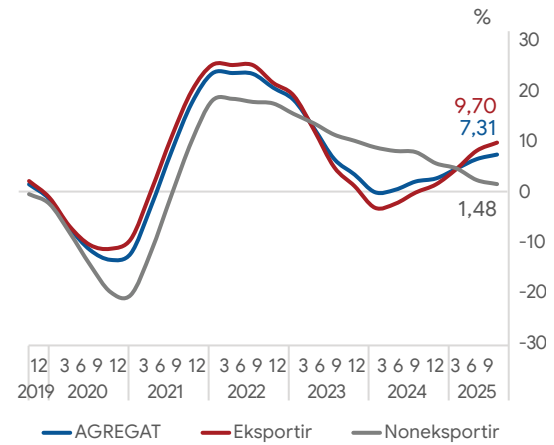
(NPM) korporasi eksportir tercatat turun ke 7,51%, namun masih di atas NPM agregat sebesar 7,44%, dan NPM korporasi noneksportir sebesar 7,30% (Grafik 2.2.5). Profitabilitas (NPM) korporasi eksportir menurun terutama disebabkan oleh harga bahan baku yang meningkat sebesar 9,70% pada triwulan III 2025 (Grafik 2.2.6). Ke depan, pemberlakuan tarif dan hambatan nontarif terhadap produk ekspor Indonesia serta tambahan biaya distribusi akibat ketegangan geopolitik berpotensi meningkatkan biaya ekspor sehingga menekan margin keuntungan eksportir.

Kebutuhan pembiayaan korporasi masih mengandalkan dana internal, didukung posisi likuiditas yang kuat guna menjaga struktur pendanaan yang seimbang serta mengelola risiko kredit dan pasar. Pada triwulan III 2025,



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

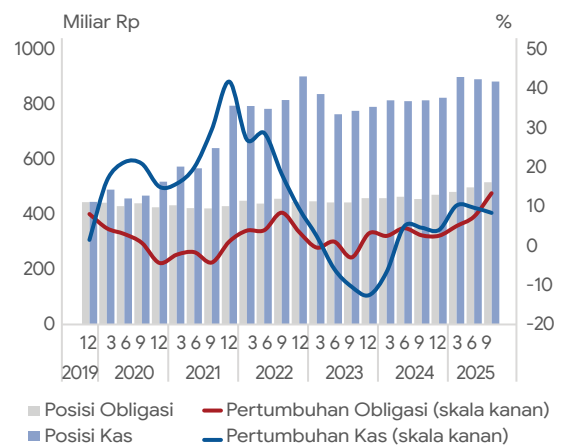
Grafik 2.2.5. Margin Keuntungan Bersih Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 2.2.6. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Agregat dan Berdasarkan Orientasi Penjualan

porsi dana internal masih mendominasi struktur pembiayaan korporasi, yaitu 64,5% (Tabel 2.2.2). Selain mengandalkan dana internal, pada periode ini korporasi terpantau meningkatkan penerbitan obligasi yang tumbuh sebesar 13,37% (yoy). Korporasi yang menerbitkan obligasi utamanya adalah emiten dengan ukuran aset besar yang dapat mengakses sumber pembiayaan obligasi dengan *effective yield* sebesar 6,82% p.a. (rerata INDOBeX korporasi triwulan III 2025) yang lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit investasi sebesar 8,25% p.a. pada periode yang sama. Sejalan dengan ekspansi usaha yang lebih berhati-hati dan penerbitan obligasi, kas korporasi tercatat tumbuh sebesar 8,40% (yoy) pada periode ini. Pertumbuhan kas yang positif ini melanjutkan tren pertumbuhan yang telah berlangsung sejak awal 2024 (Grafik 2.2.7). Kondisi



Sumber: KSEI, Bloomberg, Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.7. Posisi Kas dan Pembiayaan Obligasi Korporasi

Tabel 2.2.2. Perkembangan Porsi Pembiayaan Internal dan Kredit Bank dalam Struktur Pembiayaan Korporasi

SEKTOR	KOMPONEN	2023	2024	Sep-2025	TREN 6Y
AGREGAT (n=551 korporasi)	Total Capital (Rp triliun)	4.729,59	4.981,61	5.338,03	
	Internal Financing (% Capital)	63,3	64,4	64,5	
	Debt (% Capital)	36,7	35,6	35,5	
	of which Bank Debt (% Capital)	18,6	18,5	19,5	
	Cash & ST Investments (% Capital)	15,4	15,7	15,7	

Sumber: Bloomberg, S&P Capital IQ dan Bursa Efek Indonesia, diolah

ini merupakan cerminan bahwa posisi likuiditas korporasi relatif kuat sehingga menambah ruang fleksibilitas dalam merespons dinamika ekonomi maupun mendukung ekspansi usaha ke depan.

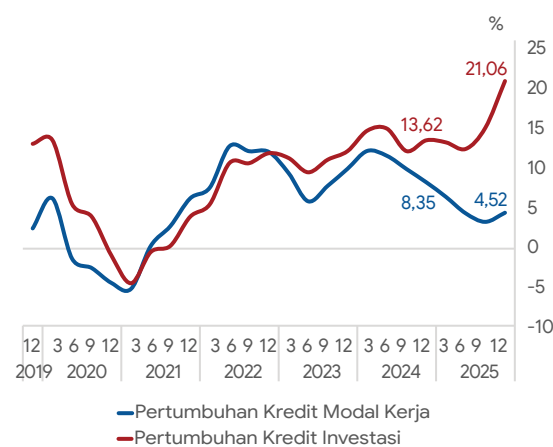
Permintaan korporasi terhadap kredit investasi meningkat, namun permintaan terhadap kredit modal kerja melambat. Pertumbuhan kredit investasi tinggi sejalan dengan realisasi kontrak dan komitmen investasi saat ini serta adanya dampak rambatan positif realisasi program jangka panjang Pemerintah (Tabel 2.2.3). Pertumbuhan kredit investasi tercatat akseleratif dari 13,62% (yoy) pada akhir 2024 menjadi 21,06% (yoy) pada akhir 2025,

utamanya didukung oleh korporasi dengan aset besar. Di sisi lain, korporasi menahan pemanfaatan kredit modal kerja sejalan dengan sikap berhati-hati dalam ekspansi usaha mempertimbangkan tingkat penjualan yang relatif stagnan di tengah kondisi ketidakpastian global dan daya beli masyarakat yang masih terbatas. Pertumbuhan kredit modal kerja melambat dari 8,35% (yoy) pada akhir 2024 menjadi 4,52% (yoy) pada akhir 2025 (Grafik 2.2.8). Sikap berhati-hati korporasi ini tercermin dari tingkat keyakinan korporasi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospek ke depan yang cenderung menurun, diindikasikan oleh indeks ekspektasi kegiatan usaha (*business confidence index*) yang masih di bawah 100 dan kenaikan tekanan pada rantai pasok global (*global supply chain pressure index/GSCPI*) (Grafik 2.2.9). Ke depan, beberapa tantangan dapat memengaruhi kinerja korporasi dan permintaan pembiayaan, antara lain ketidakpastian global yang masih tinggi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang masih terbatas.

Tabel 2.2.3. Pemetaan Upside Potential Program Pemerintah terhadap Permintaan Kredit Sektoral Korporasi pada 2025

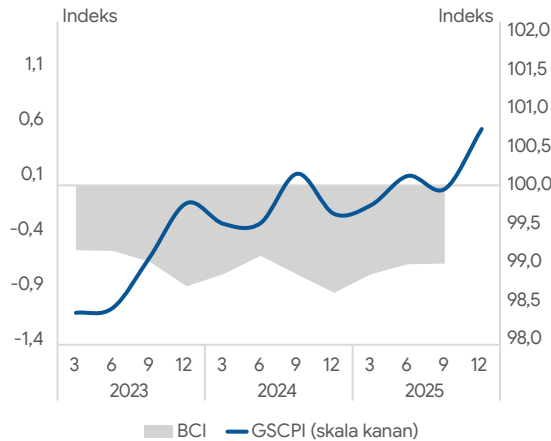
Sektor	Upside Potential (Program Pemerintah, Insentif, PSN)	
Pertanian	KDKMP	Bulog dan Cadangan Pangan
	MBG	Lumbung Pangan
	Kampung Nelayan	
Pertambangan	Hilirisasi	Ketahanan Energi
Industri	MBG	Sekolah Rakyat
	Rehabilitasi Sekolah	Cek Kesehatan Gratis
Listrik, Gas, dan Air	Proyek Strategis Kelistrikan	
	Proyek EBT	
Konstruksi	Perumahan	Sekolah Rakyat
	Rehabilitasi Sekolah	Bendung dan Irigasi
	Preservasi Jalan	
Perdagangan	KDKMP	Sembako
	MBG	TPG/TPD
Pengangkutan	Insentif PPN-DTP Tiket	
Jasa Dunia Usaha	Hilirisasi	Ketahanan Energi
	MBG	
Jasa Sosial	Cek Kesehatan Gratis	
	JKN	PIP/KIP

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

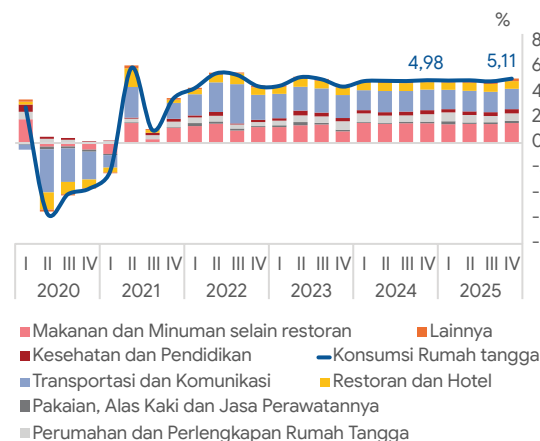
Grafik 2.2.8. Pertumbuhan Penjualan Produktif



Sumber: OECD dan New York Federal Reserves, diolah

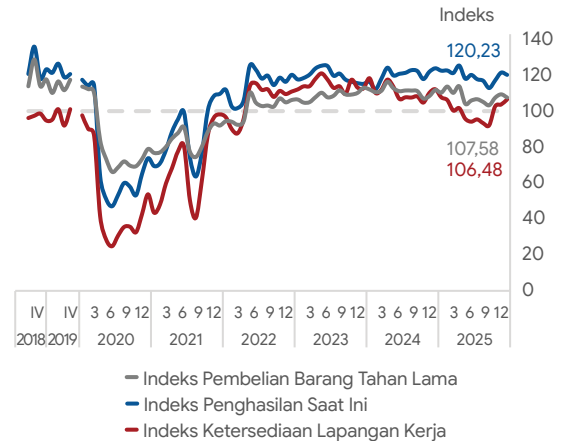
Grafik 2.2.9. Business Confidence Index Indonesia dan Global Supply Chain Pressure Index

Konsumsi RT terjaga, namun masih perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pada triwulan IV 2025, konsumsi RT tumbuh 5,11% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2024 sebesar 4,98% (yoy). Pertumbuhan konsumsi tersebut didorong oleh kategori transportasi dan komunikasi serta makanan dan minuman selain restoran (Grafik 2.2.10). Peningkatan pertumbuhan konsumsi RT pada periode tersebut sejalan dengan kenaikan indeks penghasilan konsumen, indeks pembelian barang tahan lama, dan indeks ketersediaan lapangan kerja pada periode yang sama, namun masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan daya beli RT khususnya kelas menengah bawah yang masih terbatas (Grafik 2.2.11). Kondisi ini turut dikontribusikan oleh masih tingginya



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2.10. Konsumsi RT Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

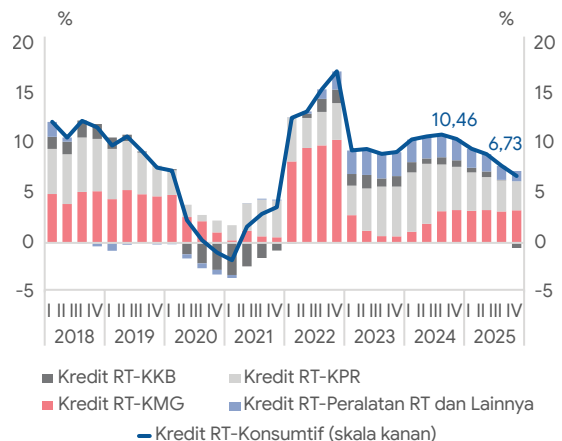


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.11. Indeks Keyakinan Konsumen

pangsa tenaga kerja informal yaitu sebesar 57,8% dengan tingkat upah yang lebih rendah dan jaminan sosial yang terbatas dibandingkan tenaga kerja formal. Kebijakan yang memperkuat penyerapan tenaga kerja formal dapat memperbaiki penghasilan dan daya beli RT yang selanjutnya akan mendorong peningkatan konsumsi RT untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah konsumsi RT yang terjaga, kredit konsumsi RT tumbuh melambat pada 2025. Pada Desember 2025, pertumbuhan kredit konsumsi RT melambat menjadi sebesar 6,73% (yoy) dari 10,46% (yoy) pada Desember 2024 (Grafik 2.2.12). Perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi tersebut terutama dikontribusikan oleh segmen KPR akibat

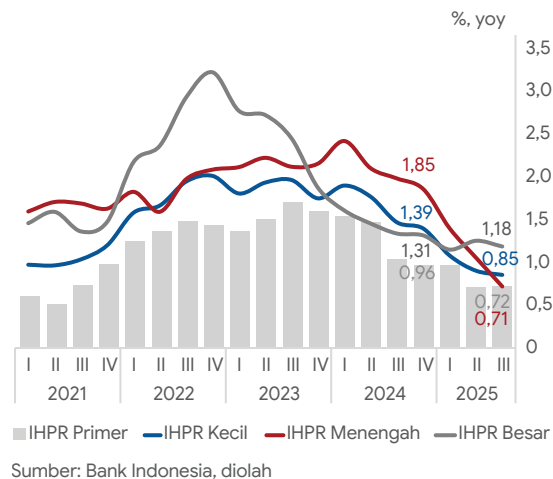


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.12. Andil Pertumbuhan Kredit Konsumsi RT Menurut Jenis Kredit

melemahnya permintaan KPR nonsubsidi di tengah daya beli RT kelas menengah bawah yang masih terbatas dan minat investasi properti RT kelas atas yang menurun. Pelemahan sisi permintaan KPR ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan penjualan properti residensial (Grafik 2.2.13) dan perlambatan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) sepanjang 2025 (Grafik 2.2.14). Di sisi lain, pertumbuhan kredit multi guna meningkat yang turut digunakan oleh RT kelas bawah untuk *consumption smoothing*.

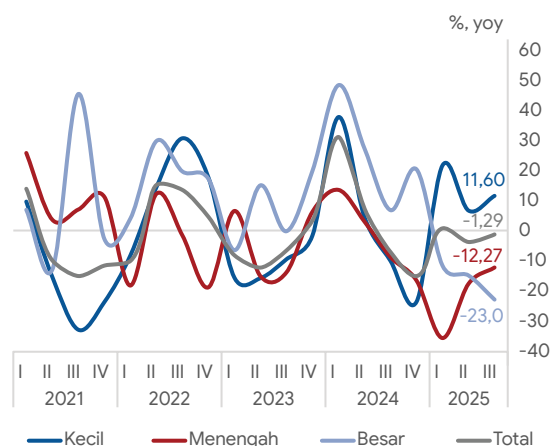
Kebijakan Pemerintah di sektor Perumahan menahan perlambatan pertumbuhan KPR yang lebih dalam. Pemerintah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada akhir Juli 2025 untuk mengurangi *backlog* kepemilikan rumah yang tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini meningkatkan permintaan RT terhadap KPR subsidi yang menawarkan suku bunga lebih rendah dibandingkan KPR nonsubsidi. Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran FLPP mencapai 278.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah implementasi program FLPP. Pada Desember 2025, KPR subsidi tumbuh 11,52% (yoy), lebih tinggi dari 7,50% pada Desember 2024 (Grafik 2.2.15). Realisasi ini mengindikasikan kebijakan penambahan kuota



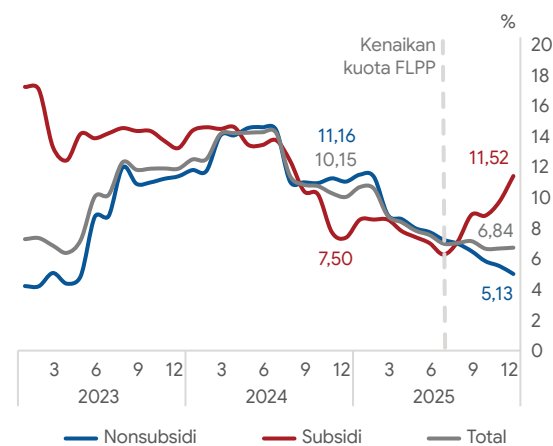
Grafik 2.2.14. Pertumbuhan Indeks Residensial (IHPR) Primer

FLPP efektif dan perlu dilanjutkan di 2026 untuk mengurangi *backlog* kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pertumbuhan kredit konsumsi.

Sejalan dengan kondisi daya beli RT yang terbatas, khususnya kelas menengah bawah, DPK RT tumbuh terbatas di 2025. Dibandingkan tahun 2024, penurunan porsi tabungan RT tercatat di

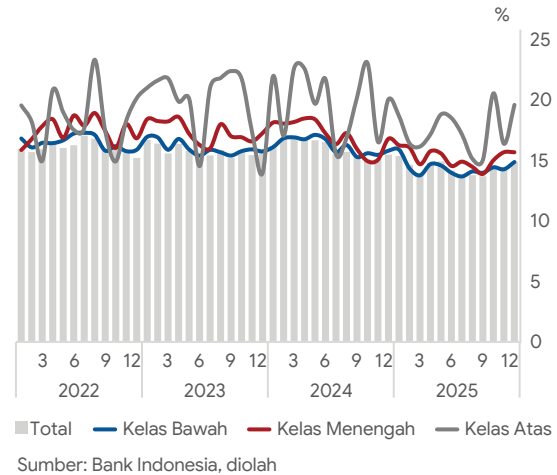


Grafik 2.2.13. Pertumbuhan Penjualan Rumah Pasar Primer Harga Properti



Grafik 2.2.15. Pertumbuhan KPR

seluruh kelas penghasilan (Grafik 2.2.16). Terbatasnya pertumbuhan DPK RT kelas atas di 2025 disebabkan oleh preferensi untuk berinvestasi pada aset lain yang menawarkan tingkat imbal hasil lebih tinggi dari deposito. Sementara pertumbuhan DPK yang terbatas pada RT kelas menengah bawah didorong oleh strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini juga mengindikasikan *buffer* likuiditas dan *repayment capacity* yang terbatas sehingga membatasi akses RT untuk mendapatkan pembiayaan konsumsi perbankan lebih tinggi.



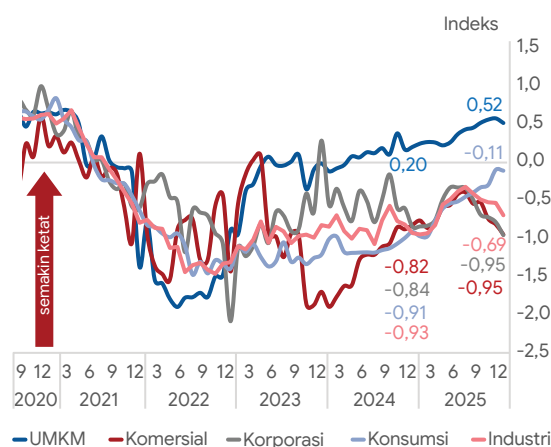
Grafik 2.2.16. Proporsi Tabungan Menurut Tingkat Pengeluaran

2.3

Ketidakseimbangan Penawaran dan Permintaan di Pasar Kredit Berdampak pada Perlambatan Pertumbuhan Kredit 2025

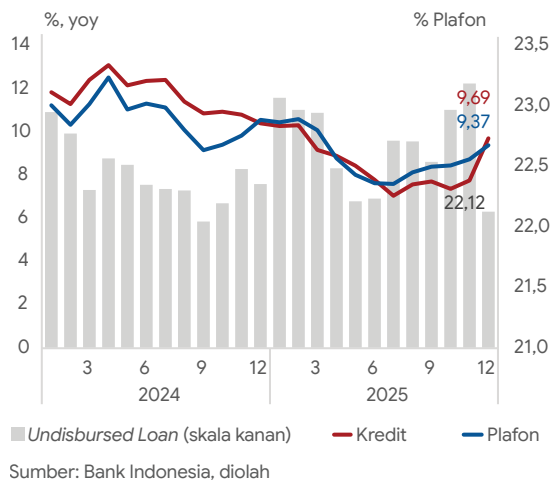
Kecenderungan pemberian kredit perbankan yang lebih berhati-hati pada segmen tertentu berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit di beberapa segmen. Secara umum, minat penyaluran kredit (*lending appetite*) perbankan masih terjaga baik dengan kecenderungan pemberian kredit yang lebih berhati-hati terutama pada segmen tertentu. ILR posisi triwulan IV 2025 yang meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 mencerminkan perilaku perbankan yang semakin berhati-hati dalam penyaluran kredit di tengah masih tingginya risiko ketidakpastian (Grafik 2.3.1). Perilaku penyaluran

kredit yang lebih berhati-hati terutama terlihat di segmen kredit konsumsi dan kredit UMKM seiring dengan usaha bank untuk menjaga kualitas kreditnya. Risiko kredit konsumsi dan kredit UMKM yang meningkat mendorong perilaku *selective lending* bank. Sebaliknya, risiko kredit yang lebih rendah di segmen korporasi dan berbagai program strategis Pemerintah yang memerlukan dukungan pembiayaan investasi mendorong perbankan melonggarkan persyaratan pemberian kredit korporasi sebagaimana tercermin dari tren penurunan ILR korporasi pada triwulan IV 2025.



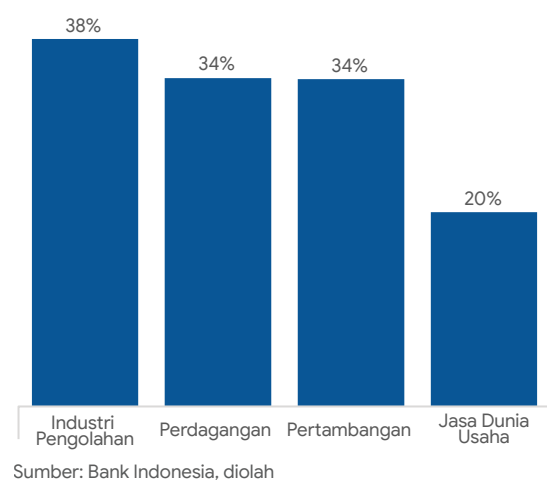
Grafik 2.3.1. Indeks Lending Requirement

Kebutuhan pembiayaan eksternal korporasi yang terbatas di beberapa sektor tercermin dari tingkat Undisbursed Loan (UL) yang masih tinggi. Setelah mencapai rasio 23,18% dari plafon kredit yang diberikan bank pada November 2025, UL perbankan menurun menjadi 22,12% dari plafon kredit pada Desember 2025 seiring akselerasi penyaluran kredit untuk program KDKMP di sektor Konstruksi dan Pertanian (Grafik 2.3.2). Di sisi lain, UL khususnya untuk kredit modal kerja di sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertambangan, dan Jasa Dunia Usaha menjadi penyumbang UL terbesar pada akhir 2025 (Grafik 2.3.3). Terbatasnya utilisasi fasilitas kredit di sektor-sektor ini terjadi seiring perilaku berhati-hati (*wait-and-see*) korporasi yang menahan



Grafik 2.3.2. Perkembangan Undisbursed Loan Perbankan

ekspansi usaha sehingga mengurangi kebutuhan pembiayaan eksternal di tengah ketidakpastian kondisi makro global dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang belum kuat. Perilaku



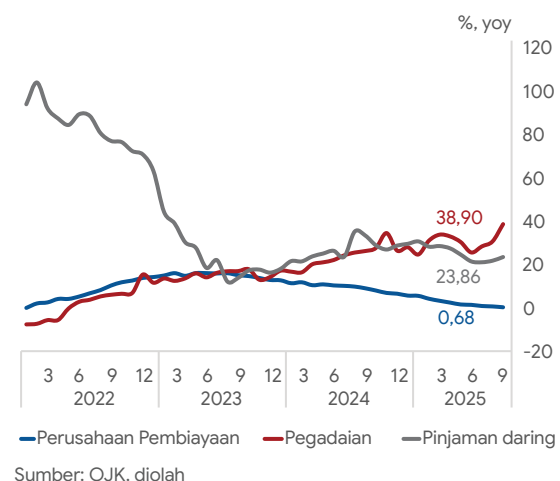
Grafik 2.3.3. Perkembangan Rasio Undisbursed Loan to Plafond Korporasi pada Triwulan IV 2025

berhati-hati korporasi juga tercermin dari optimalisasi penggunaan dana internal untuk membiayai modal kerja di tengah penurunan suku bunga kredit perbankan yang masih terbatas.

2.4 Aktivitas Pembiayaan Nonbank Tumbuh Positif Namun Melambat

Pembiayaan nonbank (PP, Pegadaian, dan pindar⁴) tumbuh positif dengan tren melambat sehingga perlu didorong sebagai komplementer sumber pembiayaan perekonomian. PP yang memiliki pangsa pembiayaan terbesar pada IKNB, tumbuh melambat sebesar 1,09% (yoy) pada 2025, melanjutkan tren perlambatan pada 2024 seiring penurunan penjualan kendaraan bermotor (Grafik 2.4.1). Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui kanal digital yaitu pindar tumbuh relatif tinggi sebesar 22,9% (yoy), didorong permintaan masyarakat dan UMKM terhadap pembiayaan alternatif. Selain itu, penyaluran pembiayaan dari kanal digital lainnya, khususnya dalam bentuk *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang diselenggarakan oleh PP terus meningkat hingga mencapai 69,71% (yoy), didukung kemudahan akses BNPL. Tren peningkatan pertumbuhan Pegadaian

masih didukung tren apresiasi harga komoditas emas yang sejalan dengan preferensi investasi RT kelas atas untuk imbal hasil yang lebih tinggi.



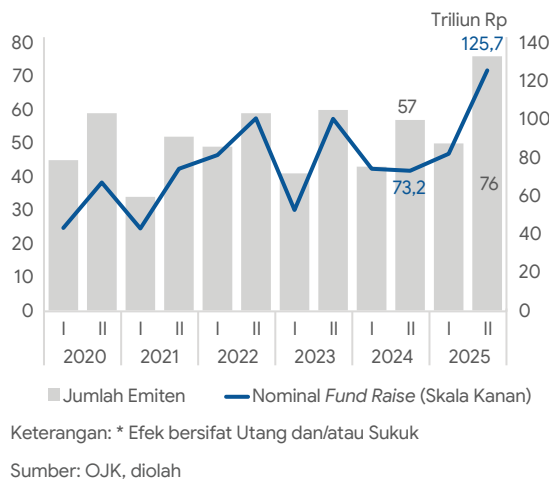
Grafik 2.4.1. Perkembangan Pembiayaan Nonbank

4 Pangsa pembiayaan mencapai sekitar 78% dari total pembiayaan IKNB.

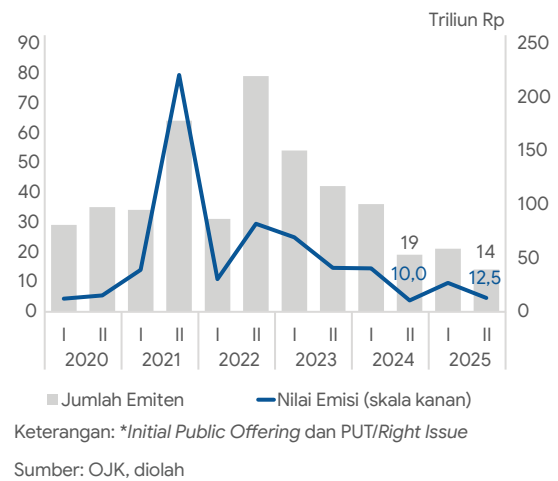
Penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) menguat seiring kebutuhan alternatif sumber pendanaan serta tingkat *pricing* pasar obligasi yang kompetitif. Penghimpunan dana dari pasar modal tahun 2025 ditopang oleh penerbitan EBUS dengan nilai emisi sebesar Rp207 triliun atau tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp147 triliun, didukung oleh ekspektasi tingkat suku bunga yang lebih rendah (Grafik 2.4.2). Tren peningkatan penerbitan EBUS ini disebabkan oleh kebutuhan sumber pendanaan yang berbiaya lebih rendah dibandingkan kredit perbankan bagi korporasi serta kebutuhan diversifikasi pendanaan bagi penerbit di sektor keuangan. Secara umum, sektor-sektor ekonomi utama, seperti sektor keuangan, properti, bahan baku dan energi mencatat kontribusi *nett issuance* yang lebih tinggi pada

2025, sejalan dengan tren penurunan *yield* obligasi korporasi yang mendorong penurunan *cost of fund* di pasar obligasi.

Aktivitas penawaran umum publik cenderung melambat seiring dengan langkah optimalisasi korporasi dalam menggunakan sumber pembiayaan internal. Penurunan tersebut tercermin sepanjang tahun 2025 yang mencatat nilai emisi sebesar Rp38,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp49,8 triliun (Grafik 2.4.3). Prospek penerbitan saham diperkirakan akan semakin baik, didorong oleh rencana *initial public offering* yang berasal dari sektor keuangan, konsumen dan transportasi, terutama untuk ekspansi maupun restrukturisasi neraca keuangan korporasi.



Grafik 2.4.2. Perkembangan Penerbitan EBUS



Grafik 2.4.3. Perkembangan Aktivitas Penawaran Umum

Boks 2.1

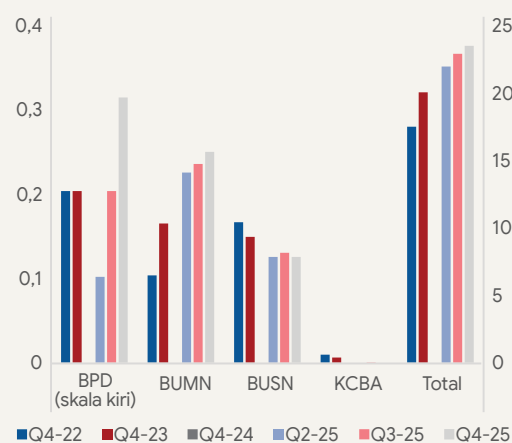
Market Imperfection dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Kredit

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit perbankan akibat *market imperfection* berdampak pada melambatnya pertumbuhan kredit 2025. Dukungan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025, peningkatan KLM sebesar 150 bps di 2025, dan insentif fiskal berupa penempatan dana SAL Pemerintah diarahkan untuk dapat meningkatkan ruang kapasitas pembiayaan perbankan. Namun realisasi dukungan kebijakan tersebut belum cukup efektif mendorong penyaluran kredit lebih tinggi ke sektor riil di tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya *market imperfection* yang disebabkan oleh asimetri informasi terkait kelayakan kredit debitur, sehingga mendorong perilaku *selective lending* perbankan, rigiditas suku bunga kredit, dan ketergantungan terhadap deposit besar.

Market Imperfection I: Selective lending perbankan pada segmen kredit yang menunjukkan risiko kredit tinggi. Kecenderungan *selective lending* perbankan berbasis faktor nonharga di tengah permintaan kredit yang relatif stabil tercermin dari kenaikan rasio tolakan kredit di 2025 (Grafik B2.1.1). Perbankan cenderung lebih berhati-hati dan mengetatkan syarat penyaluran kredit ke segmen konsumsi RT dan UMKM seiring risiko kredit kedua segmen tersebut yang meningkat di 2025. Daya beli masyarakat khususnya kelas menengah bawah yang masih terbatas mendorong perbankan untuk fokus menyalurkan kredit ke debitur dengan penghasilan tetap untuk menjaga kualitas kredit. Perilaku *selective lending* ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit UMKM perbankan 2025. Stiglitz dan Weiss (1981) menunjukkan bahwa dalam kondisi asimetri informasi, bank cenderung membatasi kuantitas kredit untuk mengelola risiko dibandingkan penyesuaian harga kredit.⁵ Pengalaman internasional menunjukkan

pola serupa, di mana survei perbankan oleh European Central Bank⁶ dan The Federal Reserve⁷ pada tahun 2025 juga mencatat terjadinya pengetatan *lending standard* dan peningkatan rasio tolakan kredit pada segmen korporasi, *consumer loans*, dan *mortgage* di Uni Eropa dan Amerika Serikat di tengah kekhawatiran perbankan akan potensi kenaikan risiko kredit.

Market Imperfection II: Penurunan suku bunga kredit yang tertahan akibat meningkatnya premi risiko kredit. Tren peningkatan risiko kredit di segmen konsumsi RT dan UMKM mendorong bank meningkatkan premi risiko kredit pada komponen SBDK segmen kredit konsumsi dan kredit UMKM (Grafik B2.1.2). Kondisi ini selanjutnya berdampak pada tertahannya penurunan suku bunga kredit perbankan di 2025. Pada Desember 2025, suku bunga kredit rupiah perbankan turun terbatas sebesar 38 bps menjadi 8,81% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 9,20%. Penurunan suku bunga kredit perbankan yang terbatas didorong oleh suku bunga kredit pada segmen UMKM yang hanya turun 24 bps



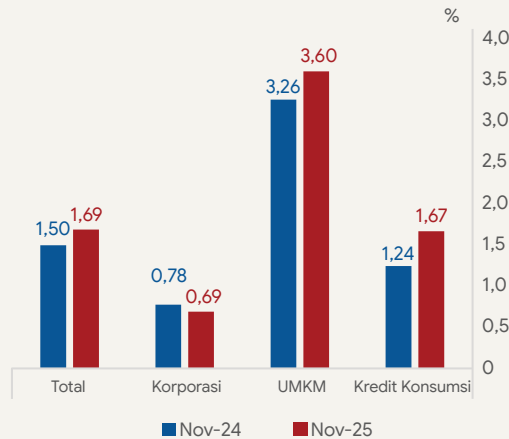
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik B2.1.1. Rasio Tolakan Aplikasi
Kredit Baru**

5 Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). *Credit rationing in markets with imperfect information*. *The American economic review*, 71(3), 393-410.

6 European Central Bank. (2025) *The Euro Area Bank Lending Survey: Second Quarter of 2025*.

7 Federal Reserve Bank of New York. (2025). *SCE Credit Access Survey*.



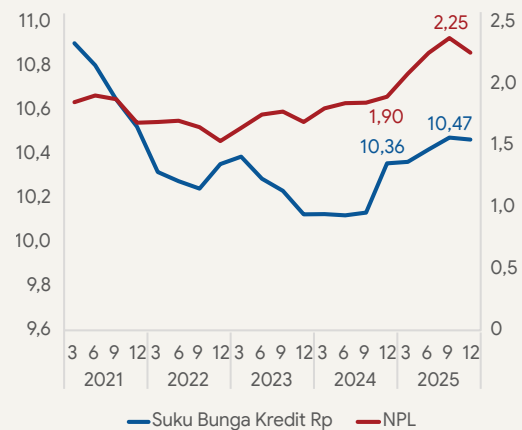
Sumber: OJK, diolah

Grafik B2.1.2. Estimasi Premi Resiko Kredit pada Komponen Suku Bunga Dasar Kredit

dan kredit konsumsi yang masih meningkat 11 bps sejalan dengan risiko kredit kedua segmen tersebut yang masih meningkat (Grafik B2.1.3).

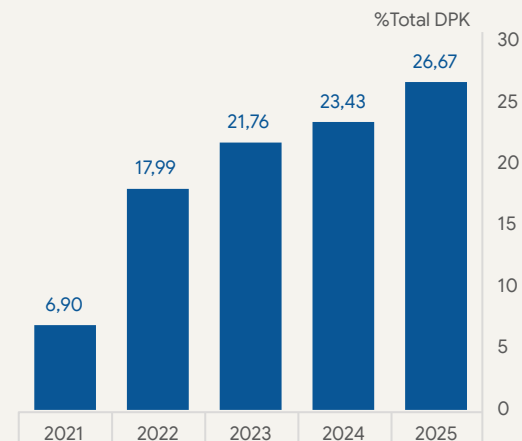
Market Imperfection III: Penurunan suku bunga DPK yang masih terbatas seiring ketergantungan pendanaan pada deposito besar. Meski persaingan penghimpunan dana pada deposito besar relatif menurun di semester II 2025 sebagaimana tercermin dari penurunan suku bunga DPK *special rate* sebesar 123 bps secara tahunan pada Desember 2025, ketergantungan perbankan pada deposito besar masih tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya porsi DPK *special rate* terhadap total DPK perbankan yang mencapai 26,67% pada Desember 2025, meningkat dari 23,43% pada Desember 2024 (Grafik B2.1.4). Akibatnya, biaya dana tetap tinggi karena suku bunga DPK menurun secara terbatas sehingga ruang penurunan suku bunga kredit juga menjadi terbatas. Terbatasnya penurunan suku bunga DPK perbankan di tengah penurunan suku bunga kebijakan juga pernah terjadi di Perancis pada tahun 2011–2013. Dalam periode tersebut, perbankan cenderung menahan penurunan suku bunga kredit dan menyesuaikan penawaran kredit secara lebih berhati-hati, sehingga pertumbuhan kredit mengalami perlambatan⁸.

⁸ Duquerroy, A., Matray, A., Saidi, S., 2020, Sticky Deposit Rates and Allocative Effects of Monetary Policy, Banque de France, Working Paper Series No. 794



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.3. Suku Bunga Kredit Rupiah dan NPL Kredit Konsumsi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.4. Pangsa DPK Special Rate Rupiah Terhadap Total DPK

Boks
2.2

Inovasi Instrumen Keuangan Untuk Pembiayaan Ekonomi

Selain sumber pembiayaan dari perbankan, obligasi korporasi memiliki peran strategis dalam pembiayaan ekonomi dan pembangunan, namun pemanfaatannya di Indonesia masih terbatas. Hingga 2024, *outstanding* obligasi korporasi di Indonesia baru mencapai 2,1% dari PDB dan masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan obligasi korporasi sebagai sumber pembiayaan sektor riil. Inovasi berupa optimalisasi penggunaan obligasi korporasi melalui perluasan *collateral (underlying)* transaksi *repurchase agreement (repo)* diharapkan mampu meningkatkan daya tarik instrumen ini melalui penguatan likuiditas dan nilai guna bagi investor.

Sejalan dengan upaya mendukung pembiayaan perekonomian dan penguatan manajemen likuiditas bank, Bank Indonesia menginisiasi perluasan *underlying* transaksi repo melalui Operasi Moneter (OM). Repo dengan *underlying* obligasi dan sukuk korporasi berfungsi sebagai *liquidity backstop* yang

secara berkesinambungan dapat memperkuat intermediasi perbankan ke sektor riil. Likuiditas jangka pendek yang diperoleh melalui repo memungkinkan penyaluran kredit bank secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan insentif kepemilikan obligasi korporasi.

Untuk memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga menetapkan kriteria dan persyaratan eligibilitas surat berharga yang dapat digunakan. Kriteria dan persyaratan tersebut meliputi: 1) dapat diperjualbelikan (*tradable*); 2) tercatat di rekening peserta OM pada sistem penatausahaan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia; 3) aktif diperdagangkan dalam periode tertentu; 4) memiliki peringkat tinggi; dan 5) tidak sedang diagunkan.⁹ Adapun surat berharga yang memenuhi kriteria tersebut adalah obligasi dan sukuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) yang merupakan *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan yang berperan dalam penyediaan pembiayaan di sektor Perumahan.

Tabel B2.2.1. Perbandingan Rasio *Outstanding* Obligasi terhadap Produk Domestik Bruto

	Rasio Debt to GDP	PDB	O/s Obligasi Pemerintah	O/s Obligasi Korporasi
		Dalam triliun USD	Dalam miliar USD (% PDB)	Dalam miliar USD (% PDB)
Jepang	236,7%	4,03	8.154 (202,5%)	678 (16,8%)
Korea Selatan	52,5%	1,88	847 (45,2%)	1.315 (70,1%)
Singapura	175,6%	0,55	225 (41,1%)	148 (27,1%)
Indonesia	40,2%	1,40	387 (27,7%)	29 (2,1%)

Sumber: Asian Bonds Online, World Bank, IMF, 2024, diolah

9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter

Kebijakan perluasan *underlying* transaksi *repo* melalui OM diharapkan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank dan mendukung pendalaman pasar sekunder dari **obligasi korporasi**. Bertambahnya instrumen yang dapat direpokan ke Bank Indonesia memberikan alternatif sumber pengelolaan likuiditas yang lebih beragam bagi bank dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar untuk bertransaksi menggunakan obligasi dan sukuk korporasi di pasar sekunder. Pasca implementasi, posisi kepemilikan bank atas obligasi korporasi PT SMF per 15 Desember 2025 meningkat 7,3% (Rp636 Miliar) menjadi Rp9,31 Triliun dari posisi 30 Oktober 2025 sebesar Rp8,67 Triliun¹⁰.

10 Sumber: OJK, diolah

Perluasan *underlying* transaksi *repo* ini merupakan perwujudan sinergi pengembangan pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan antara Bank Indonesia dengan **Kementerian/Lembaga, otoritas, dan pelaku pasar**. Pengaturan dan pengawasan terhadap obligasi dan sukuk korporasi merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga koordinasi kebijakan menjadi kunci dalam memastikan inovasi instrumen berjalan selaras dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat ekosistem pasar keuangan nasional, dan mendukung pembiayaan ekonomi secara berkelanjutan. Ke depan, perluasan *underlying* transaksi *repo* OM Bank Indonesia berpotensi dikembangkan untuk mendukung pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi yang lebih luas termasuk perluasan *issuers* obligasi korporasi yang dapat direpokan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab 3

RESILIENSI KUAT, STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERJAGA

Ketahanan sistem keuangan masih solid, didukung oleh ketahanan perbankan yang tetap kuat. Risiko kredit perbankan masih terjaga, tercermin dari Non-Performing Loan (NPL) dan Loan at Risk (LaR) yang menurun, serta akumulasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mencukupi. Likuiditas perbankan juga memadai untuk mendukung pertumbuhan kredit seiring dengan rasio kecukupan likuiditas jangka pendek dan panjang yang berada di atas batasan minimum yang ditetapkan otoritas. Profitabilitas perbankan juga masih terjaga di tengah penurunan spread suku bunga. Diversifikasi pendapatan bank turut berkontribusi pada tetap terjaganya profitabilitas perbankan di tengah moderasi NIM. Ketahanan perbankan turut ditopang oleh tingkat permodalan yang tinggi dan tetap kuat di tengah dinamika global dan domestik.

Kemampuan bayar korporasi dan RT yang masih terjaga turut mendukung ketahanan sistem keuangan. Sepanjang 2025, likuiditas korporasi tetap memadai seiring perilaku wait and see terhadap kebijakan tarif global dan efisiensi anggaran Pemerintah. Ketahanan korporasi juga baik yang

tercermin dari probability of default yang berada dalam zona aman. Pada segmen RT, ketahanan masih relatif terjaga, terutama ditopang kelas atas. Namun demikian, peningkatan risiko kredit perlu diwaspadai terutama risiko dari kredit konsumsi. Hal ini terpantau dari indeks penghasilan rumah tangga yang menurun seiring melambatnya pertumbuhan tenaga kerja.

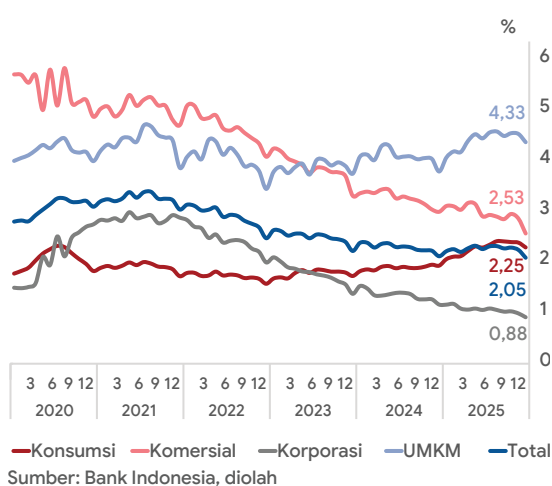
Ketahanan IKNB masih terjaga, didukung risiko kredit yang rendah, pasar saham domestik yang relatif terjaga, serta risiko kepemilikan ULN yang relatif terkendali. Risiko interkoneksi antara IKNB dan perbankan masih terbatas karena eksposur yang rendah. Risiko kredit perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring juga masih terjaga. Kinerja pasar saham domestik relatif terkendali meskipun perlu diwaspadai potensi overvaluasi harga saham pada beberapa emiten tertentu. Sementara itu, risiko kepemilikan ULN pada perbankan dan korporasi relatif terjaga, didukung oleh tingginya dominasi loan agreement dan tenor jangka panjang dalam komposisi ULN.



3.1

Industri Perbankan Tetap Kuat Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Sejalan dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, risiko kredit perbankan tetap terjaga baik, didukung ekonomi domestik berdaya tahan ditengah ketidakpastian global. Stabilitas sistem keuangan tetap kuat, tercermin dari ISSK yang berada dalam zona Normal sepanjang semester II 2025. Risiko kredit perbankan yang tercermin dari NPL terjaga rendah sebesar 2,05% pada Desember 2025, relatif stabil dibandingkan dengan Desember 2024 sebesar 2,08% (Grafik 3.1.1). Terjaganya NPL



Grafik 3.1.1. Perkembangan Non Performing Loan (bruto) Berdasarkan Segmen

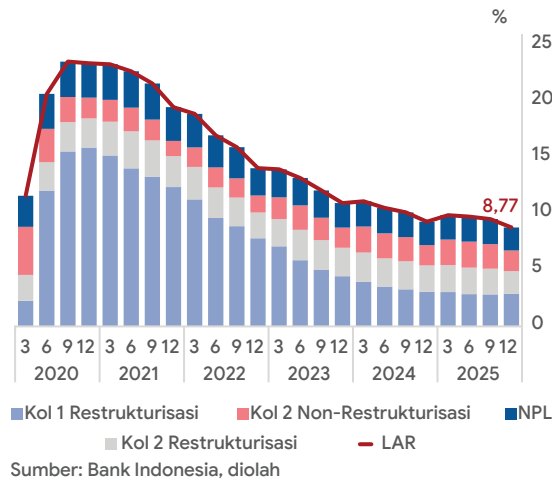
terutama ditopang oleh perbaikan berkelanjutan pada segmen debitur korporasi dan komersial, masing-masing menurun menjadi 0,88% dan 2,53% pada Desember 2025 dari sebelumnya 1,13% dan 2,96% pada Desember 2024. Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan NPL seiring berakhirnya relaksasi restrukturisasi COVID-19 dan melemahnya konsumsi dan daya beli domestik. Berdasarkan segmen, NPL pada UMKM dan kredit konsumsi meningkat, masing-masing menjadi 4,33% dan 2,25% pada Desember 2025, dari 3,76% dan 1,90% pada Desember 2024. Sementara itu, peningkatan NPL berdasarkan sektor ekonomi terutama terjadi pada sektor Jasa Sosial, Perdagangan, dan Pertanian (Tabel 3.1.1).

Risiko kredit perbankan yang terkendali juga tercermin dari penurunan rasio kredit bank yang berpotensi bermasalah atau gagal bayar. Rasio LaR tercatat sebesar 8,77% pada Desember 2025, merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir dan lebih rendah dari level prapandemi sebesar 9,93% pada Desember 2019 (Grafik 3.1.2). Perbaikan LaR terutama terjadi pada segmen korporasi dan komersial, seiring menurunnya kredit restrukturisasi dan membaiknya kemampuan bayar debitur (Grafik 3.1.3). Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan LaR pada segmen UMKM dan kredit konsumsi, seiring kenaikan NPL dan kredit yang direstrukturisasi.

Tabel 3.1.1. Perkembangan Non Performing Loan per Sektor Ekonomi

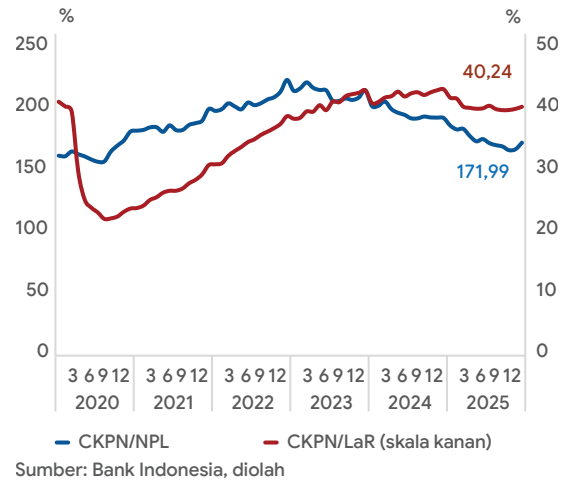
Sektor Ekonomi	NPL (Rp Triliun)		Kredit (Rp Triliun)		NPL (%)		Δ Des-25 & Des-24		
	Des-24	Des-25	Des-24	Des-25	Des-24	Des-25	Nominal NPL	Nominal Kredit	Rasio NPL
A. Pertanian	11,07	12,70	544	621	2,04	2,05	1,63	77,21	0,01
B. Pertambangan	4,09	4,26	374	400	1,10	1,07	0,17	26,80	-0,03
C. Industri Pengolahan	35,97	28,13	1.224	1.297	2,94	2,17	-7,84	72,80	-0,77
D. Listrik Gas Air	0,52	0,53	220	298	0,24	0,18	0,01	77,43	-0,06
E. Konstruksi	11,74	10,56	395	505	2,97	2,09	-1,18	110,04	-0,88
F. Perdagangan	42,95	48,32	1.324	1.378	3,24	3,51	5,37	53,49	0,26
G. Pengangkutan	4,24	4,05	445	497	0,95	0,81	-0,19	52,40	-0,14
H. Jasa Dunia Usaha	8,10	8,48	821	905	0,99	0,94	0,37	84,52	-0,05
I. Jasa Sosial	3,68	7,73	342	405	1,08	1,91	4,05	63,35	0,83
J. Lain - lain	40,54	51,39	2.139	2.279	1,90	2,25	10,85	140,64	0,36
Total	162,91	176,15	7.827	8.586	2,08	2,05	13,24	758,68	-0,03

Sumber: Bank Indonesia, diolah



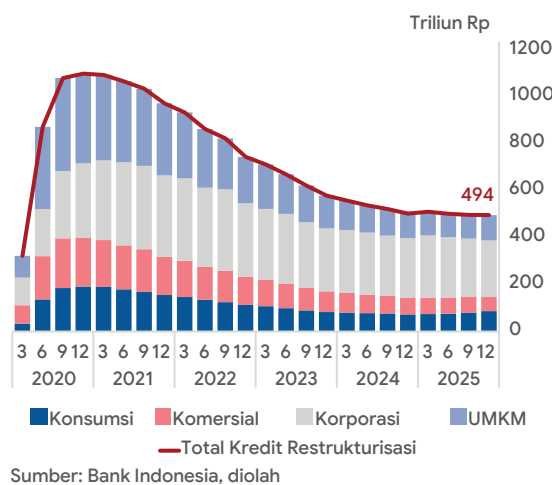
Grafik 3.1.2. Perkembangan Komposisi Loan at Risk Perbankan

Perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi potensi pemburukan kualitas kredit. Akumulasi CKPN masih relatif tinggi, ditunjukkan oleh rasio CKPN terhadap NPL dan rasio CKPN terhadap LaR masing-masing sebesar 171,99% dan 40,24% pada Desember 2025 (Grafik 3.1.4). Kedua rasio tersebut berada dalam tren menurun dibandingkan Desember 2024, masing-masing dari 192,04% untuk CPKN terhadap NPL dan 43,07% untuk CKPN terhadap LaR. Meski demikian, level rasio yang masih relatif tinggi menunjukkan sikap perbankan yang tetap berhati-hati sekaligus optimistis terhadap perbaikan kualitas kredit ke depan.

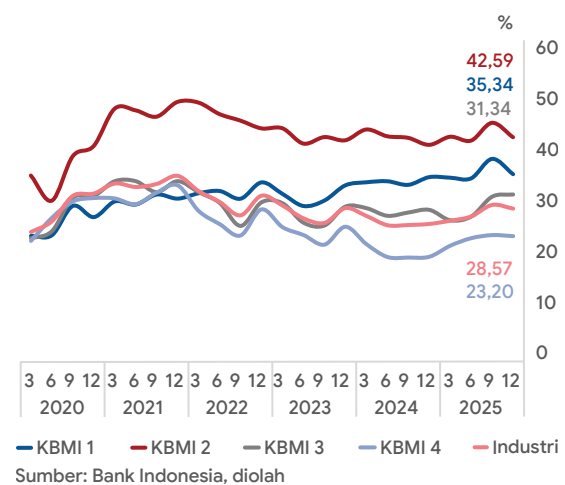


Grafik 3.1.4. Perkembangan Coverage Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Terhadap Risiko Kredit

Likuiditas perbankan memadai untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan kredit. Rasio AL/DPK tercatat sebesar 28,57% pada Desember 2025, meningkat dari Desember 2024 sebesar 25,59% dan masih berada di atas ambang batas rasio AL/DPK sebesar 10% (Grafik 3.1.5). Likuiditas perbankan yang memadai didorong oleh percepatan belanja fiskal dan penempatan dana SAL pada bank BUMN, Bank Syariah Indonesia dan BPD DKI sebesar Rp276 triliun pada semester II 2025. Penempatan dana tersebut meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan, terutama pada bank KBMI 4 sebagai penopang pertumbuhan kredit (*growth driver*). Perbankan menempatkan mayoritas alat likuidnya dalam bentuk SBN yaitu sebesar 42,81% pada Desember 2025, meningkat dibandingkan Desember 2024 sebesar 39,94%.



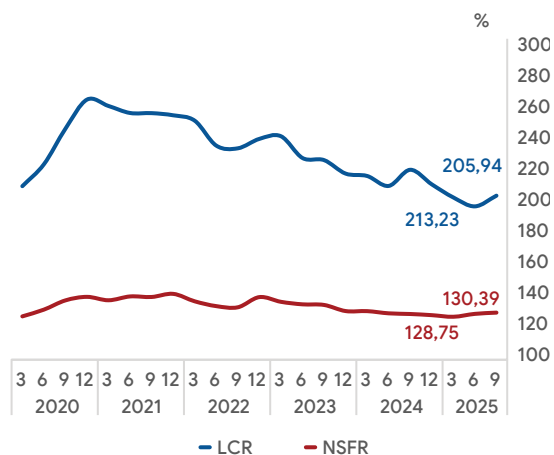
Grafik 3.1.3. Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen



Grafik 3.1.5. Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Kelompok Bank

Ketahanan likuiditas yang baik juga diindikasikan oleh *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) industri perbankan. Rasio LCR¹¹ perbankan kembali meningkat menjadi 205,94% pada September 2025 seiring adanya penempatan dana SAL pada triwulan III 2025. Rasio NSFR¹² juga tetap tinggi sebesar 130,39% pada September 2025. Kedua rasio likuiditas tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 100% (Grafik 3.1.6). Hal ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan.

Profitabilitas perbankan tetap terjaga di tengah tekanan *spread* suku bunga. Rasio ROA tercatat sebesar 2,53% pada Desember 2025, sedikit menurun dari 2,69% pada Desember 2024. Demikian pula rasio NIM juga sedikit menurun menjadi 4,56% pada Desember 2025 dari 4,62% pada Desember 2024 (Grafik 3.1.7). Penurunan ROA lebih besar dibandingkan dengan NIM, didorong oleh kenaikan *overhead cost* (OHC) yang melampaui peningkatan pendapatan nonbunga, termasuk *fee-based income*,

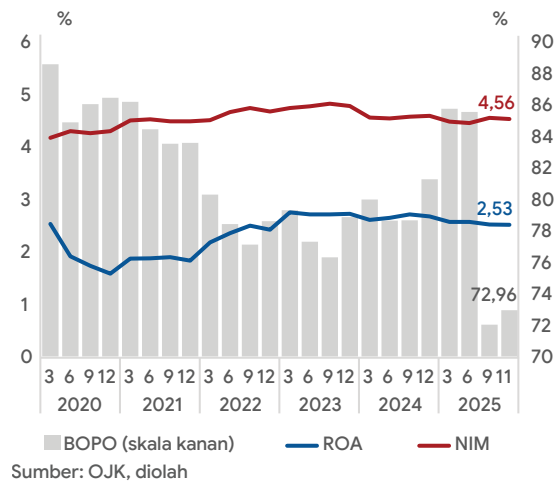


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.6. Perkembangan *Liquidity Coverage Ratio* dan *Net Stable Funding Ratio*

11 LCR adalah rasio perbandingan antara *High Quality Liquid Assets* dengan *Net Cash Outflow* (total arus kas keluar bersih) selama 30 hari ke depan dalam skenario stres. Tujuannya adalah untuk memastikan bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup terhadap perkiraan kebutuhan likuiditas jangka pendek dalam kondisi stres.

12 NSFR adalah rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*Available Stable Funding*) dan pendanaan stabil yang diperlukan (*Required Stable Funding*). NSFR mengukur kemampuan bank untuk mendanai aktivitasnya dengan sumber dana yang stabil dalam periode satu tahun, dengan persyaratan rasio minimal 100%.

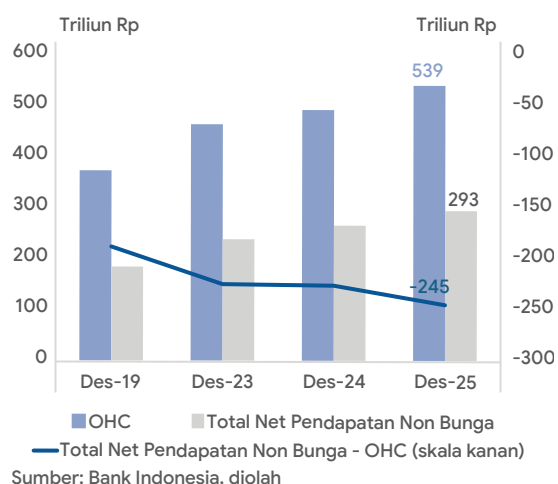


Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.1.7. Return on Assets, Net Interest Margin, dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Perbankan

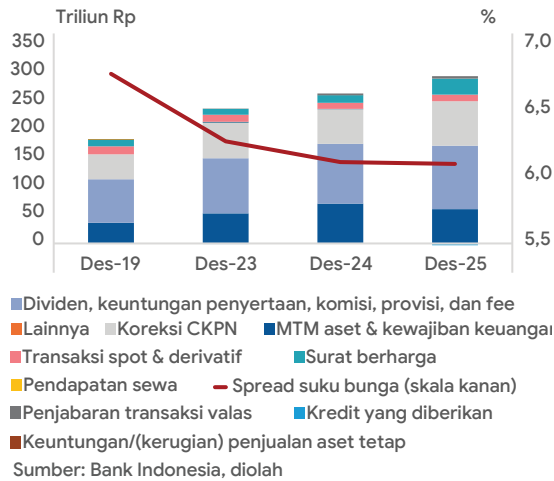
pendapatan bunga dari surat berharga, serta koreksi CKPN (Grafik 3.1.8 dan Grafik 3.1.9). Kenaikan beban OHC berpotensi memberikan tekanan terhadap profitabilitas, seiring meningkatnya risiko kredit pada segmen UMKM dan kredit konsumsi.

Ketahanan perbankan turut ditopang oleh tingkat permodalan yang tinggi dan tetap kuat di tengah dinamika global dan domestik. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat sebesar 25,89% pada Desember 2025 (Grafik 3.1.10), didukung oleh tingginya pangsa modal inti yang mencapai 95,14% pada Desember 2025 (Grafik 3.1.11). Kondisi ini menunjukkan kemampuan permodalan bank yang memadai dalam menyerap potensi kerugian jika terjadi materialisasi risiko perbankan. Ketahanan permodalan perbankan juga tetap kuat



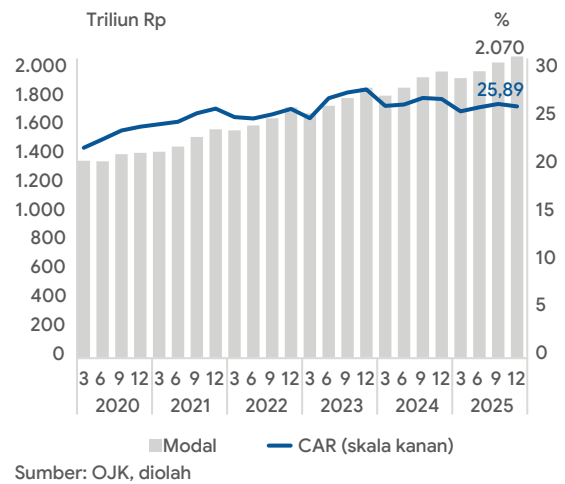
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.8. Selisih Total Net Pendapatan Nonbunga dengan Overhead Cost (Disetahunkan)

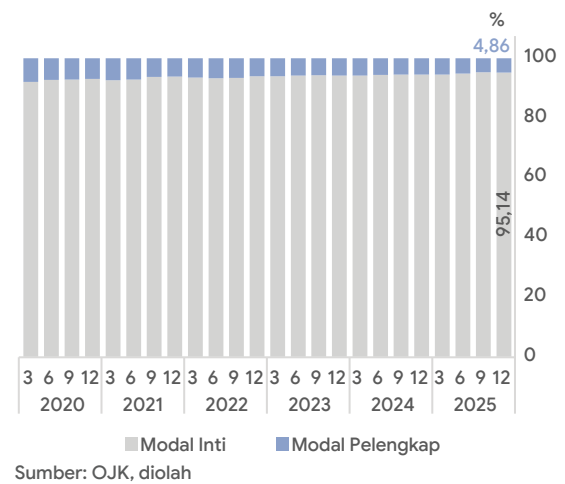


Grafik 3.1.9. Perkembangan Pendapatan Bersih Non-Bunga Bank (Disetahunkan)

dalam menghadapi berbagai skenario dinamika global dan domestik. Hasil *solvency stress test* menunjukkan NPL tetap berada di bawah 5% dengan CAR diperkirakan berada di atas 20%. Tingginya permodalan diperkirakan mampu menahan dampak risiko kredit dan risiko pasar dalam berbagai skenario tekanan, termasuk kenaikan inflasi yang signifikan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar, kebijakan proteksi perdagangan Amerika Serikat, serta peningkatan tensi geopolitik global.



Grafik 3.1.10. Perkembangan Permodalan

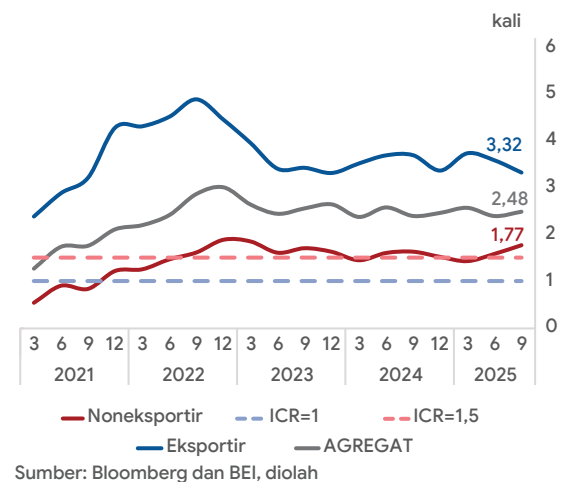


Grafik 3.1.11. Perkembangan Komposisi Modal

3.2 Ketahanan Korporasi dan Rumah Tangga Masih Terjaga Baik

Ketahanan korporasi masih terjaga di tengah dinamika domestik dan global. Kemampuan bayar korporasi terjaga yang tercermin dari peningkatan *interest coverage ratio* (ICR) menjadi 2,48 pada triwulan III 2025 dari 2,39 pada triwulan II 2025 dan masih di atas ambang batas ICR 1 kali. Berdasarkan orientasi penjualan, ICR korporasi eksportir dan noneksportir juga berada di atas ambang batas, masing-masing 3,22 dan 1,77 pada triwulan III 2025 (Grafik 3.2.1).

Likuiditas korporasi tetap memadai sepanjang 2025, seiring perilaku *wait and see* terhadap kebijakan tarif global dan efisiensi anggaran Pemerintah. Bantalan (*buffer*) likuiditas korporasi

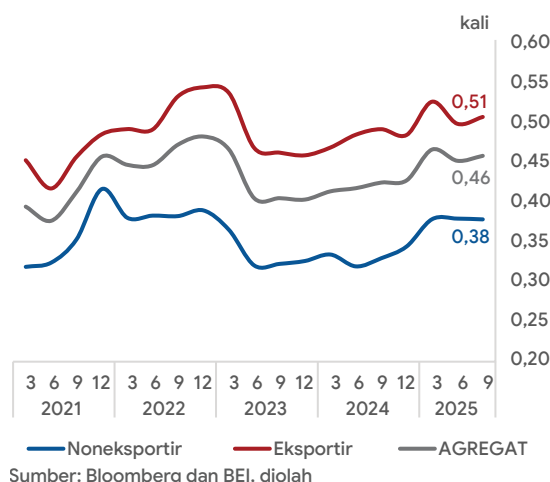


Grafik 3.2.1. Perkembangan Kemampuan Bayar Korporasi (ICR)

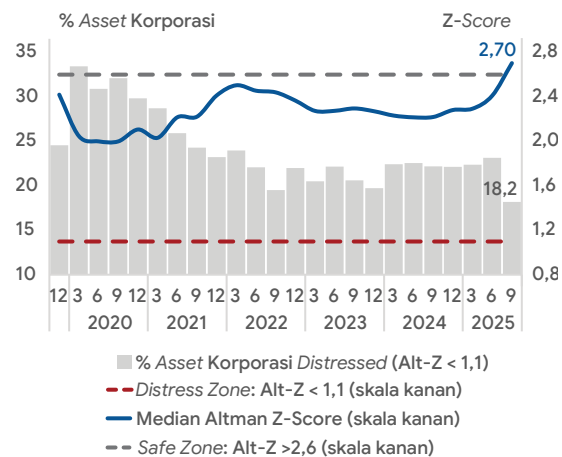
yang masih memadai tercermin dari *cash ratio* sebesar 0,46 pada triwulan III 2025. Pemupukan *buffer* dilakukan baik oleh korporasi eksportir maupun noneksportir (Grafik 3.2.2). *Cash ratio* korporasi eksportir tercatat sebesar 0,51 pada triwulan III 2025 sebagai *buffer* untuk menyikapi dinamika kebijakan tarif global. Sementara itu, *cash ratio* korporasi noneksportir tercatat stabil sebesar 0,38 pada triwulan III 2025 seiring perilaku *wait and see* terhadap efisiensi anggaran pemerintah pada awal tahun.

Ketahanan korporasi juga terlihat dari *probability of default* yang berada dalam zona aman. Pada triwulan III 2025, median *Altman Z-score* korporasi meningkat dari 2,41 pada triwulan II 2025 menjadi 2,70 pada triwulan III 2025, mengindikasikan berkurangnya tekanan risiko kebangkrutan sektor korporasi (Grafik 3.2.3). Selain itu, porsi aset korporasi yang berada di zona *distress* dalam tren penurunan dari 23,1% pada triwulan II 2025 menjadi 18,2% pada triwulan III 2025.

Ketahanan RT masih relatif terjaga, meskipun risiko kredit terlihat mulai meningkat. Kondisi tersebut terutama ditopang oleh RT kelas atas yang memiliki *buffer* keuangan lebih kuat, baik dari sisi aset maupun pendapatan, sehingga tetap mampu menjaga kualitas pemenuhan kewajibannya. Namun demikian, kapasitas pembayaran RT secara umum menunjukkan kecenderungan yang semakin terbatas, sejalan dengan tekanan pendapatan dan beban cicilan yang masih tinggi. Perkembangan tersebut tercermin pada tren peningkatan rasio NPL kredit konsumsi RT, yang mengindikasikan mulai meningkatnya risiko kredit RT.

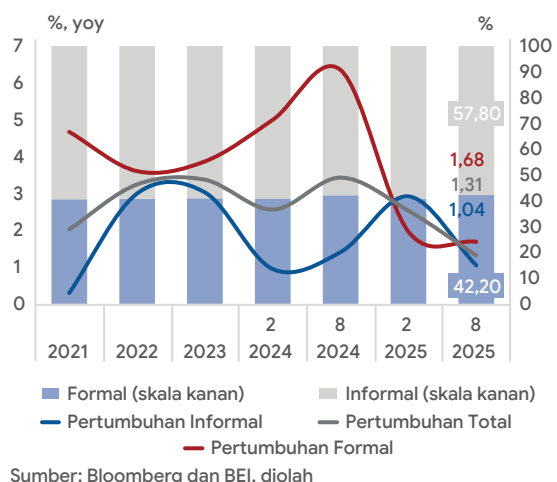


Grafik 3.2.2. Perkembangan Rasio Likuiditas (*Cash Ratio*) Korporasi

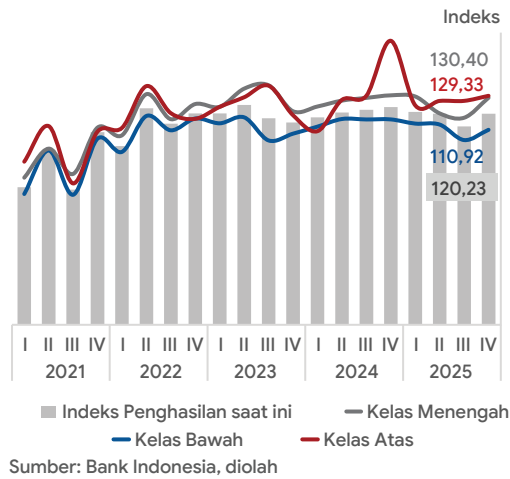


Grafik 3.2.3. Perkembangan Indikator *Financial Distress* (Altman Z-Score) Korporasi

Pertumbuhan tenaga kerja (TK) mengalami perlambatan, diikuti dengan penurunan indeks penghasilan RT. Pertumbuhan TK tercatat sebesar 1,31% (yoy) pada semester II 2025, melambat dibandingkan dengan semester II 2024 sebesar 3,42% (yoy) (Grafik 3.2.4). Perlambatan terjadi pada TK formal yang menurun dari 6,35% pada semester II 2024 menjadi 1,68% (yoy) pada semester II 2025. Penurunan juga terjadi pada TK informal, yaitu dari 1,40% pada semester II 2024 menjadi 1,04% pada semester II 2025. Di tengah perlambatan tersebut, struktur ketenagakerjaan masih relatif stabil dengan pangsa TK formal mencapai 42,20% pada semester II 2025, namun masih berada di bawah level pra-pandemi yang berkisar sekitar 44%. Seiring dengan perkembangan ini, indeks penghasilan RT menurun menjadi 120,23 pada akhir 2025 dari 123,91 pada



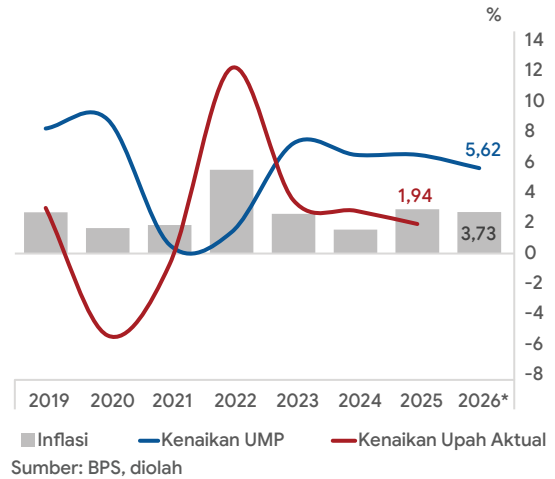
Grafik 3.2.4. Perkembangan Tenaga Kerja Formal dan Informal



Grafik 3.2.5. Perkembangan Indeks Penghasilan RT

akhir 2024 (Grafik 3.2.5). Sebagai dampaknya, terjadi penurunan pangsa tabungan dibandingkan dengan konsumsi dan cicilan (Grafik 3.2.6).

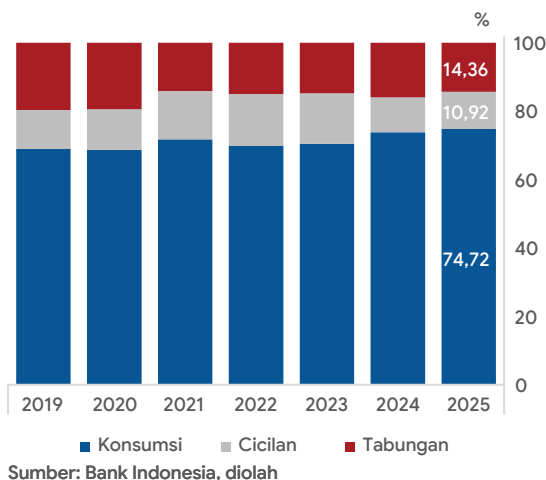
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diperkirakan berdampak terbatas terhadap peningkatan pendapatan RT. Rata-rata kenaikan UMP pada 2026 tercatat sebesar 5,62% dengan rentang kenaikan 0–9% di tiap provinsi, meningkat dari Rp3,31 juta menjadi Rp3,50 juta (Grafik 3.2.7). Peningkatan ini relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan UMP dari 2024 ke 2025 sebesar 6,50%. Dampak kenaikan UMP terhadap pendapatan RT pada 2026 diperkirakan masih terbatas seiring dengan masih dominannya TK informal, tingginya proporsi TK formal yang menerima upah di bawah UMP yaitu sekitar 53%, dan kenaikan upah aktual yang secara historis lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP. Realisasi program pemerintah pada 2025 seperti KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih yang



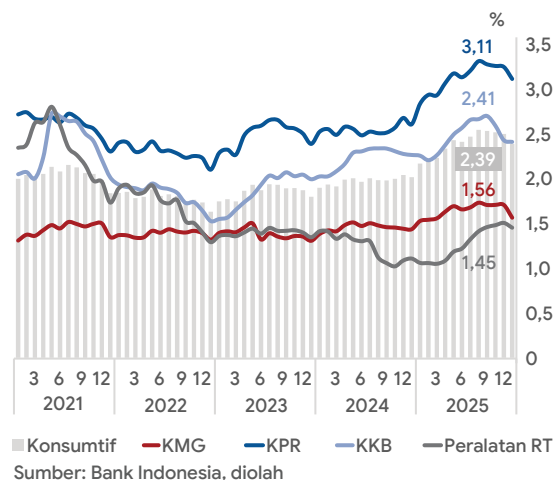
Grafik 3.2.7. Kenaikan UMP dan Upah Aktual

berpotensi menyerap banyak tenaga kerja belum memberikan manfaat optimal pada pendapatan RT karena masih pada tahap awal. Selain itu, penyaluran bantuan sosial juga masih memberikan dukungan yang terbatas terhadap peningkatan pendapatan RT secara agregat.

Risiko kredit RT masih relatif terjaga, namun terdapat tren peningkatan yang perlu diwaspadai. NPL kredit konsumsi tercatat sebesar 2,39% pada Desember 2025, masih di bawah ambang batas 5% yang ditetapkan regulator (Grafik 3.2.8). Berdasarkan jenis kredit, NPL tertinggi terdapat pada KPR sebesar 3,11%, diikuti KKB sebesar 2,41%, dan KMG sebesar 1,56%. Lebih lanjut, berdasarkan rata-rata perkembangan dalam tiga tahun terakhir, peningkatan NPL paling signifikan tercatat pada segmen KPR nonsubsidi, KKB, dan kredit BNPL, sejalan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi di tengah pertumbuhan pendapatan RT yang masih

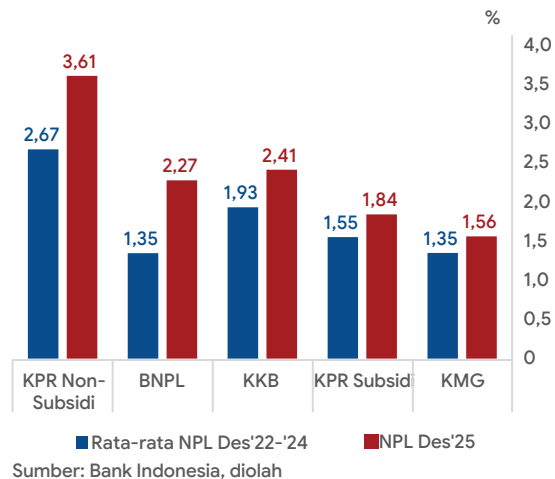


Grafik 3.2.6. Perkembangan Proporsi Pengeluaran RT



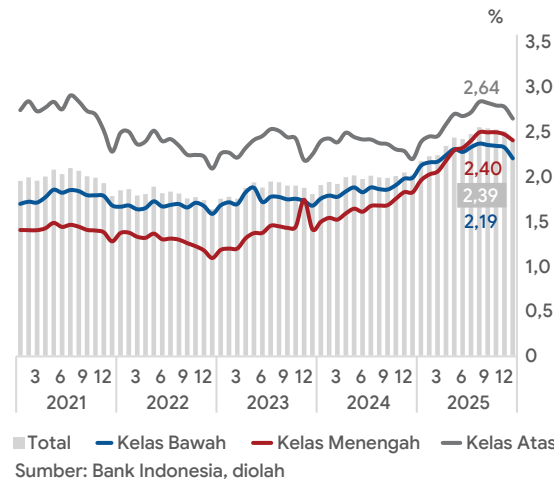
Grafik 3.2.8. Perkembangan NPL RT

masih terbatas (Grafik 3.2.9). Namun demikian, perlu diwaspadai tren NPL kredit konsumsi yang cenderung meningkat dan terjadi di seluruh kelas pendapatan (Grafik 3.2.10). Peningkatan risiko kredit tersebut terutama dikontribusikan oleh RT kelas bawah dan



Grafik 3.2.9. Perkembangan NPL RT per Jenis Kredit

menengah, khususnya pada segmen KPR nonsubsidi. Pada segmen tersebut, rasio NPL masing-masing tercatat sebesar 3,68% dan 4,41% pada akhir 2025, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir 2024 yang sebesar 3,32% dan 3,37%.



Grafik 3.2.10. Perkembangan NPL RT Berdasarkan Kelas Pendapatan

3.3 Ketahanan Nonbank Masih Terjaga

Risiko interkoneksi antara IKNB dan perbankan hingga akhir 2025 masih terbatas seiring dengan eksposur yang masih rendah. Perbankan memiliki eksposur dari IKNB melalui penempatan dana IKNB di perbankan atau penyaluran kredit perbankan ke IKNB. Penempatan dana PP dan pindar ke perbankan dalam bentuk DPK masih relatif terbatas, yaitu sebesar 0,60% terhadap total DPK pada Desember 2025 (Grafik 3.3.1). Demikian pula penyaluran kredit perbankan kepada PP dan pindar yang hanya 3,15% terhadap total kredit perbankan pada Desember 2025 (Grafik 3.3.2).

Ketahanan PP dan pindar masih terjaga. Risiko kredit PP relatif terjaga dan stabil didukung struktur pendanaan dan permodalan yang terkendali, tercermin dari NPF (*Non-Performing Financing*) sebesar 2,47% dan *Gearing Ratio* (GR) sebesar 2,15 kali pada Oktober 2025 (Grafik 3.3.3). NPF penyaluran BNPL oleh PP juga masih terjaga sebesar 2,79%. Selain itu, tingkat risiko dari penyaluran pindar

secara agregat masih terjaga rendah meski sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dari indikator tingkat wanprestasi 90 (TWP 90) sebesar 2,76% pada Oktober 2025 dari 2,37% pada Oktober 2024 (Grafik 3.3.4).



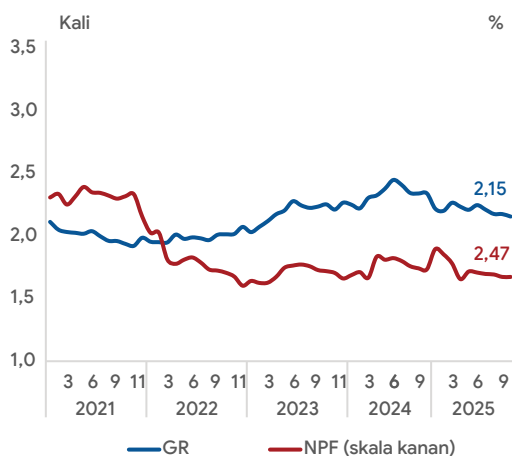
Grafik 3.3.1. Eksposur PP dan Pindar pada Total DPK Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

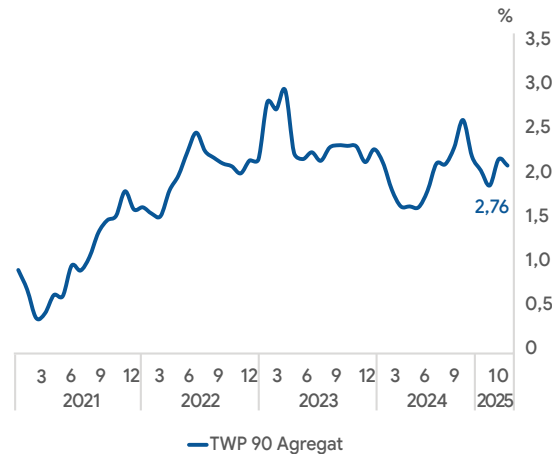
Grafik 3.3.2. Eksposur PP dan Pindar pada Total Kredit Perbankan

Dinamika pada periode semester II 2025 menunjukkan kinerja pasar saham domestik relatif terjaga. Kinerja IHSG meningkat sebesar 22,1% (yoy) dari 7079,9 pada Desember 2024 menjadi 8646,9 pada Desember 2025 ditopang oleh peningkatan aktivitas investor ritel domestik (Grafik 3.3.5). Hal ini turut didukung oleh penurunan suku bunga The Fed yang mendorong kembalinya arus modal asing ke pasar saham domestik. Seiring dengan perkembangan tersebut, tercatat adanya indikasi overvaluasi IHSG yang didorong oleh emiten berafiliasi dengan konglomerasi sebagaimana tercermin dari tren peningkatan PE Ratio dari 16,50 pada Desember 2024 menjadi 21,75 pada Desember 2025. Kondisi tersebut juga terlihat dari level valuasi IHSG Indonesia dalam setahun terakhir yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan bursa peers sehingga perlu diwaspadai lebih lanjut (Gambar 3.3.6).



Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.3.3. NPF dan GR Perusahaan Pembiayaan



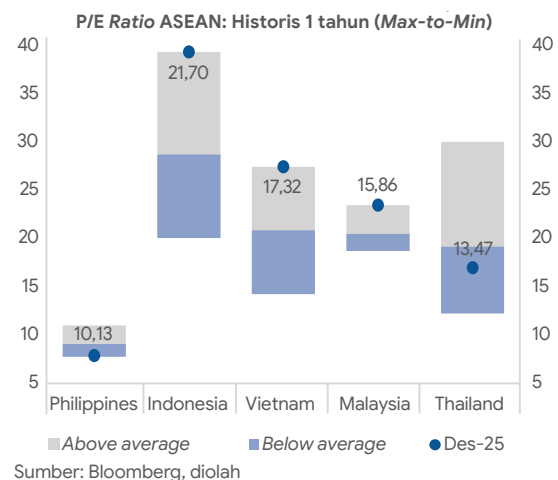
Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.3.4. TWP 90 Pinjaman Daring



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.3.5. Kinerja dan Valuasi IHSG



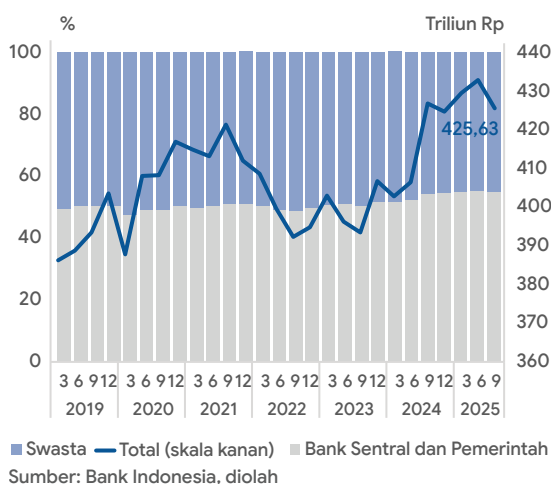
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.3.6. Valuasi Bursa Saham Kawasan ASEAN

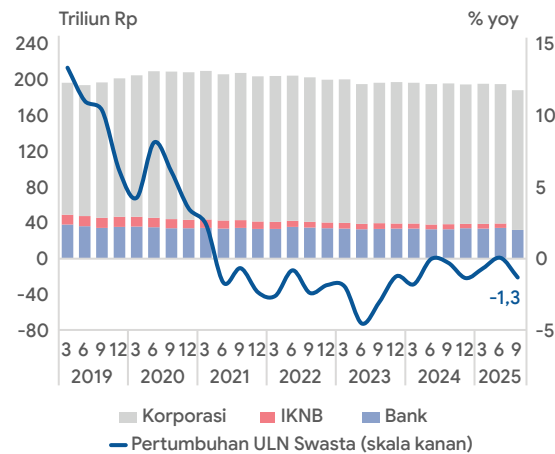
3.4 Perkembangan Risiko ULN Korporasi dan Perbankan

ULN swasta masih berkontraksi sejalan dengan kondisi pasar keuangan global dan ketidakpastian global yang masih tinggi. Dari total ULN Indonesia yang masih dalam tren meningkat sejak 2019, pangsa ULN oleh institusi swasta cenderung menurun (Grafik 3.4.1). ULN Swasta berkontraksi sebesar 1,3% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi periode yang sama tahun lalu sebesar 0,3% (yoy). Sektor Korporasi merupakan kontributor terbesar pada ULN swasta dibandingkan dengan institusi lain, yaitu bank dan IKNB (Grafik 3.4.2).

ULN korporasi relatif masih terjaga di tengah pertumbuhan yang masih berkontraksi sejak pandemi COVID-19. ULN korporasi masih berkontraksi sebesar 0,91% (yoy) pada triwulan III 2025. Penurunan ULN korporasi dipengaruhi oleh meningkatnya *cost of fund* yang didorong oleh kenaikan suku bunga global, seiring dengan perubahan *stance* kebijakan moneter global dan peningkatan premi risiko. Namun demikian, ketahanan ULN korporasi relatif tetap terjaga seiring dengan tingginya pangsa tenor jangka panjang dalam komposisi ULN sebagai fleksibilitas untuk likuiditas atau ekspansi usaha (Grafik 3.4.3).

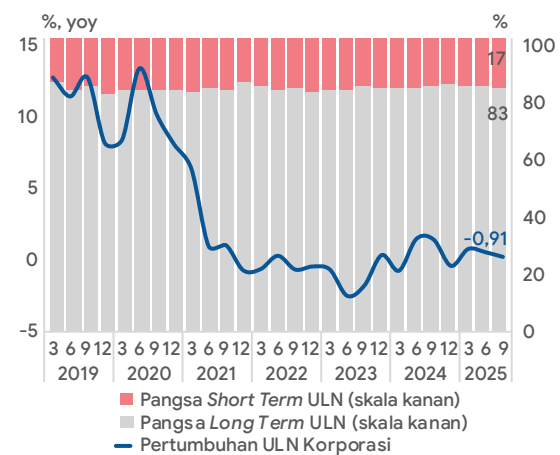


Grafik 3.4.1. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Institusi

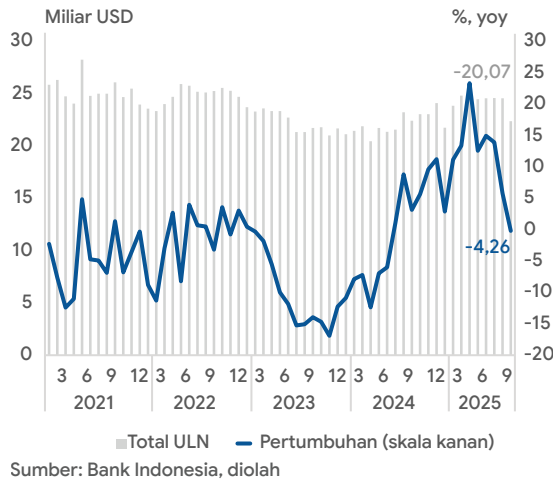


Grafik 3.4.2. Perkembangan ULN Swasta Menurut Institusi

ULN bank juga masih terjaga meskipun pertumbuhannya mulai menurun. Bank memanfaatkan ULN sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas dan pembiayaan valas. Walaupun tren ULN perbankan masih meningkat, pertumbuhannya tercatat menurun menjadi sebesar 4,28% (yoy) pada Oktober 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,66%

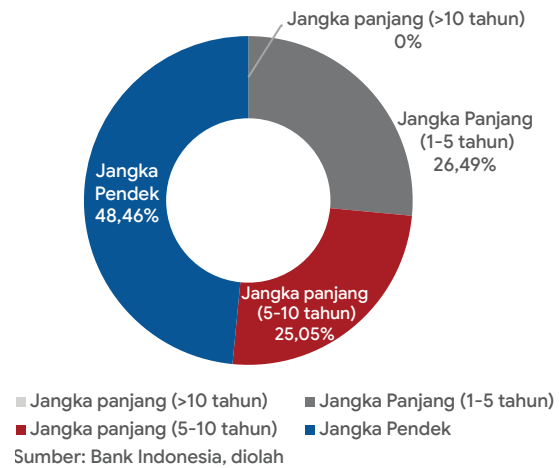


Grafik 3.4.3. Perkembangan ULN Korporasi Nonkeuangan dan Pangsa Berdasarkan Tenor

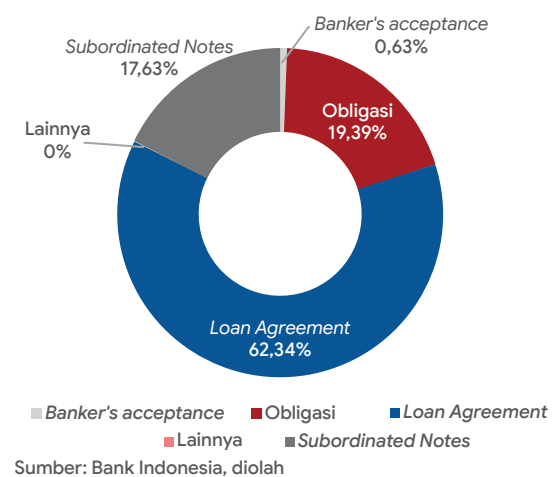


Grafik 3.4.4. Perkembangan Outstanding ULN Bank

(yoy). Pertumbuhan yang menurun menyebabkan nominal ULN menurun dari USD 23,06 miliar pada Oktober 2024 menjadi USD 22,07 miliar (Grafik 3.4.4). Ketahanan ULN perbankan masih terjaga, didukung oleh dominasi tenor jangka panjang dengan pangsa sebesar 51,54% dan jenis *loan agreement* dengan pangsa sebesar 62,34% (Grafik 3.4.5 dan Grafik 3.4.6). Preferensi ini menunjukkan orientasi perbankan terhadap stabilitas pendanaan, serta mitigasi risiko atas tekanan likuiditas dan fluktuasi nilai tukar.



Grafik 3.4.5. Posisi Outstanding ULN Jangka Panjang Bank Berdasarkan Jatuh Tempo



Grafik 3.4.6. Posisi Outstanding ULN Berdasarkan Jenis

Boks 3.1

Penguatan Ketahanan Sektor Keuangan dari Krisis Secara Terintegrasi Sebagai Bagian Menjaga SSK

Berbagai tantangan yang bersifat multidimensi terhadap stabilitas sistem keuangan menggarisbawahi pentingnya protokol manajemen krisis (PMK) yang lebih komprehensif. Tingginya dinamika global dan tantangan domestik, akselerasi digitalisasi, inovasi instrumen di sektor keuangan, serta cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial berpotensi memberikan tekanan secara sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan yang dapat memicu krisis di sektor keuangan. Tantangan semakin meningkat sejalan dengan frekuensi

terjadinya krisis yang cenderung meningkat dengan berbagai jenis pemicu dan siklus antarkrisis yang semakin pendek. Pemicu krisis tidak lagi hanya berasal dari faktor makroekonomi, seperti eksposur utang luar negeri yang tinggi atau konflik perdagangan. Faktor nonekonomi, seperti serangan siber atau kerusuhan sosial, semakin berpengaruh terhadap kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan mungkin berdampak satu sama lain secara sistemik, misalnya tekanan nilai tukar dapat

memicu kerusuhan sosial atau serangan siber terhadap infrastruktur keuangan sistemik dapat memicu gangguan perbankan. Untuk itu, bank sentral memerlukan PMK yang memiliki respons cepat, terkoordinasi, dan *seamless* melalui PMK yang mengintegrasikan area kebijakan untuk mendeteksi gangguan karena faktor makroekonomi dan area kelembagaan untuk mendeteksi gangguan karena faktor nonekonomi. Area kebijakan mencakup kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas eksternal, kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan sistem pembayaran untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran. Adapun area kelembagaan berorientasi pada tata kelola, kecukupan dan keberlanjutan keuangan, dan operasional.

PMK Terintegrasi (PMKT) sangat relevan untuk mendukung upaya penguatan ketahanan sektor keuangan seiring adanya interaksi erat antara faktor ekonomi dan nonekonomi, khususnya aspek operasional. Melalui PMKT, deteksi dini dan protokol yang antisipatif dapat mencegah adanya kemungkinan eskalasi risiko yang meluas seiring dengan interaksi yang semakin kuat antara faktor ekonomi dan nonekonomi dalam memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Di tahap awal, kerangka kerja PMKT menekankan pentingnya deteksi dini potensi risiko secara terintegrasi dari area kebijakan dan kelembagaan serta mengedepankan langkah *preparedness*, antara lain melalui penyiapan *crisis binder* dan pelaksanaan simulasi krisis secara berkala, guna memastikan kesiapan institusi dalam menghadapi potensi eskalasi risiko yang menjalar lebih luas. Tahap ini berorientasi pada upaya mencegah propagasi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan berbagai pihak apabila eskalasi propagasi risiko tidak dapat dikendalikan. Di tahap selanjutnya, apabila sinyal menuju tanda-tanda pemburukan atau potensi krisis semakin jelas, ditempuh langkah pencegahan (*prevention*) melalui berbagai instrumen kebijakan pencegahan krisis yang tersinergi antarotoritas. Dalam hal krisis sistem keuangan tidak terhindarkan, protokol penanganan krisis melalui upaya *resolution* dan *recovery* segera diaktifkan secara terkoordinasi dan terukur melalui sinergi antarotoritas untuk membatasi dampak lebih jauh dan memulihkan stabilitas sistem keuangan lebih cepat sehingga tidak menimbulkan biaya yang lebih besar.

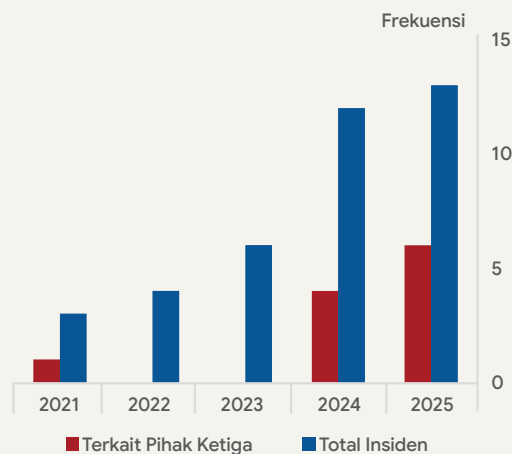
PMKT memastikan protokol internal yang *seamless* dan koordinasi yang kuat dengan otoritas terkait dalam langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Secara internal di Bank Indonesia, instrumen kebijakan dirumuskan secara terstruktur untuk memastikan efektivitas dan kecukupan kebijakan dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, didukung prosedur operasional standar yang jelas serta peraturan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan tata kelola yang memadai. Dengan eksternal, Bank Indonesia menjaga dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait dalam kerangka KSSK melalui sinergi kebijakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat PMKT dalam mendukung terjaganya ketahanan dan stabilitas sistem keuangan. Melalui penguatan indikator PMKT untuk deteksi dini potensi eskalasi risiko, surveilans sistem keuangan untuk memantau kondisi sektor keuangan secara intens, serta koordinasi di tingkat nasional melalui KSSK, Bank Indonesia terus memperkuat PMKT untuk meningkatkan efektivitas protokol pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Bank Indonesia. Penguatan indikator PMKT menjadi bagian paling kritical dalam sistem peringatan dini dan alat pemantauan yang memungkinkan otoritas mendeteksi secara dini potensi krisis serta merespons secara cepat dan tepat. Memanfaatkan *big data analysis*, penguatan indikator dapat menangkap sinyal risiko yang nonlinear, berfrekuensi tinggi, dan bersumber dari berbagai kanal. Selanjutnya, indikator perlu dikalibrasi secara berkala untuk memastikan tetap relevan dan andal sesuai perkembangan lingkungan strategis. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasan secara terintegrasi pada bidang makroprudensial, moneter dan *market*, serta sistem pembayaran berbasis digital dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan PMKT dilakukan melalui koordinasi lintas otoritas, baik secara bilateral maupun dalam kerangka KSSK, untuk memastikan respons kebijakan sejalan dengan arah kebijakan stabilitas sistem keuangan nasional.

Boks 3.2

Risiko Operasional dari Pihak Ketiga dan Potensi Dampaknya Terhadap SSK

Risiko operasional dari pihak ketiga (*third party*) cenderung meningkat seiring kompleksnya struktur operasional dan pemanfaatan teknologi digital pada industri keuangan. Pihak ketiga memiliki peran penting dalam proses bisnis sistem keuangan, serta terkoneksi secara operasional kepada lembaga keuangan seperti bank, nonbank, dan regulator. Pengaturan dan pengawasan terhadap pihak ketiga yang relatif lebih longgar dibandingkan Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) dapat berpotensi menjadi celah untuk memperoleh akses tidak sah (*unauthorized access*) ke dalam sistem. Insiden terkait risiko pihak ketiga dapat berupa serangan siber, penyalahgunaan sistem, dan berbagai *fraud*. Dalam lima tahun terakhir, risiko operasional dari pihak ketiga pada sistem keuangan domestik cenderung meningkat. Berdasarkan data pengawasan Bank Indonesia, tercatat enam dari tiga belas insiden siber terkait dengan pihak ketiga pada PSP yang merupakan perbankan (Grafik B3.2.1).



Grafik B3.2.1. Jumlah Insiden Siber di Perbankan Indonesia

Insiden risiko operasional yang bersumber dari pihak ketiga berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Risiko dapat berupa kerugian finansial, gangguan operasional, maupun penurunan kepercayaan (risiko reputasi) terhadap lembaga keuangan. Risiko menjadi semakin material ketika pihak ketiga merupakan penyedia layanan kritikal pada banyak lembaga keuangan secara simultan (*common exposure*). Dalam kondisi tersebut, terdapat potensi *single point of failure* yang memicu efek rambatan (*contagion effect*) lintas lembaga, sehingga risiko operasional dapat tereskalasi menjadi risiko sistemik (FSB, 2020). Tanpa adanya mitigasi yang memadai, eskalasi risiko tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja dan ketahanan individual lembaga keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia meningkatkan efektivitas pengawasan dan penguatan kapabilitas pelaku industri untuk memitigasi risiko operasional dari pihak ketiga. Sebagai regulator, Bank Indonesia terus memastikan bahwa seluruh kerja sama antara PSP dan pihak ketiga senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta memiliki ketahanan yang memadai terhadap risiko yang berkembang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan *onsite* yang berfokus pada asesmen berbasis kepatuhan dan risiko atas penerapan manajemen risiko operasional sistem pembayaran serta keandalan infrastruktur teknologi informasi pada PSP. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan *offsite* melalui pemeriksaan secara berkala atas penyediaan layanan sistem pembayaran oleh PSP. Cakupan pemantauan meliputi kepatuhan terhadap ketentuan, kinerja operasional PSP, serta ketahanan PSP dalam menghadapi tren risiko industri yang terus berkembang. Selain itu, Bank

Indonesia memperkuat kesadaran dan kapabilitas pelaku industri terhadap tren perkembangan risiko yang bersifat dinamis melalui kegiatan *information sharing* secara berkala antar regulator dan pelaku industri.

Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka pengaturan untuk meningkatkan resiliensi ekosistem sistem pembayaran secara menyeluruh. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP) telah diterbitkan Bank Indonesia untuk menata industri Sistem Pembayaran nasional untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sesuai Blueprint

Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Ke depan, ketentuan akan diperkuat dengan memperluas cakupan pengaturan, tidak hanya kepada PSP, tetapi juga pihak yang bekerja sama dengan PSP, guna memastikan penerapan standar manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi informasi secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa berkoordinasi erat dengan regulator lain, pelaku industri, dan *self-regulating organization*, termasuk diantaranya melalui pembentukan dan pelaksanaan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan sebagai forum koordinasi lintas otoritas yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, dan Badan Sandi Siber Negara.

Bab 4

KEUANGAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN TERUS DIKEMBANGKAN

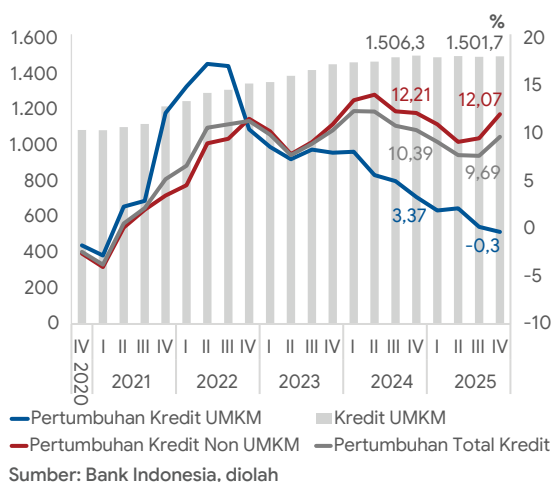
Pembiayaan kepada segmen UMKM mengalami kontraksi seiring dengan kinerja UMKM yang masih terbatas. Kredit UMKM terpantau mengalami kontraksi pada beberapa bulan di semester II 2025 seiring meningkatnya keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit ke segmen ini. Standar penyaluran kredit UMKM yang tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) pada triwulan IV 2025 terindikasi lebih ketat, terutama pada aspek plafon kredit, jangka waktu, agunan, dan persyaratan administrasi. Hal ini sejalan dengan penurunan kinerja UMKM terutama di sektor Industri Pengolahan dan Jasa akibat melemahnya permintaan. Pelemahan kredit UMKM sejalan dengan kenaikan risiko kredit, terutama pada segmen mikro dan menengah. Perlambatan kredit terjadi terutama pada sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Jasa, dan Konstruksi yang dipengaruhi penurunan permintaan, kenaikan biaya, keterbatasan kapasitas, dan berkurangnya proyek. Sementara pertumbuhan kredit yang terbatas masih tercatat di sektor Real Estate, Pertanian, Transportasi, dan Akomodasi berkat dukungan realisasi program Pemerintah. Bank Indonesia terus mendorong penguatan UMKM antara lain melalui strategi pemberdayaan, digitalisasi, business matching, serta sinergi lintas otoritas.

Pembiayaan berkelanjutan dan syariah tetap tumbuh relatif stabil dengan kualitas dan risiko yang terjaga. Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) berwawasan lingkungan mengalami tren peningkatan antara lain didorong oleh insentif pajak Pemerintah untuk kendaraan listrik, sementara KPR hijau masih tumbuh kuat meski menurun yang dipengaruhi oleh prospek perkembangan harga properti. Secara umum, perkembangan pembiayaan berkelanjutan masih dipengaruhi oleh tingginya persepsi risiko terkait proyek/produk berkelanjutan. Adapun Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah masih tumbuh stabil terutama ditopang oleh nasabah segmen RT dan korporasi. Laju ekspansi intermediasi syariah dipengaruhi kondisi pendanaan perbankan syariah yang masih didominasi dana berbiaya relatif tinggi dan strategi sebagian perbankan syariah yang memprioritaskan perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan manajemen risiko. Seiring dengan dinamika perubahan struktural industri, khususnya spin-off perbankan syariah, ekspansi PYD dilakukan secara lebih selektif. Bank Indonesia memperkuat intermediasi keuangan inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan makroprudensial hijau, penguatan ekosistem dan perluasan akses pembiayaan, serta penguatan literasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor UMKM, ekonomi hijau dan ekonomi syariah. Hal tersebut ditujukan untuk menopang stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

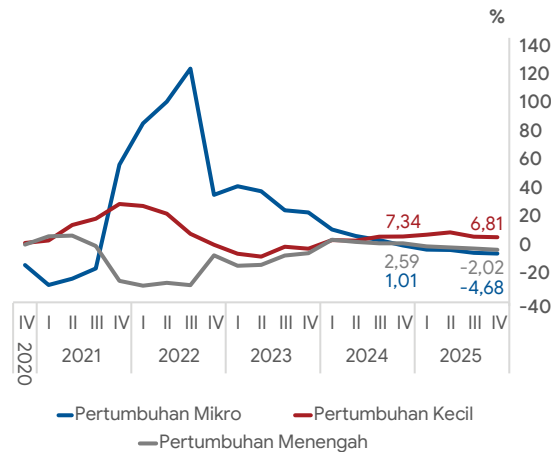
4.1

Pembiayaan Inklusif: Mendorong Pembiayaan UMKM Sebagai Penopang Ekonomi

Kredit UMKM mengalami kontraksi seiring dengan *repayment capacity* masyarakat berpenghasilan rendah yang masih terbatas sehingga meningkatkan kehati-hatian pemberian kredit dari perbankan. Pada Desember 2025, pertumbuhan kredit UMKM terkontraksi sebesar 0,30% (yoy), sedangkan periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh positif sebesar 3,37% (yoy) (Grafik 4.1.1). Berdasarkan jenis kredit, pertumbuhan kredit UMKM skala mikro dan menengah masing-masing terkontraksi sebesar 4,68% (yoy) dan 2,02% (yoy) pada Desember 2025, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing tumbuh sebesar 1,01% dan 2,59% (yoy) pada Desember 2024. Sementara itu, kredit UMKM skala kecil tumbuh positif, yaitu sebesar 6,81% (yoy) pada Desember 2025, namun lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,34% (yoy) (Grafik 4.1.2). Terjadinya perlambatan kredit UMKM skala mikro dan menengah dipengaruhi oleh kecenderungan peningkatan NPL UMKM sehingga perbankan lebih selektif dalam pemberian kredit/ pembiayaan pada kedua segmen tersebut. Daya beli masyarakat yang terbatas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan faktor yang mendorong peningkatan risiko kredit UMKM. Di sisi lain, pertumbuhan kredit UMKM pada skala kecil didorong oleh kinerja yang lebih baik dan akses yang lebih besar kepada rantai pasok, sehingga minat perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM skala kecil masih terjaga.



Grafik 4.1.1. Pertumbuhan Kredit dan Kredit UMKM



Grafik 4.1.2. Perkembangan Kredit UMKM per Segmen

Perlambatan kredit UMKM terutama dikonstruksikan oleh sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Jasa dan Konstruksi. Kredit UMKM di sektor Perdagangan pada Desember 2025 terkontraksi sebesar 4,07% (yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 0,87 % (yoy) (Tabel 4.1.1). Kontraksi kredit UMKM di sektor Perdagangan tersebut tercatat paling dalam dibandingkan kontraksi kredit pada dua sektor lainnya, yaitu Industri Pengolahan dan Konstruksi. Beberapa faktor yang memengaruhi pelemahan kinerja UMKM di sektor Perdagangan antara lain daya beli terbatas, kenaikan harga, dan persaingan usaha yang semakin ketat. Demikian halnya dengan perlambatan kredit UMKM di sektor Industri Pengolahan juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya bahan baku, kapasitas produksi yang terbatas, dan masih banyaknya UMKM yang belum terhubung ke rantai pasok. Pertumbuhan kredit UMKM di sektor Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 3,77% (yoy), lebih lambat dibandingkan kinerja pada Desember 2024 yang tumbuh positif sebesar 2,96% (yoy). Pada sektor Konstruksi, kredit UMKM terkontraksi sebesar 2,96% (yoy), lebih dalam dari periode yang sama tahun sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 0,13% (yoy). Berkurangnya proyek pembangunan yang ditangani oleh UMKM turut berkontribusi terhadap penurunan kredit UMKM di sektor Konstruksi.

Pertumbuhan UMKM yang positif tercatat di sektor Real Estate, Pertanian, Transportasi, dan Akomodasi. Pada Desember 2025, kredit UMKM untuk sektor *Real Estate* dan Pertanian masing-masing tercatat tumbuh sebesar 8,65% dan 5,35% (yoy), namun lebih lambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,16% dan 6,90% (Tabel 4.1.1). Kredit UMKM di sektor *Real Estate* a.l. didukung oleh program Insentif PPN Ditanggung Pemerintah, sementara di sektor Pertanian didukung oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah. KUR disalurkan terutama pada komoditas pertanian padi untuk pemenuhan kebutuhan benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Kredit UMKM pada sektor Transportasi dan Komunikasi juga tumbuh sebesar 4,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,75% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM pada sektor Transportasi dan Komunikasi yang masih positif tersebut didukung oleh program stimulus Pemerintah, antara lain diskon tarif tol dan diskon tarif transportasi. Pada sektor Akomodasi, kredit UMKM tumbuh positif sebesar 3,53% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,77% (yoy). Pertumbuhan positif di sektor ini sejalan dengan dukungan Pemerintah di sektor Pariwisata yang diwujudkan antara lain melalui diskon tiket pesawat, kereta api, serta pengembangan desa wisata.

Penyaluran kredit UMKM terbatas sebagaimana tercermin dari standar penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 yang terindikasi masih ketat. Kondisi ini terlihat dari perkembangan ILS yang

menunjukkan standar penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 sebesar 4,40, melanjutkan level ILS yang relatif tinggi meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,91 (Grafik 4.1.3)¹³. Standar penyaluran kredit UMKM yang masih ketat terutama terlihat pada aspek plafon kredit, jangka waktu, agunan dan persyaratan administrasi. Tingginya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM tersebut dipengaruhi oleh tren kenaikan rasio NPL pada segmen UMKM yang lebih tinggi dari rasio NPL kredit non-UMKM, terutama kredit pada segmen mikro dan menengah (Grafik 4.1.4).

Perlambatan kredit UMKM sejalan dengan kinerja UMKM yang masih terus ditingkatkan. Indeks Kinerja UMKM¹⁴ pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 132,2, turun dari 134,4 pada triwulan IV 2024 (Grafik 4.1.5). Penurunan tersebut terutama terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Jasa (Grafik 4.1.6). Pada sektor Industri Pengolahan, kinerja UMKM menurun dari 141,1 menjadi 139,3. Adapun pada sektor Jasa, kinerja UMKM menurun dari 147,0 menjadi 130,0. Penurunan kinerja UMKM pada kedua sektor tersebut utamanya disebabkan penurunan permintaan. Namun demikian, kinerja UMKM yang lebih baik di sektor Pertanian dan Perdagangan

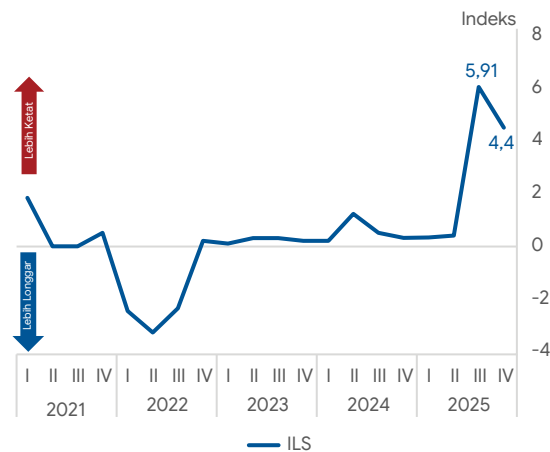
13 ILS adalah indeks yang mencerminkan persyaratan pencairan kredit perbankan untuk debitur, berdasarkan survei Bank Indonesia terhadap perbankan.

14 Indeks Kinerja UMKM merupakan hasil survei Bank Indonesia untuk mengetahui kondisi penjualan UMKM yang dilakukan terhadap 600 UMKM binaan Bank Indonesia

Tabel 4.1.1. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor	Pertumbuhan (% ,yoy)					Pangsa
	Nov-24	Des-24	Jun-25	Nov-25	Des-25	Des-25
Perdagangan	1,50%	0,87%	-0,33%	-3,88%	-4,07%	44,20%
Pertanian	9,07%	6,90%	7,01%	4,46%	5,35%	18,40%
Industri Pengolahan	3,65%	2,96%	-1,63%	-3,98%	-3,77%	5,70%
Jasa Kemasyarakatan	9,78%	8,03%	2,87%	-1,35%	-2,31%	5,70%
Akomodasi	8,13%	6,77%	5,10%	3,56%	3,53%	4,90%
Transportasi & Komunikasi	8,20%	11,75%	10,81%	2,96%	4,40%	4,10%
Real Estate	7,36%	7,16%	4,64%	7,20%	8,65%	4,20%
Konstruksi	-1,60%	-0,13%	-4,32%	-4,85%	-2,96%	3,50%
Total UMKM	4,02%	3,37%	2,18%	-0,64%	-0,30%	

Sumber: Bank Indonesia, diolah

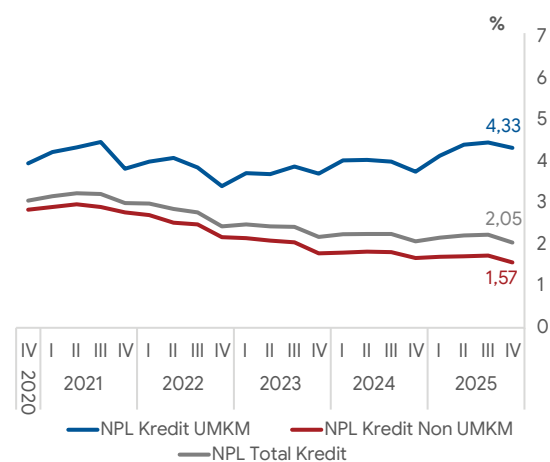


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.3. Indeks Lending Standard Kredit UMKM

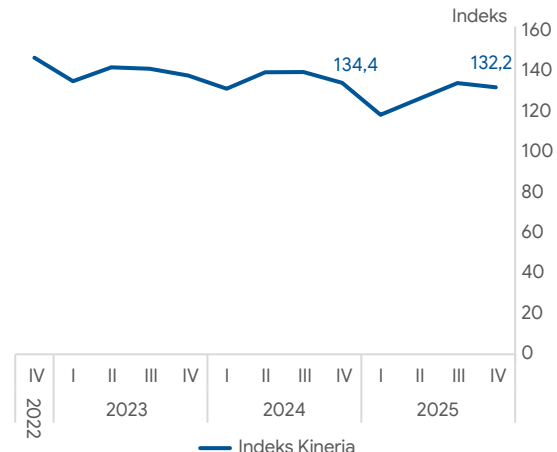
mampu menahan pemburukan kinerja UMKM secara keseluruhan. Kinerja UMKM yang secara umum menurun, berdampak pada terbatasnya akses kepada kredit/pembiayaan perbankan. Adapun UMKM yang masih dapat mengakses kredit perbankan, memprioritaskan penggunaan kredit untuk pengadaan bahan baku dan operasional usaha.

Untuk mendorong permintaan kredit, Bank Indonesia mendukung UMKM melalui strategi pemberdayaan dan pembiayaan UMKM, serta mendorong peningkatan edukasi dan literasi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi teknologi digital, *onboarding* dalam *e-commerce*, menghubungkan UMKM dengan rantai pasok melalui pola kemitraan, membuka akses dan memperluas pasar ekspor, melakukan hilirisasi produk serta menerapkan model bisnis hijau. Berbagai aktivitas Bank Indonesia untuk



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.4. Rasio Non-Performing Loan Kredit UMKM dan Non UMKM Perbankan

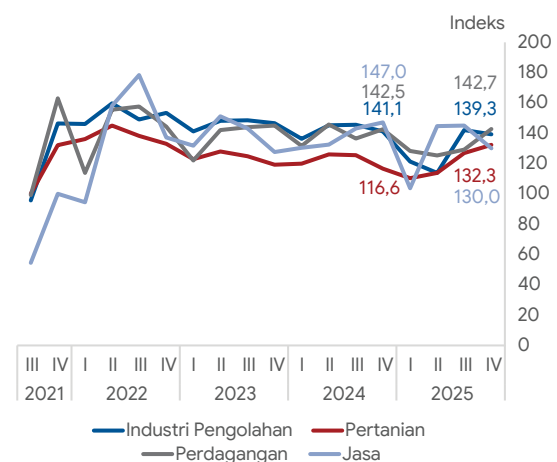


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.5. Indeks Kinerja UMKM

memperkuat daya tawar UMKM mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, pendampingan operasional, fasilitasi pertemuan bisnis serta promosi perdagangan. Selain itu, Bank Indonesia terus mendorong perluasan akses kredit melalui *business matching* UMKM dengan lembaga keuangan, penyediaan data/informasi serta digitalisasi pencatatan keuangan yang akan meningkatkan *bankability* UMKM. Sinergi Bank Indonesia dengan berbagai pihak terus berjalan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Selain dukungan kepada UMKM, Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan kelompok subsisten sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi ekonomi.

Pada 2025, Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai flagship program Bank Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi UMKM dengan capaian ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.6. Indeks Kinerja UMKM per Sektor

sebelumnya. KKI 2025 merupakan sinergi Bank Indonesia dengan 24 kementerian/lembaga. KKI berhasil melibatkan 1.498 UMKM¹⁵, meningkat 16% (yoy), dengan jumlah pengunjung tercatat mencapai 162.635 orang, meningkat 8% (yoy), dibandingkan pengunjung KKI tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap produk UMKM nasional ditengah dinamika perkembangan ekonomi domestik. Sepanjang periode penyelenggaraan, total perolehan omzet dan *business matching* ekspor mencapai Rp636,0 miliar, meningkat 64% (yoy). Jumlah tersebut ditopang oleh omzet penjualan sebesar Rp173,4 miliar atau tumbuh 41% (yoy), dan nilai *business matching* ekspor sebesar Rp462,6 miliar, meningkat 75% (yoy), terdiri dari realisasi ekspor dan penandatanganan kesepakatan bisnis. Capaian *business matching* ekspor adalah berhasil menghubungkan 455 UMKM yang berorientasi ekspor binaan Bank Indonesia dan kementerian/lembaga

15 Terdiri dari 364 UMKM peserta luring dan 1.134 UMKM peserta daring dari 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri serta binaan kementerian/lembaga

dengan pembeli potensial dan agregator ekspor dari 18 negara, yaitu Indonesia, Australia, Brunei, Kanada, China, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, dan Amerika Serikat.

Bank Indonesia juga mendorong penguatan akses pembiayaan UMKM dengan memfasilitasi *business matching* pembiayaan yang lebih terarah. Pada 2025, KKI menghubungkan 314 UMKM dan 17 UMKM Hijau dengan 11 lembaga keuangan, dengan total nilai komitmen pembiayaan mencapai Rp320,0 miliar, meningkat 70% (yoy). Pembiayaan tersebut terutama ditopang oleh pembiayaan UMKM konvensional sebesar Rp224,0 miliar, seiring dengan mulai berkembangnya pembiayaan UMKM hijau sebesar Rp96,0 miliar yang mencerminkan semakin terintegrasinya agenda inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan UMKM. Penguatan kualitas intermediasi pembiayaan ini turut mendukung ketahanan dan memperkuat kontribusi UMKM terhadap stabilitas sistem keuangan.

4.2

Pembiayaan Berkelanjutan: Optimalisasi Pembiayaan ke Sektor-Sektor yang Berorientasi pada Prinsip Keberlanjutan

Penyaluran kredit berkelanjutan terus tumbuh positif dan masih memiliki potensi untuk didorong lebih lanjut. Pertumbuhan KKB hijau atau KKB berwawasan lingkungan¹⁶ tumbuh kuat antara lain didorong oleh insentif pajak Pemerintah untuk kendaraan listrik¹⁷. Pertumbuhan KKB hijau pada Desember 2025 sebesar 70,08% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 86,06% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KPR hijau atau kredit properti

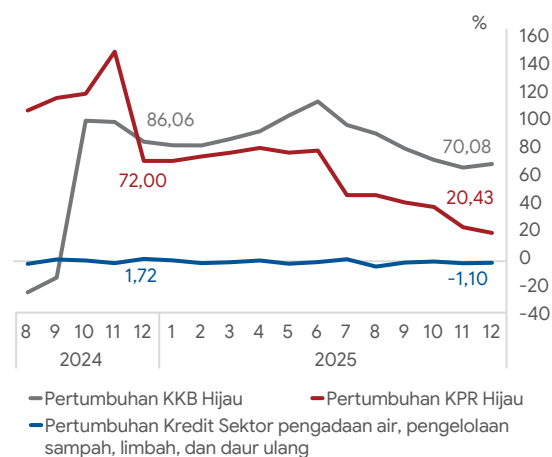
berwawasan lingkungan¹⁸ juga tercatat positif sebesar 20,43% (yoy), melanjutkan pertumbuhan tahun 2024 yang lebih tinggi sebesar 72% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh program Insentif PPN Ditanggung Pemerintah di tengah terbatasnya *repayment capacity* rumah tangga dan prospek perlambatan pertumbuhan harga properti. Perilaku kehati-hatian perbankan yang lebih tinggi berdampak pada terbatasnya pertumbuhan KPR, termasuk KPR hijau. Kredit berkelanjutan lainnya di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mengalami kontraksi pada bulan Desember 2025 sebesar 1,10% (yoy), menurun dari Desember 2024 yang tumbuh sebesar 1,72% (yoy). Penurunan ini turut disebabkan oleh peningkatan persepsi risiko pendanaan di sektor tersebut karena adanya pungutan retribusi pada pengelolaan sampah di Indonesia¹⁹ (Grafik 4.2.1).

16 PBI No. 23/2/PBI 2021: Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang merupakan kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

18 PBI No. 23/2/PBI 2021: Properti Berwawasan Lingkungan adalah Properti yang memenuhi kriteria bangunan hijau sesuai dengan standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional.

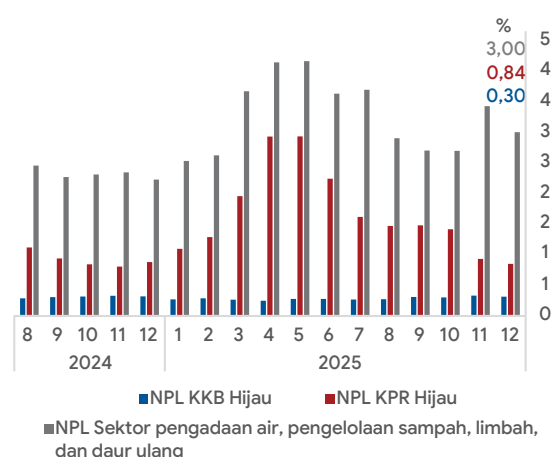
19 https://www.stopoceanplastics.com/wp-content/uploads/2023/06/Systemiq_Mobilizing-Blended-Finance-for-Waste-Management_IN_final-1-compressed-1.pdf.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2.1. Pertumbuhan KPR Hijau, KKB Hijau, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Perkembangan kredit hijau didukung oleh risiko kredit yang masih terjaga. Rasio NPL KKB hijau atau KKB berwawasan lingkungan pada Desember 2025 masih stabil terjaga sebagaimana posisi Desember 2024, masing-masing sebesar 0,30%. Di sisi lain, rasio NPL KPR berwawasan lingkungan juga masih terjaga sebesar 0,84% pada Desember 2025, sedikit menurun dibandingkan Desember 2024 sebesar 0,87%. Sementara itu, risiko kredit untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang tercatat meningkat dengan rasio NPL pada Desember 2025 sebesar 3,00% dari posisi Desember 2024 sebesar 2,22%. Walaupun risiko kredit di sektor tersebut meningkat, namun masih terjaga di bawah 5%. (Grafik 4.2.2).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2.2. Rasio NPL KPR dan KKB Hijau

Sejalan dengan pertumbuhan kredit berkelanjutan, penyaluran KLM pada sektor berkelanjutan juga mengalami kenaikan. Sejak Desember 2025, penyaluran insentif KLM pada sektor berkelanjutan diperkuat menjadi insentif KLM kepada sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan berwawasan lingkungan. Dalam penguatan ini, penghitungan insentif difokuskan pada pencapaian pertumbuhan dan pangsa kredit ke sektor berkelanjutan tersebut terhadap total kredit. Pada posisi Desember 2025²⁰, total insentif KLM kepada sektor berkelanjutan (termasuk UMKM dan inklusi) mencapai Rp78,09 triliun. Sementara itu, penyaluran insentif KLM pada posisi Desember 2024²¹ dengan cakupan masih terbatas pada KKB hijau dan KPR berwawasan lingkungan tercatat sebesar Rp28,69 triliun²². Melalui penguatan KLM ke sektor berkelanjutan, kredit ke sektor berkelanjutan diharapkan akan terus tumbuh secara berkesinambungan.

Bank Indonesia mendukung pembiayaan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan makroprudensial, strategi pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan edukasi dan literasi serta sinergi dan kolaborasi. Kebijakan keuangan berkelanjutan Bank Indonesia dilaksanakan untuk memastikan ketahanan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan terhadap peningkatan risiko iklim. Dalam hal ini, Bank Indonesia berupaya mendorong akses pembiayaan yang lebih luas bagi sektor beremisi rendah, termasuk pada segmen UMKM. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia telah mengimplementasikan 3 (tiga) kebijakan makroprudensial hijau yaitu (i) kebijakan relaksasi *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)* untuk KPR dan KKB berwawasan lingkungan; (ii) KLM untuk jenis kegiatan berwawasan lingkungan (KPR dan KPR hijau) dan kredit/pembiayaan kepada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta UMKM, Koperasi, dan Inklusi; dan (iii) kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM)

21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

22 Dengan penghitungan yang berfokus pada pencapaian pangsa KKB hijau dan KPR hijau terhadap total kredit

(RPIM) dengan memperluas modalitas pemenuhan target RPIM melalui kepemilikan surat berharga untuk inisiatif/proyek berkelanjutan²³. Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan UMKM melalui fasilitas *business matching*, penyediaan data dan informasi yang relevan, perluasan akses keuangan hijau, serta digitalisasi pencatatan keuangan. Dalam

hal ini, penguatan kapasitas pelaku usaha dan perbankan, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, pengembangan model bisnis berkelanjutan, peningkatan transparansi informasi pembiayaan hijau, serta literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan hijau terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan edukasi.

23 Detil kebijakan Bank Indonesia dapat dibaca pada Bab 5

4.3

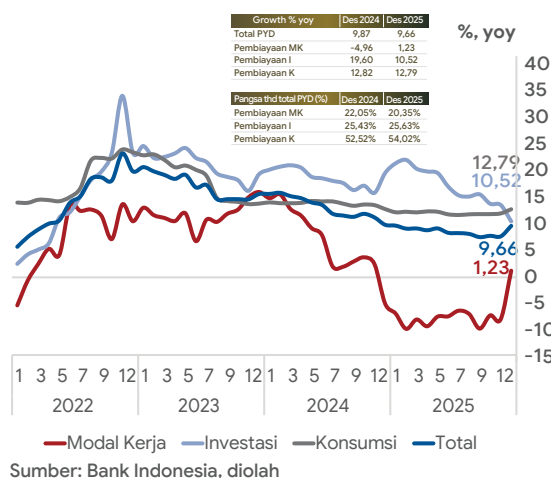
Pembiayaan Syariah: Mendorong Pembiayaan Untuk Mendukung Penguatan Rantai Ekonomi Halal

PYD perbankan syariah masih tumbuh stabil, mencapai 9,66% (yoy) pada Desember 2025, dari 9,87% (yoy) pada akhir 2024. Pertumbuhan positif PYD perbankan syariah disumbang oleh pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja yang masing-masing tercatat yoy sebesar 12,79%, 10,52%, dan 1,23%. Pertumbuhan tersebut relatif terjaga dibandingkan periode sebelumnya sebesar 12,82% (yoy), 19,6% (yoy), dan -4,96% (yoy) (Grafik 4.3.1). Ketiga jenis PYD tersebut memiliki porsi masing-masing sebesar 54,02% untuk pembiayaan konsumsi, 25,63% untuk pembiayaan investasi, dan 20,35% untuk pembiayaan modal kerja.

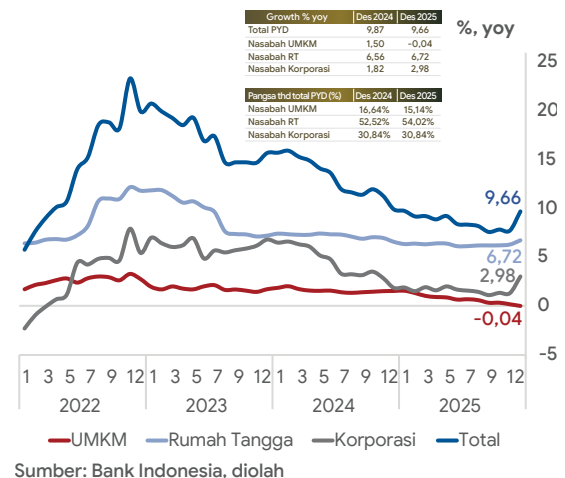
Dari sisi segmen nasabah, PYD perbankan syariah masih ditopang oleh nasabah RT dan korporasi. Pertumbuhan positif PYD perbankan syariah disumbang oleh pembiayaan bagi nasabah RT dan korporasi, yang masing-masing tercatat sebesar 6,72% (yoy) dan 2,98% (yoy) pada Desember 2025, meningkat dibandingkan akhir tahun sebelumnya

yaitu 6,56% (yoy) dan 1,82% (yoy). Sementara itu, pembiayaan bagi nasabah UMKM berkontraksi sebesar 0,04% (yoy) pada Desember 2025 dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1,5% (yoy) (Grafik 4.3.2). Adapun porsi pembiayaan yang disalurkan kepada ketiga jenis nasabah tersebut, masing-masing sebesar 54,0% untuk nasabah RT, 30,8% untuk nasabah korporasi, dan 15,2% untuk nasabah UMKM.

Perlambatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada 2025 mencerminkan respons intermediasi yang lebih berhati-hati di tengah dinamika global dan domestik. Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi prospek pertumbuhan dan menahan ekspansi aktivitas investasi, sehingga mendorong pelaku usaha untuk *wait and see* sedangkan perbankan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan. Di sisi domestik, kondisi pendanaan perbankan syariah yang masih didominasi biaya dana relatif tinggi, membatasi



Grafik 4.3.1. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



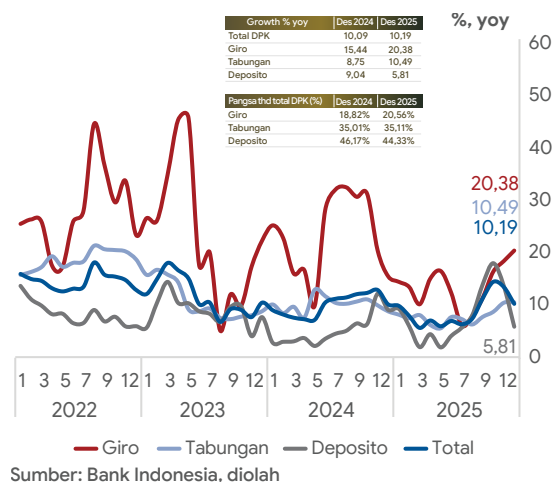
Grafik 4.3.2. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Segmen Nasabah

ruang penyesuaian *pricing* pembiayaan, sehingga menahan laju ekspansi intermediasi. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat tertahan khususnya pada kelompok menengah ke bawah termasuk UMKM, risiko permintaan pembiayaan meningkat dan mendorong perbankan syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih kuat dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu, strategi konsolidasi internal melalui perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan manajemen risiko masih menjadi prioritas sebagian perbankan syariah.

PYD perbankan syariah turut dipengaruhi oleh dinamika perubahan struktural industri khususnya terkait *spin-off* perbankan syariah. Perkembangan PYD mengalami fase penyesuaian seiring dengan operasionalisasi awal bank syariah hasil proses *spin-off*.²⁴ Pada fase ini, perbankan syariah cenderung menyeimbangkan kembali strategi pertumbuhan dengan penguatan tata kelola dan kualitas pembiayaan, sehingga ekspansi PYD dalam jangka pendek masih berlangsung secara lebih selektif. Selain faktor penyesuaian struktural, strategi penataan portofolio pembiayaan turut memengaruhi kinerja PYD, tercermin dari meningkatnya pertumbuhan pembiayaan investasi, konsumsi, dan modal kerja. Perkembangan ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi serta upaya perbankan syariah dalam menyeimbangkan kehati-hatian dengan penguatan intermediasi seiring penguatan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko.

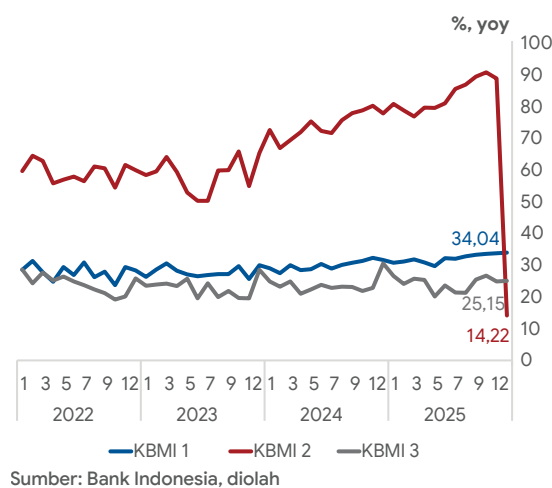
DPK syariah masih tumbuh positif dengan risiko likuiditas yang terjaga. Pertumbuhan DPK yang masih kuat menjadi penopang intermediasi perbankan syariah. Pada Desember 2025, pertumbuhan DPK sebesar 10,19% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 10,09% (yoy) (Grafik 4.3.3), utamanya ditopang oleh tabungan dan giro syariah. Dari sisi nasabah, adanya efisiensi belanja dan pengelolaan kas pemerintah daerah, berdampak pada melambatnya pertumbuhan dana simpanan khususnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD)

24 *Spin-off* dalam konteks industri keuangan syariah (termasuk perbankan), merupakan sebuah tindakan pemisahan sebuah UUS dari induk usaha konvensional. Pada perbankan syariah, mekanisme *spin-off* diatur dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.



Grafik 4.3.3. Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah Berdasarkan Instrumen

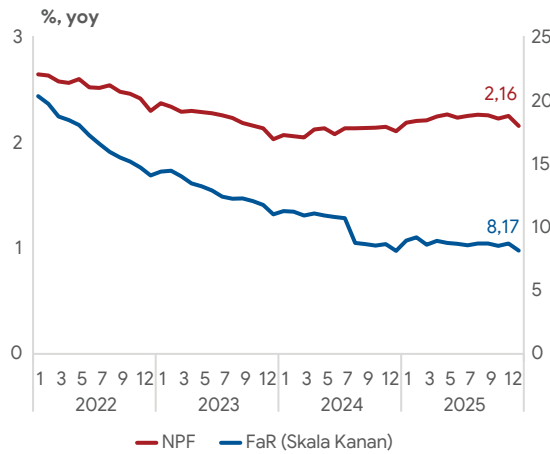
syariah yang masih memiliki ketergantungan pada dana pemerintah daerah. Sementara itu, risiko likuiditas perbankan syariah relatif terjaga tercermin dari rasio AL/DPK yang mencapai 26,55% (yoy) pada Desember 2025 (Grafik 4.3.4). Untuk risiko pembiayaan syariah, rasio NPF²⁵ dan *Financing at Risk* (FaR)²⁶ masing-masing mencapai 2,16% dan 8,17% pada Desember 2025, mencerminkan kualitas pembiayaan yang terkendali di tengah penyesuaian portofolio pembiayaan (Grafik 4.3.5).



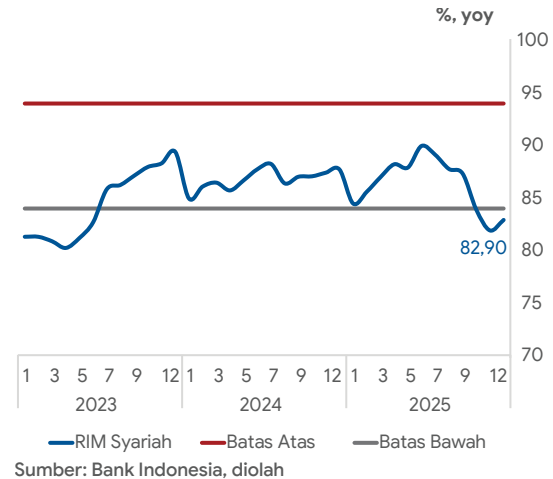
Grafik 4.3.4. Perkembangan Rasio Alat Likuid BUS Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

25 NPF adalah rasio yang dihitung dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. **SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014**

26 FaR dalam perbankan umum konvensional adalah rasio yang dihitung dengan membandingkan total NPF, pembiayaan dalam perhatian khusus (Kol.2) dan pembiayaan lancar yang direstrukturisasi (Kol.1) dengan total pembiayaan. **SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014**



Grafik 4.3.5. Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah



Grafik 4.3.6. Perkembangan Realisasi RIM Syariah

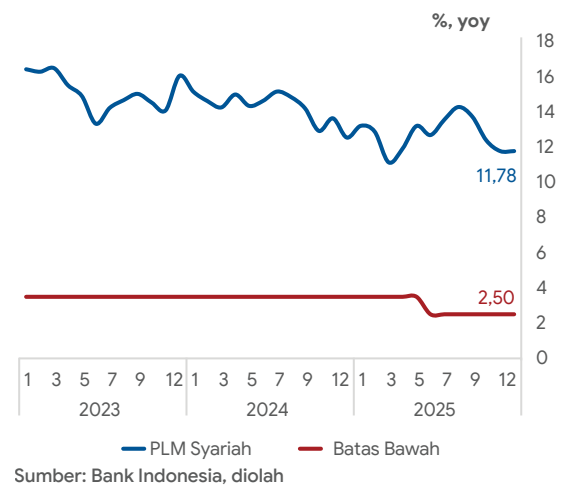
Implementasi kebijakan dan insentif makroprudensial syariah mendukung kinerja pembiayaan perbankan syariah. Realisasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah²⁷ tercatat berada di bawah koridor kebijakan 84–94% (Grafik 4.3.6), mencerminkan kehati-hatian perbankan syariah yang meningkat di tengah tuntutan pengelolaan likuiditas secara lebih optimal dalam mendukung penyesuaian portofolio pembiayaan. Sementara itu, capaian rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah²⁸ tetap berada di atas tingkat minimum kebijakan (>3,5%) dan realisasi insentif KLM oleh perbankan syariah²⁹ relatif tinggi dengan rasio pemanfaatan di atas 4% (Grafik 4.3.7). Kondisi tersebut menunjukkan upaya perbankan syariah dalam mengoptimalkan peningkatan ruang likuiditas yang didorong Bank Indonesia untuk memperkuat intermediasi ke depan.

Selain penguatan ruang ekspansi pembiayaan perbankan syariah, Bank Indonesia turut berkontribusi mendorong permintaan pembiayaan sektor halal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekosistem halal, baik pada segmen pangan dan industri mamin, *modest fashion* maupun pariwisata ramah muslim, perluasan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Berbagai inisiatif tersebut diperkuat dengan upaya integrasi sektor keuangan syariah dengan sektor riil, antara lain melalui pengembangan klaster halal dan usaha syariah lokal, serta memfasilitasi promosi produk halal pada forum strategis nasional dan internasional, seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Festival Ekonomi Syariah (FESyar).

27 RIM Syariah adalah instrumen kebijakan makroprudensial berupa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat intermediasi perbankan syariah (BUS dan UUS). **PBI No. 20/4/PBI/2018**

28 PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam mata uang Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari DPK. **PBI No. 20/4/PBI/2018**

29 KLM adalah kebijakan pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial, yaitu insentif berupa pengurangan kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata, yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank yang memenuhi kriteria penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor-sektor tertentu yang ditetapkan. **PBI No. 11 Tahun 2023**



Grafik 4.3.7. Perkembangan Realisasi PLM dan Realisasi Insentif KLM

Boks 4.1

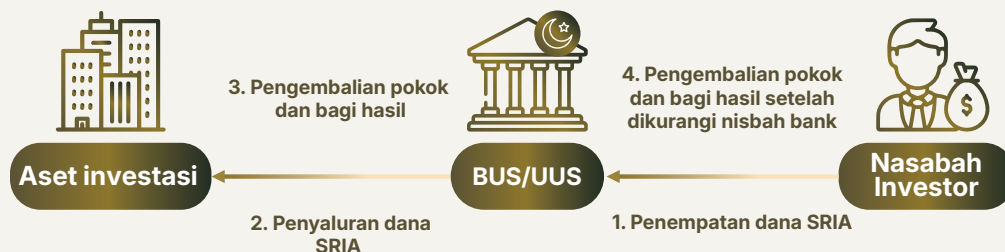
Inovasi Pembiayaan Inklusif dan Syariah

Penguatan inovasi instrumen dan model bisnis industri keuangan syariah diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan mempertegas diferensiasi perbankan syariah. Produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) merupakan produk investasi (*investment account*) syariah berbasis akad *udharabah muqayyadah*³⁰ yang menempatkan nasabah sebagai investor dengan risiko investasi ditanggung oleh nasabah sesuai akad yang digunakan, sementara bank syariah berperan sebagai *fund manager*. Dengan kata lain, imbal hasil dan risiko investasi bergantung pada kinerja aset dasar, sehingga tidak termasuk dalam skema penjaminan.

Berbeda dengan produk simpanan, dana SRIA tidak dikelola menggunakan pendekatan *pool of funds*³¹, melainkan diarahkan pada penggunaan tertentu sesuai persyaratan akad. Dengan karakteristik tersebut, SRIA memperkuat

penerapan prinsip *risk sharing*, memperkuat peran perbankan syariah dalam menyalurkan dana ke sektor riil termasuk melalui penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, SRIA dirancang untuk memperluas pembiayaan sektor riil yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Fokus awal implementasi pada sektor properti diharapkan dapat memberikan stabilitas pada tahap awal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor konstruksi. Ke depan, dengan dukungan regulasi dan insentif yang konsisten, SRIA berpotensi menjadi instrumen unggulan dalam memperkuat ketahanan perbankan syariah serta menciptakan keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Grafik B4.1.1. Skema Umum Model Bisnis SRIA

30 *Mudharabah muqayyadah* adalah akad penyertaan modal dengan syarat tertentu, di mana shahibul maal menentukan jenis usaha atau proyek investasi, dan bank sebagai mudharib mengelola dana tersebut untuk proyek yang telah ditetapkan dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017

31 Saat ini penghimpunan dan penyaluran dana perbankan syariah masih didominasi oleh pendekatan *pool of funds*, di mana dana nasabah dikelola secara terpusat tanpa pemisahan yang jelas berdasarkan tujuan investasi, tenor, dan profil risiko. Pola tersebut berpotensi menimbulkan *maturity mismatch* serta membatasi optimalisasi prinsip *risk sharing* yang merupakan karakter utama sistem keuangan syariah.

Pada tahun 2024, Bank Indonesia melaksanakan **pilot project SRIA yang melibatkan 8 (delapan) bank syariah**. Berdasarkan survei tahun 2025, tercatat 3 (tiga) bank mulai mengimplementasikan SRIA, sedangkan 5 (lima) bank lainnya belum menjalankan SRIA. Berdasarkan pemberitaan di media massa, terdapat 2 bank yang telah menyepakati realisasi transaksi SRIA sebagai bagian dari pengembangan skema pembiayaan berbasis *risk sharing* untuk mendukung pembiayaan sektor riil. Penerbitan SRIA ditujukan

untuk mengatasi keterbatasan permodalan dalam memenuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit dan batas maksimum penyaluran dana, sekaligus memperkuat struktur permodalan serta memberikan fleksibilitas biaya dana (*cost of fund*) dengan perlakuan pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito. Dari sisi investor, SRIA saat ini masih ditujukan bagi lembaga keuangan, dengan rencana perluasan ke investor *high-net-worth* serta pengembangan produk melalui kolaborasi dengan manajer investasi.

Boks 4.2

Tantangan dan Peluang Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Sektor keuangan memiliki peran krusial dalam optimalisasi keuangan berkelanjutan. UU Bank Indonesia jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Dalam konteks mandat tersebut, sektor keuangan memegang peran strategis dalam mengarahkan aliran pembiayaan menuju aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan. Peran ini mencakup optimalisasi pembiayaan hijau sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya optimalisasi pembiayaan hijau di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi penawaran, meskipun komitmen global untuk pembiayaan berkelanjutan internasional tinggi, namun terdapat ketidakpastian akibat dinamika

ekonomi global. Selain itu, terdapat persepsi risiko perbankan yang masih tinggi terhadap pembiayaan berkelanjutan. Dari sisi permintaan, belum lengkapnya infrastruktur keuangan berkelanjutan berdampak pada masih terbatasnya implementasi keuangan hijau di Indonesia.³² Lebih lanjut, infrastruktur yang belum lengkap dan pasar pembiayaan berkelanjutan yang belum efisien -akibat tingginya persepsi risiko-, serta masih terbatasnya kompetensi teknis sumber daya manusia dalam memenuhi persyaratan (*due diligence*) penyaluran dana berkelanjutan memengaruhi rendahnya tingkat kesiapan proyek berkelanjutan (*project readiness*). Tantangan dari sisi penawaran dan permintaan tersebut menjadi lebih kompleks terlebih dengan adanya tantangan di pasar keuangan global. Pertama, tingginya persyaratan (*due diligence*) untuk penyaluran dana berkelanjutan global berstandar internasional yang seringkali sulit untuk dipenuhi. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dan tenor pendanaan yang ditawarkan oleh pasar keuangan global dengan kapasitas penyerapan dana oleh entitas domestik. Berbagai kondisi tersebut berdampak pada masih terbatasnya

32 Infrastruktur pendukung keuangan berkelanjutan antara lain belum terbangunnya sistem verifikasi dan sertifikasi yang menyeluruh, termasuk sistem pelaporan capaian keberlanjutan untuk meminimalkan praktik pencucian hijau (*greenwashing*), serta basis data yang terintegrasi, andal dan transparan.

penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman dari regulator, perbankan, dan pelaku usaha terkait keuangan berkelanjutan.

Terbatasnya ketersediaan data menjadi faktor penting yang memengaruhi upaya pengembangan keuangan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan risiko iklim yang tinggi, memiliki sektor penopang ekonomi yang utamanya masih bergantung pada energi fosil, sehingga rentan terhadap risiko iklim. Namun demikian, data terkait iklim pada sektor-sektor ekonomi di Indonesia belum terintegrasi dan belum sepenuhnya menjadi

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis pelaku usaha. Keterbatasan ketersediaan, kualitas, dan tata kelola data pembiayaan berkelanjutan, termasuk isu kapasitas lembaga keuangan dalam mengidentifikasi dan melaporkan pembiayaan hijau, berdampak pada akurasi dan penyediaan data sebagai dasar perumusan kebijakan keuangan berkelanjutan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan ekosistem dan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan integrasi data lintas otoritas, penguatan pengawasan dan validasi data, serta peningkatan koordinasi kebijakan.

Bab 5

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL UNTUK MENGAKSELERASI INTERMEDIASI DAN MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Kebijakan makroprudensial longgar dan akomodatif terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan menuju level optimalnya (pro-growth) dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Sepanjang 2025, penguatan kebijakan dimaksud dilakukan terutama pada instrumen KLM untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang tersinergi dengan program Asta Cita Pemerintah, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Pada akhir 2025, Bank Indonesia kembali memperkuat KLM menjadi berbasis kinerja dan berorientasi ke depan untuk meningkatkan efektivitas transmisi penurunan BI-Rate terhadap suku bunga perbankan, khususnya suku bunga kredit. Selain itu, instrumen kebijakan lainnya seperti Countercyclical Capital Buffer (CCyB), RIM, LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor juga dipertahankan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan. Sementara itu, perluasan alternatif pendanaan perbankan melalui peningkatan batas maksimum Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) guna mendorong kapasitas pembiayaan perbankan dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan melalui pelonggaran rasio PLM terus dipertahankan hingga akhir tahun. Pada aspek inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia juga mempertahankan RPIM, memperkuat KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan pembiayaan berbasis syariah.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, otoritas terkait serta mitra strategis lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi dan berdaya tahan. Berbagai upaya Bank Indonesia telah dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk meningkatkan pembiayaan perekonomian. Sepanjang 2025, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter-fiskal, makro-mikroprudensial, termasuk upaya menjaga ketahanan perbankan. Dalam forum KSSK, penguatan kelembagaan dan regulasi diwujudkan, antara lain melalui harmonisasi ketentuan turunan UU P2SK, joint stress test, dan Simulasi Tematik Nasional untuk menguji kesiapan lembaga dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Dalam rangka meningkatkan transparansi data dan mitigasi risiko siber, sinergi antarotoritas dilakukan melalui penguatan atas aksesibilitas data sektor keuangan, integrasi pelaporan, dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) termasuk dalam penanganan insiden bank. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat peran aktif pada forum regional dan internasional guna mendorong koordinasi dan inovasi kebijakan, memperkuat pengawasan sistem keuangan lintas negara, serta menguji ketahanan sistem keuangan negara-negara ASEAN dari risiko siber dan perubahan iklim.

5.1

Kebijakan Makroprudensial: Respons Kebijakan Mendorong Intermediasi dengan Tetap Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

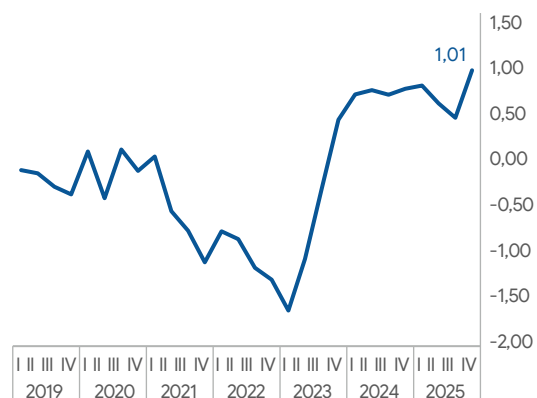
Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Arah kebijakan makroprudensial longgar untuk pertumbuhan pada 2025 ditempuh berdasarkan Siklus Keuangan Indonesia (SKI) yang masih berada di bawah kapasitas pembiayaan optimalnya yang mengindikasikan pertumbuhan kredit masih perlu didorong. Selain itu, ISSK yang berada pada zona Normal yang mencerminkan terjaganya stabilitas sistem keuangan juga menjadi pertimbangan kebijakan makroprudensial longgar. Selama 2025, bauran kebijakan makroprudensial juga terus dioptimalkan untuk mencapai sasaran Trilema kebijakan makroprudensial dan mendukung arah kebijakan Bank Indonesia secara keseluruhan.³³

Penguatan KLM terus dilakukan untuk mendorong intermediasi/pembiayaan perbankan yang lebih tinggi. Sepanjang 2025, KLM telah diperkuat sebanyak empat kali, yaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Desember, dan 16 Desember. Penguatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan insentif yang diberikan kepada perbankan, mendukung penciptaan lapangan kerja, mendukung sektor prioritas yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, dan meningkatkan efektivitas transmisi penurunan BI-Rate. Setelah penguatan KLM pada 1 April 2025, total insentif hingga akhir November 2025 terus meningkat, yaitu mencapai Rp406,6 triliun. Insentif tersebut disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp181,3 triliun, BUSN sebesar Rp180,6 triliun, BPD sebesar Rp38,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp6,0 triliun. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Manufaktur, Real Estate, Perumahan Rakyat, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau. Insentif likuiditas kepada perbankan ini semakin mendukung kapasitas pembiayaan bank, tercermin dari rasio AL/DPK yang tinggi sebesar 29,67% dan DPK

yang tumbuh sebesar 12,03% (yoy) pada November 2025. Namun demikian, peningkatan kapasitas tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan kredit lebih akseleratif, tercermin dari pertumbuhan kredit November 2025 yang baru mencapai sebesar 7,74% (yoy), atau masih lebih rendah dari kisaran target 8-11%.

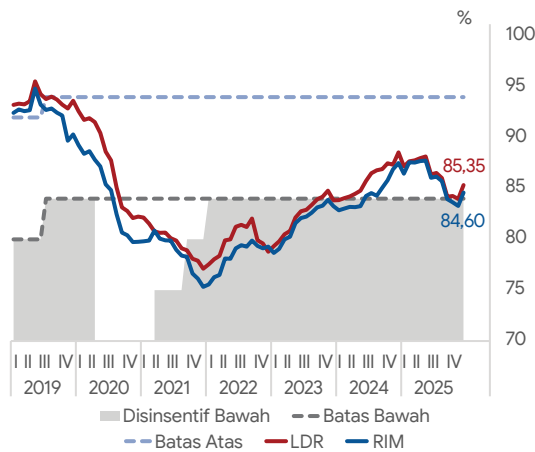
Berbagai instrumen makroprudensial lainnya untuk mendorong intermediasi dipertahankan akomodatif hingga akhir 2025. Rasio CCyB dipertahankan 0% sehingga bank tidak diwajibkan membentuk penyangga (*buffer*) modal tambahan. Hal ini mempertimbangkan SKI yang masih di bawah kapasitas pembiayaan optimal dan belum terdapat indikasi intermediasi perbankan yang berlebihan, tercermin dari masih rendahnya rasio *Credit to GDP Gap* (Grafik 5.1.1). Rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti, termasuk properti berwawasan lingkungan, tetap dilonggarkan untuk seluruh jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), yaitu paling tinggi sebesar 100%. Ketentuan uang muka untuk KKB/PKB, termasuk KKB/PKB berwawasan lingkungan, juga dipertahankan dengan uang muka paling sedikit 0%. Upaya ini dilakukan guna mendukung sektor properti dan otomotif sebagai



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1.1. Perkembangan Credit to GDP Gap

³³ Sasaran kebijakan makroprudensial meliputi pertumbuhan kredit yang optimal, stabilitas sistem keuangan, dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1.2. Perkembangan RIM Perbankan

sektor yang memiliki *backward* dan *forward linkages* serta daya ungkit tinggi terhadap perekonomian nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank.³⁴

Kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh terus memberikan ruang untuk mendorong intermediasi melalui RIM dan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan sekaligus mendorong sumber pembiayaan non-DPK melalui RPLN. Rentang RIM perbankan dipertahankan pada kisaran 84–94% dan per Desember 2025 mencapai sebesar 84,60%, atau lebih rendah dari 88,6% pada Desember 2024 (Grafik 5.1.2). Sebagai bentuk penguatan RIM, Bank Indonesia telah menetapkan kriteria surat berharga korporasi berkualitas tinggi yang dimiliki bank sebagai komponen perhitungannya. Sementara itu, RPLN tetap dipertahankan paling tinggi sebesar 35% terhadap modal bank. Berdasarkan evaluasi atas SKI, faktor eksternal, dan risiko stabilitas sistem keuangan, parameter kontrasiklikal RPLN sebesar 5% tidak mengalami perubahan.

Instrumen PLM dan Posisi Devisa Neto (PDN) terus dioptimalkan untuk mendorong sistem keuangan yang berdaya tahan dengan risiko sistemik yang terkelola baik. Rasio PLM untuk Bank Umum Konvensional (BUK) sebesar 4% dengan fleksibilitas

repo SSB sebesar 4% dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%, dipertahankan hingga akhir 2025. Selain itu, Bank Indonesia melakukan perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan untuk pemenuhan PLM/PLM Syariah sebagai upaya untuk turut mendorong pendalaman pasar keuangan sekaligus memperkuat ketahanan dan kecukupan likuiditas perbankan. Sementara itu, rasio PDN juga dipertahankan sebesar 20% terhadap modal dengan tujuan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan mengatasi *currency mismatch* yang berlebihan.

Kebijakan makroprudensial berperan mendorong perluasan akses ekonomi dan keuangan untuk mencapai pertumbuhan kredit yang inklusif, seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Bank Indonesia mempertahankan kebijakan RPIM untuk meningkatkan inklusi ekonomi, membuka akses keuangan, dan memperkuat peran UMKM, dengan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kepada UMKM dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah.³⁵ Partisipasi bank dalam melakukan fungsi intermediasi dapat dilakukan melalui pembiayaan inklusif secara langsung, antara lain kepada UMKM, maupun pembiayaan tidak langsung, diantaranya kepada lembaga jasa keuangan lain atau pembelian surat berharga pembiayaan inklusif. Pembiayaan inklusif tersebut dituangkan dalam target RPIM yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank sebagai kewajiban pemenuhan RPIM, sesuai dengan keahlian, minat, dan model bisnis masing-masing bank.

Respons kebijakan makroprudensial 2025 juga diarahkan untuk memperkuat resiliensi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan penguatan mandat Bank Indonesia dalam UU P2SK, Bank Indonesia telah merumuskan kerangka kerja Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) dan kerangka kerja kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) pada akhir 2025. Kerangka kerja PMKT menjadi landasan

34 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 Tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

dalam menerapkan protokol manajemen krisis Bank Indonesia yang selaras dengan protokol manajemen krisis nasional, dengan mengintegrasikan aspek kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia. Adapun kebijakan IEKB menjadi acuan implementasi berbagai inisiatif strategis Bank Indonesia dalam mendukung inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

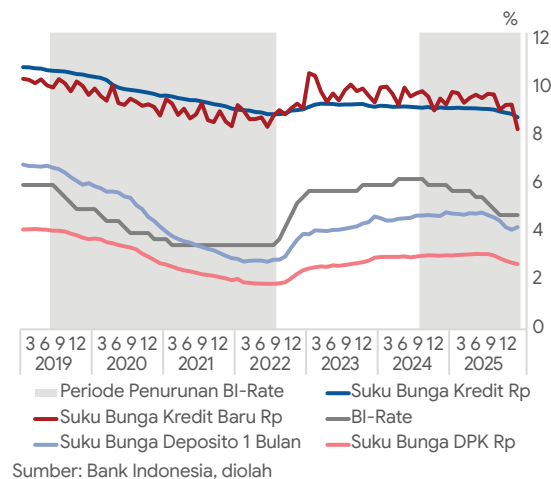
Kebijakan ekonomi dan keuangan syariah juga dirumuskan Bank Indonesia sebagai upaya mendorong intermediasi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh melalui tiga strategi, yaitu pengembangan ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing, optimalisasi pembiayaan syariah, serta penguatan literasi Ekonomi

Syariah (Eksyar) dan inklusi Eksyar. Inisiatif penguatan ekosistem rantai nilai Halal diantaranya dilakukan melalui kegiatan Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal (GERBANG SANTRI), Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor (JAWARA Ekspor), dan Gerakan Berjamaah Akselerasi (GEMA Halal). Untuk penguatan pembiayaan syariah, Bank Indonesia mempertahankan inisiatif strategis Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan (SAPA) Syariah dan Kanal ZISWAF. Selanjutnya, penguatan literasi dan inklusi Eksyar dilakukan melalui kegiatan Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas (LENTERA EMAS). Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memperkuat keuangan syariah melalui penguatan kebijakan dan regulasi.

5.2

Penguatan KLM Untuk Mendukung Efektivitas Transmisi Kebijakan dan Optimalisasi Intermediasi

Pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan mendukung kecukupan likuiditas perbankan, namun belum mampu menurunkan suku bunga perbankan secara signifikan dan mendorong pertumbuhan kredit. Peningkatan likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan tercermin dari peningkatan nominal alat likuid dan DPK sebagai sumber penyaluran kredit. Namun demikian, permintaan kredit hingga awal triwulan IV 2025 belum kuat, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang menahan ekspansi, preferensi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih tinggi. Dari sisi penawaran, suku bunga kredit yang masih tinggi dipengaruhi oleh masih mahal biaya dana perbankan seiring dengan pemberian *special rate* kepada deposan. Sejak Januari hingga Oktober 2025, BI-Rate telah turun sebesar 125 bps, namun penurunan suku bunga deposito 1 bulan tercatat lebih rendah, yaitu sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025. Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan lebih terbatas, yaitu sebesar 20 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,00% pada Oktober 2025 (Grafik 5.2.1).



Grafik 5.2.1. Penurunan BI-Rate dan Suku Bunga Perbankan

Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/ pembiayaan perbankan dan memperbaiki struktur suku bunga, Bank Indonesia memperkuat implementasi KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (KLM *Forward Looking*).³⁶ KLM *Forward Looking* ini berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 dan dilakukan melalui pemberian insentif kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending*

36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*). Insentif *lending channel* yang dapat diterima oleh bank paling tinggi sebesar 5% dari DPK, sementara insentif *interest rate channel* paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima bank paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Implementasi KLM *Forward Looking* juga berimplikasi pada penyesuaian cakupan sektor agar lebih sejalan dengan upaya mendukung program Asta Cita Pemerintah.

Pada akhir 2025, Bank Indonesia terus memperkuat upaya penurunan suku bunga perbankan dalam rangka optimalisasi intermediasi ke sektor riil. Penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan hingga November 2025 masih lebih terbatas dibandingkan dengan

penurunan BI-Rate. Suku bunga deposito 1 bulan telah turun sebesar 67 bps menjadi 4,14% dari 4,81% pada awal 2025. Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan lebih terbatas, yaitu sebesar 24 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025 sehingga transmisi penurunan suku bunga perlu diperkuat (Grafik 5.2.1). Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat KLM *Forward Looking* yang efektif pada 16 Desember 2025 dengan meningkatkan besaran insentif likuiditas untuk *interest rate channel* menjadi sebesar 1% dari DPK dan menyesuaikan besaran insentif *lending channel* menjadi 4,5% dari DPK. Transmisi suku bunga yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong permintaan kredit sehingga penyaluran kredit perbankan menjadi lebih tinggi.

5.3

Sinergi Kebijakan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menjaga Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi merupakan dua tujuan yang saling terkait dan memerlukan koordinasi kebijakan yang kuat antarotoritas. Koordinasi dan sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, maupun otoritas sektor keuangan dalam KSSK terus diperkuat untuk menyelaraskan arah dan respons kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan domestik, di tengah gejolak ekonomi dan keuangan global yang berlanjut dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Upaya menjaga stabilitas makroekonomi dilakukan melalui penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Sementara itu, sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembiayaan dari sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi dilakukan khususnya melalui KSSK.

Dari sisi makroprudensial, sinergi yang erat dengan kebijakan fiskal dan industrial terus dioptimalkan untuk mengatasi permintaan yang masih rendah dan mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial melalui KLM telah mendorong penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas Pemerintah yang sejalan dengan program-program

Asta Cita. Secara sektoral, sinergi dan koordinasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia secara rutin dilakukan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank dan implementasi KLM pada sektor Perumahan, diantaranya melalui *dashboard* pemantauan capaian program 3 juta rumah pada *website* PKP.

Koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat dalam KSSK terus diperkuat guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang lebih berdaya tahan agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan moneter, makroprudensial, mikroprudensial, penjaminan dan resolusi, serta kebijakan fiskal agar respons kebijakan bersifat komprehensif, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Penguatan juga dilakukan melalui harmonisasi penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU P2SK yang mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat fondasi kelembagaan dan regulasi sistem keuangan nasional. Pada 2025, Bank Indonesia turut berkontribusi aktif dalam penyusunan berbagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU P2SK, antara lain RPP Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, RPP Sumber Daya Manusia Sektor Keuangan, serta RPP

Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Sinergi dan koordinasi KSSK juga dilakukan melalui uji ketahanan bersama (*joint stress test*) sistem keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanganan krisis, serta melaksanakan Simulasi Tematik Nasional (Simtik). Simtik dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 untuk menguji kecukupan ketentuan dan kesiapan otoritas sektor keuangan (LPS, Bank Indonesia, dan OJK) dalam penerapan *weekend resolution* dengan metode *Purchase and Assumption*.

Secara bilateral, Bank Indonesia dan OJK terus memperkuat sinergi makroprudensial-mikroprudensial, antara lain dalam peninjauan dan harmonisasi pengaturan, proses perizinan terkait aksesibilitas dan transparansi data sektor jasa keuangan, maupun penanganan risiko siber. Selama 2025, telah dilakukan harmonisasi ketentuan kebijakan Bank Indonesia yaitu KLM, RPLN, PLM, dan RPIM. Selain itu, penguatan koordinasi dengan OJK juga dilakukan untuk mendukung kegiatan *spin off* UUS agar berjalan secara *seamless* dan tidak berdampak bagi industri keuangan. Sebagai respons atas peningkatan risiko *crypto* sebagai sarana *proceeds of crimes*, Bank Indonesia dan OJK melakukan *joint effort* memperkuat disiplin nasional dalam forum global, serta membentuk *taskforce* penanganan insiden bank, termasuk yang melibatkan pelarian dana ke *crypto asset*.

Sinergi dan koordinasi yang erat dengan LPS terus dilanjutkan, khususnya terkait pertukaran informasi, integrasi pelaporan bank, dan *sharing session* dalam hal penanganan bank. Sepanjang 2025, telah dilakukan pertukaran informasi dan kegiatan *benchmarking*, khususnya dalam mendukung integrasi pelaporan sektor perbankan serta penyelarasan kerangka penanganan bank. Selain itu, telah dilakukan *sharing session* dengan LPS terkait penanganan bank, termasuk resolusi, pemeriksaan, dan likuidasi bank untuk menyelaraskan kerangka kerja dan kesiapan operasional antarotoritas sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis data dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Koordinasi terkait integrasi pelaporan dimaksud menjadi langkah penting untuk meningkatkan konsistensi, efisiensi, dan kualitas data lintas otoritas sebagai dasar perumusan kebijakan dan respons terhadap potensi krisis.

Sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial turut diperkuat untuk mendorong peningkatan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan. Dalam konteks ini, OJK bersama Bank Indonesia, Kemenkeu, otoritas terkait, serta mempertimbangkan

masukan dari industri, telah mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sebagai kerangka acuan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pembiayaan berkelanjutan. Bank Indonesia turut tergabung dalam *Blue Finance Advisory Committee* (BFAC), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi nasional untuk mendukung pengembangan pembiayaan biru (*blue finance*) guna mendorong aktivitas ekonomi maritim dan pesisir yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

Bank Indonesia terus meningkatkan peran aktif dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas institusi dan/atau lembaga lintas negara pada forum regional dan internasional. Pada 2025, Bank Indonesia menjadi *Co-Chair Task Force on Supervisory Arrangement* (TFSA) di bawah *ASEAN Working Committee on the ASEAN Banking Integration Framework* (WC-ABIF) yang berperan dalam memperkuat koordinasi kebijakan pengawasan lintas negara, mengharmonisasikan praktik supervisi perbankan, serta memperkokoh *safeguards* stabilitas sistem keuangan seiring dengan pendalaman integrasi perbankan di kawasan ASEAN. Selanjutnya, Bank Indonesia juga menjadi *Chair ASEAN Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance* (SLC TFSF) dan sebagai *project lead* dalam pengembangan *Common Ground Framework for Climate Risk Stress Test* (CRST) in ASEAN. Forum ini bertujuan untuk membangun skenario *stress test* terstandar untuk menguji ketahanan sistem keuangan negara-negara ASEAN terhadap risiko perubahan iklim.

Bank Indonesia secara konsisten mendukung ekonomi kerakyatan dengan memperkuat sinergi pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan KKI. KKI yang telah diselenggarakan sejak 2016 semakin mengukuhkan perannya sebagai *flagship* sinergi pengembangan UMKM. Sinergi dalam KKI yang melibatkan kementerian/lembaga, serta partisipasi asosiasi/industri dan pelaku usaha, telah berupaya mendorong UMKM berdaya saing melalui peningkatan kapasitas akselerasi digital UMKM, perluasan akses pasar termasuk melalui digital, penguatan akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam rantai pasok domestik maupun global, sekaligus mendukung agenda ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional *Asta Cita*. Dalam rangka mendukung agenda transisi hijau dan inklusivitas, pelaksanaan KKI pada 2025 terus berinovasi antara lain melalui penguatan narasi keberlanjutan dan

melibatkan model difabel dalam Pagelaran Karya Kreatif untuk memperkuat perubahan paradigma terhadap nilai keberagaman dan inklusi dalam aktivitas ekonomi.

Sinergi erat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong melalui penyelenggaraan program unggulan syariah secara berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui pengembangan ekosistem halal, digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen sosial dan komersial syariah, termasuk ZISWAF dan pembiayaan hijau berbasis syariah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan MUI, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan

terkait dalam pelaksanaan inisiatif nasional ekonomi dan keuangan syariah, serta dengan *stakeholders* internasional melalui keterlibatan aktif dalam Islamic Financial Services Board dan International Islamic Liquidity Management Corporation. Sebagai upaya mendorong transmisi kebijakan dan mendorong intermediasi untuk pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif serta berkelanjutan, Bank Indonesia juga melanjutkan kegiatan ISEF. Peningkatan keterlibatan Kementerian/Lembaga, mitra internasional, serta pelaku UMKM dan industri pada 2025 maupun hasil transaksi perdagangan dan *business matching* pembiayaan dari kegiatan ISEF semakin menegaskan kepemimpinan Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan syariah global.

Boks 5.1

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial *Forward Looking Lending Channel dan Interest Rate Channel*

Bank Indonesia kembali memperkuat KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan sebagai langkah strategis mendukung program prioritas nasional. Penguatan KLM yang bersifat *forward looking* dimaksud diarahkan untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor-sektor strategis termasuk yang tercakup dalam program Asta Cita Pemerintah serta mengaitkan dengan transmisi suku bunga kebijakan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit melalui mekanisme insentif.

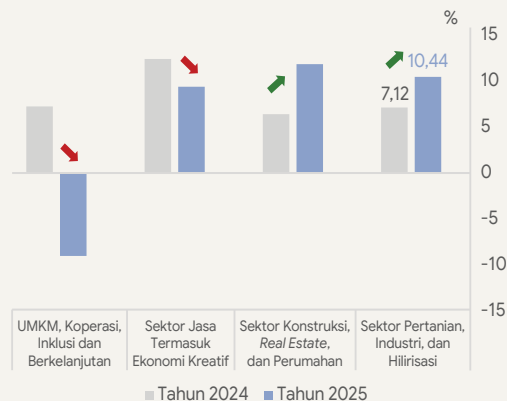
Penguatan KLM dilakukan melalui dua saluran (*channel*), yaitu *interest rate channel* dan *lending channel*. Pada *interest rate channel*, insentif yang dapat diterima bank paling tinggi adalah 1% dari DPK. Pemberian insentif *interest rate channel* ini merupakan bentuk apresiasi terhadap bank yang responsif dalam menurunkan suku bunga. Besaran insentif ditentukan berdasarkan kecepatan penyesuaian suku bunga kredit baru bank terhadap perubahan BI-Rate yang diukur melalui elastisitas suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru terhadap BI-Rate. Sementara itu, KLM

lending channel diberikan sesuai komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan sektoral yang disampaikan, dengan nilai maksimum 4,5% dari DPK, dan akan disesuaikan berdasarkan realisasi pada periode berikutnya. Sektor-sektor yang mendapat insentif KLM *lending channel* terdiri dari (i) sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi; (ii) sektor Jasa, termasuk sektor Ekonomi Kreatif; (iii) sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, Koperasi, Inklusi dan Berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Insentif KLM yang disalurkan Bank Indonesia terus dimanfaatkan oleh perbankan dan perlu terus didorong agar lebih optimal. Hingga akhir Desember 2025, insentif KLM *Forward Looking* yang diterima oleh bank mencapai sebesar Rp388,1 triliun, atau sekitar 4,47% dari DPK. Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut telah diterima oleh kelompok bank BUMN sebesar Rp177,1 triliun, BUSN sebesar Rp169,5 triliun, BPD sebesar Rp34,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,0 triliun. Secara sektoral, Bank telah memanfaatkan dengan baik plafon insentif dari sisi *lending*

channel, tercermin dari rasio insentif yang sudah mendekati plafon maksimum yang diberikan yaitu sebesar Rp354,9 triliun, atau setara 4,09% dari DPK. Sementara itu, pemanfaatan insentif pada *interest rate channel* masih relatif rendah, yaitu mencapai sebesar Rp33,14 triliun, atau setara 0,38% dari DPK dari total plafon maksimum sebesar 1% sehingga perlu terus dioptimalkan (Gambar B5.1.1).

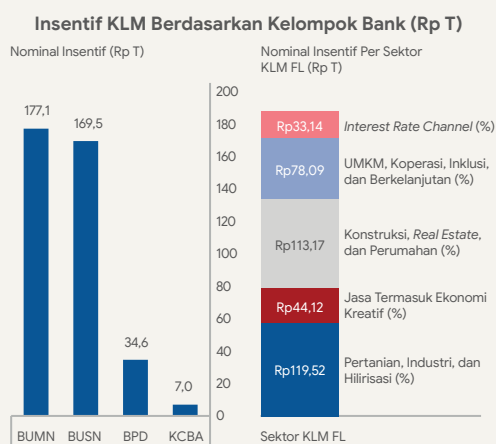
Pemanfaatan insentif KLM *forward looking* secara sektoral terutama berasal dari sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, serta sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan yang mendukung upaya penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dan selaras dengan kebijakan Asta Cita Pemerintah. Pertumbuhan kredit pada sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, serta sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan pascaimplementasi KLM *Forward Looking* per Desember 2025 tercatat lebih tinggi dari periode sebelum kebijakan diterapkan (Grafik B5.1.1). Dari sisi insentif suku bunga (*interest rate channel*), bank telah menyesuaikan suku bunga DPK dan kredit secara bertahap searah dengan kebijakan penurunan BI-Rate. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, sementara suku bunga kredit perbankan turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.



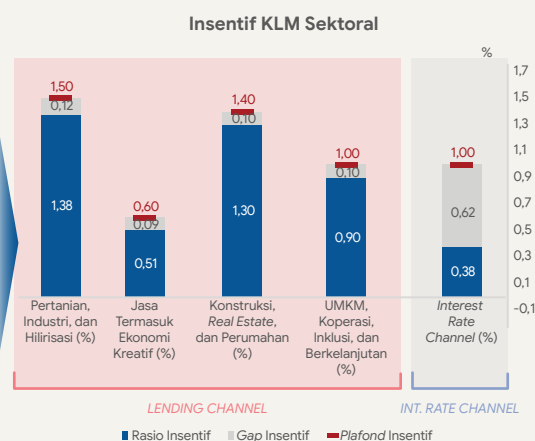
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B5.1.1. Pertumbuhan Kredit Sektor KLM *Forward Looking*

Ke depan, Bank Indonesia akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas transmisi suku bunga berjalan optimal. Upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan perlu terus diakselerasi agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, Bank Indonesia tetap akan memastikan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam implementasi KLM, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga di tengah upaya memperkuat peran perbankan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Gambar B5.1.1. Capaian Rasio KLM Berdasarkan Kelompok Bank dan Sektoral

Boks 5.2

Penguatan PLM Untuk Menjaga SSK dan Mendukung Pembiayaan Ekonomi

Bank Indonesia terus berupaya mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah kebijakan dalam *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030, Bank Indonesia menetapkan empat sasaran strategis, yaitu area produk (*product*), harga (*pricing*), pelaku (*participant*) dan infrastruktur (*infrastructure*). Sebagai upaya mendorong pengembangan produk, Bank Indonesia melakukan perluasan *underlying* repo Operasi Moneter (OM) dengan mencakup surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahap awal, repo OM dengan *underlying* obligasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah dilakukan pada 10 November 2025. Selain itu, Bank Indonesia menerbitkan BI-FRN (Bank Indonesia – *Floating Rate Notes*) sebagai instrumen OM yang *pro-market* dengan kupon mengambang yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan pasar *Overnight Index Swap*

(OIS) berbasis INDONIA, serta mendukung terbentuknya suku bunga acuan berbasis transaksi yang *robust* dan kredibel.

Pendalaman PUVA melalui perluasan *underlying* repo dan penerbitan BI-FRN memiliki implikasi terhadap penguatan ketentuan instrumen kebijakan makroprudensial. Sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam transaksi OM, surat berharga berkualitas tinggi lainnya dan BI-FRN memperluas cakupan surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan rasio PLM bank, sehingga meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan. Fleksibilitas tersebut selanjutnya mendukung peningkatan kapasitas intermediasi perbankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan PLM ini tidak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan bank, namun juga menjadi bagian integral dari upaya pendalaman pasar keuangan agar dapat berkontribusi optimal dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Lebih lanjut, kriteria dan persyaratan surat berharga untuk pemenuhan PLM bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam OM.³⁷

37 PADG Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.

Boks 5.3

Sinergi KSSK Untuk Mendorong Intermediasi

Kinerja intermediasi pada 2025 menghadapi tiga (3) tantangan utama, di tengah dinamika makrofinansial domestik dan global. Tantangan dimaksud bersumber dari *market imperfections* yang menyebabkan pertumbuhan kredit di bawah pertumbuhan optimal, kredit yang lebih ditopang oleh bank besar khususnya BUMN, serta permintaan kredit yang belum kuat. Ketiga tantangan yang bersifat multidimensi tersebut menegaskan perlunya bauran kebijakan yang tersinergi dan terkoordinasi erat antarotoritas

sektor keuangan dalam kerangka KSSK. Merespons tantangan dimaksud, koordinasi erat dalam KSSK pada 2025 tidak hanya difokuskan untuk memelihara ketahanan sistem keuangan, namun juga untuk mendorong intermediasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sepanjang 2025, KSSK secara berkala melakukan koordinasi dalam rangka sinergi dan harmonisasi kebijakan lembaga KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi antara lain melalui kebijakan

lembaga yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan intermediasi, baik dari sisi *supply* maupun *demand* (sektor riil).

Respons kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersinergi dengan baik dalam KSSK. Kebijakan moneter pada paruh kedua 2025 ditempuh dengan kebijakan BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas. BI-Rate kembali diturunkan pada Juli, Agustus, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi sebesar 4,75% per Oktober 2025. Stabilisasi Rupiah sesuai fundamentalnya dilakukan melalui intervensi pada transaksi spot dan DNDF, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Pembelian SBN dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia, serta merupakan wujud sinergi erat antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal Pemerintah. Sebagian pembelian SBN dimaksud diperuntukkan bagi pendanaan program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti perumahan rakyat dan KDKMP. Sementara itu, ekspansi likuiditas moneter melalui operasi moneter *pro-market* bertujuan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi tersebut dilakukan dengan menurunkan posisi SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir 2025 dan menurunkan suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada November 2025, serta memperkuat peran *Dealer Utama* untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repo. Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga *Deposit Facility* (DF) menjadi 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* (LF) menjadi 5,50% pada September 2025 guna mendorong bank menggunakan kelebihan likuiditasnya untuk menyalurkan kredit ke sektor riil. Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan perbankan dengan memastikan ketersediaan likuiditas perbankan dan memperbaiki struktur suku bunga. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan KLM *forward looking* untuk meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor-

sektor prioritas Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui insentif *lending channel* sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan, khususnya suku bunga kredit, melalui insentif *interest rate channel*.

Dari sisi fiskal, sinergi dan koordinasi kebijakan diarahkan terutama untuk mendorong sisi *demand*. Di tengah tekanan global dan perlambatan harga komoditas, Pemerintah mengoptimalkan APBN untuk meredam guncangan, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. Dari sisi *demand*, Pemerintah mendorong realisasi belanja untuk pelaksanaan program pembangunan nasional seperti MBG, pembiayaan program KDKMP, paket stimulus I hingga IV selama tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong konsumsi dalam negeri. Pemerintah telah mengalokasikan belanja yang manfaatnya langsung dinikmati oleh masyarakat sebesar Rp805,4 triliun dalam bentuk penguatan dan proteksi daya beli (antara lain PKH, Kartu Sembako, Gaji/TPG/TPD non-PNS dan Perumahan), pelayanan publik (antara lain MBG dan cek kesehatan gratis), stabilisasi harga dan produksi (mencakup subsidi KUR dan pupuk, Bulog dan cadangan pangan), sarana-prasarana publik dan produktivitas (meliputi renovasi/revitalisasi sekolah, bendungan, irigasi, dan operasi-pemeliharaan sarpras SDA, serta preservasi jalan dan jembatan).

Pemerintah memperkuat penyaluran kredit untuk pelaksanaan program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemindahan Simpanan Pemerintah dari Bank Indonesia ke Bank Umum.³⁸ Upaya tersebut dilakukan melalui penempatan dana SAL Pemerintah dengan total sebesar Rp276 triliun dari rekening di Bank Indonesia ke rekening bank mitra Pemerintah yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu sebesar Rp200 triliun pada 12 September 2025 ditempatkan ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta BTN sebesar Rp25 triliun dan

38 KMK No. 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi.

BSI sebesar Rp10 triliun. Tahap kedua yaitu sebesar Rp76 triliun pada 10 November 2025 yang ditempatkan ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar Rp25 triliun, serta Bank Jakarta sebesar Rp1 triliun. Penempatan dimaksud bertujuan untuk mendukung likuiditas perbankan, menurunkan *cost of fund*, sehingga dapat mendorong penyaluran kredit. Namun demikian, dukungan kebijakan dimaksud dinilai belum cukup efektif dalam memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan kredit secara signifikan, sehingga Pemerintah menarik kembali dana SAL sebesar Rp75 triliun pada 15 Desember 2025.

OJK turut memperkuat upaya menjaga SSK dan mendorong intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi *supply*, upaya OJK meliputi pemberdayaan dan perluasan akses permodalan UMKM melalui penerbitan POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM pada September 2025, serta memastikan perlindungan nasabah dan mendorong standar tata kelola rekening yang lebih transparan dan seragam di industri perbankan melalui penerbitan POJK No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Bank Umum pada November 2025. Selain itu, OJK mendukung optimalisasi peran lembaga keuangan dalam mendukung program Pemerintah dengan menegaskan bahwa informasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait status pemberian kredit bukan menjadi satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur. Dengan demikian, SLIK berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat netral dan tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori lancar. Dari sisi *demand*, OJK memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik dan untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah. Dalam hal ini, OJK telah menetapkan kebijakan

pemberlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlaku selama tiga tahun sejak 10 Desember 2025. Melalui kebijakan relaksasi dimaksud, hingga akhir Desember 2025 OJK telah memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp12,58 triliun kepada sebanyak 237.083 nasabah.

Sinergi dan koordinasi erat oleh LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya terus diperkuat untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui jalur suku bunga. Pada semester II 2025, LPS telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) perbankan pada Agustus dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps untuk simpanan Rupiah di bank umum yang kemudian dipertahankan sebesar 3,50% hingga akhir 2025. Namun demikian, penurunan suku bunga simpanan belum searah dengan penurunan TBP. Pada Desember 2025, porsi simpanan bank di atas TBP masih mencapai di atas 30%, sehingga menahan penurunan *cost of fund* dan memperlambat transmisi penurunan ke suku bunga kredit. Oleh karena itu, LPS terus menghimbau melalui *moral suasion* agar perbankan menyesuaikan suku bunga ke tingkat yang wajar dan mengikuti TBP sehingga suku bunga pinjaman dapat menurun dan menjaga stabilitas pendanaan.

Ke depan, KSSK akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi respons kebijakan maupun kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi risiko dari gejolak global, terutama dampak rambatannya terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Sinergi tersebut dilakukan KSSK secara berkala demi menjaga stabilitas sistem keuangan yang diperlukan agar ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan. Selain itu, KSSK juga terus berkomitmen untuk mendukung geliat sektor riil dan pelaksanaan program Asta Cita Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab 6

OUTLOOK INTERMEDIASI DAN ARAH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Kinerja perekonomian domestik pada 2026 diperkirakan tetap baik di tengah prospek ekonomi global yang melambat. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan sebesar 3,2%, lebih rendah daripada pertumbuhan pada 2025 sebesar 3,3%, terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan tarif resiprokal AS dan kerentanan rantai pasok global. Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah perbaikan prospek perekonomian AS yang didorong oleh investasi sektor teknologi termasuk Artificial Intelligence (AI) dan stimulus fiskal pengurangan pajak. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7%, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh kinerja NPI yang terjaga, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terjaga rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Penyaluran kredit perbankan dan kinerja pembiayaan korporasi pada 2026 diproyeksikan akan lebih baik seiring dengan tetap terjaganya SSK yang ditopang oleh sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta dampak positif akselerasi program prioritas Pemerintah di sektor strategis. Minat perbankan dalam menyalurkan kredit diperkirakan meningkat di tengah optimisme

perbaikan kondisi perekonomian dan strategi bank untuk tetap menjaga kualitas kredit, biaya dana, dan profitabilitas. Walaupun terdapat optimisme dari peningkatan belanja modal dan potensi penyerapan tenaga kerja yang dapat memperkuat kredit konsumsi RT, tantangan berupa perilaku kehati-hatian korporasi dalam menarik kredit serta risiko kualitas aset pada segmen UMKM tetap perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi downside risk tersebut, Bank Indonesia memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga melalui inisiatif program PINISI untuk mendorong akselerasi pembiayaan sektor riil dan sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

Bank Indonesia secara aktif memperkuat sinergi bauran kebijakan melalui koordinasi erat dengan Pemerintah, KSSK, dan lembaga strategis lainnya, untuk mendukung program Pemerintah (Asta Cita). Melalui penguatan kebijakan yang mendukung program Asta Cita dan proyek strategis nasional, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada likuiditas domestik tetapi juga mengakselerasi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan melalui kontribusi dalam pengembangan standardisasi pelaporan hijau (Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan) dan Kalkulator Hijau, harmoni taksonomi berkelanjutan bersama OJK, serta kepemimpinan aktif di forum internasional seperti ASEAN dan G20. Upaya komprehensif yang mencakup pengembangan ekosistem UMKM, perluasan literasi keuangan, hingga pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sekaligus menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

6.1

Prospek Intermediasi 2026 Diprakirakan Membaik Terbatas Sejalan dengan Prakiraan Perbaikan Perekonomian

Perekonomian dunia ke depan diprakirakan melambat disertai dengan ketidakpastian yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2% dibandingkan dengan capaian pada 2025 yang sebesar 3,3%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dipengaruhi terutama oleh dampak lanjutan tarif resiprokal AS dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong oleh investasi sektor teknologi termasuk AI dan stimulus fiskal pengurangan pajak. Pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada 2026 diprakirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor di tengah investasi AI yang juga meningkat. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan FFR berkurang dan disertai masih tingginya *yield US Treasury* sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan aliran modal ke *emerging markets* tertahan. Perkembangan global tersebut menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Di dalam negeri, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan meningkat ditopang oleh kenaikan permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diprakirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7%, sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan efektivitas berbagai program stimulus Pemerintah pada 2026 dapat mendorong konsumsi RT dan penyerapan tenaga kerja. Investasi juga diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh berlanjutnya program prioritas Pemerintah, termasuk hilirisasi SDA, sehingga diharapkan makin dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian. Berdasarkan LU, prospek LU Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan tetap tumbuh baik. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi

diprakirakan membaik di seluruh wilayah didorong oleh permintaan domestik. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

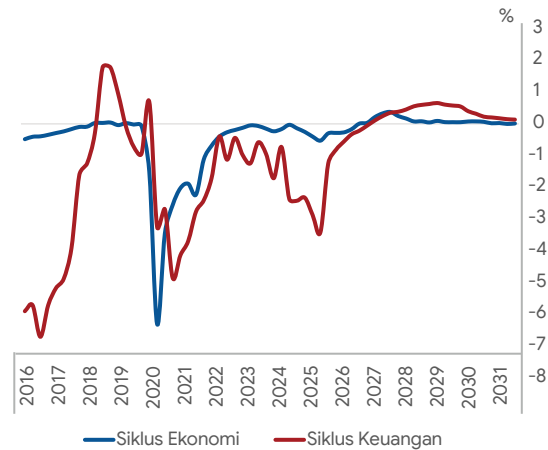
Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak peningkatan ketidakpastian global. Tekanan eksternal terhadap nilai tukar Rupiah tetap besar pada awal 2026. Nilai tukar Rupiah pada 30 Januari 2026 tercatat sebesar Rp16.785 per dolar AS, melemah 0,66% (ptp) bila dibandingkan dengan level akhir Desember 2025. Pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh aliran keluar modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan permintaan valuta asing oleh perbankan dan korporasi domestik sejalan dengan kegiatan ekonomi turut memengaruhi kinerja Rupiah. Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menempuh intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF baik di *off-shore* maupun *on-shore* (DNDF) dan pasar *spot*. Respons kebijakan ini dapat menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah dan tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada 2026. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi terukur di transaksi NDF, DNDF dan pasar *spot*, serta memperkuat strategi operasi moneter *pro-market*. Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan akan stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia meyakini inflasi IHK pada 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi inti diprakirakan tetap rendah seiring dengan konsistensi kebijakan moneter yang menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi *Volatile Food* diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh

TPIP/TPID dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Inflasi *administered prices* juga diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan sebagai *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada 2026–2027, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Prospek penyaluran kredit perbankan pada 2026 diperkirakan membaik terbatas dengan kisaran pertumbuhan sebesar 8–12%. Optimisme tersebut terutama didukung oleh prospek perekonomian domestik yang membaik, serta inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan nilai tukar yang diperkirakan tetap terkendali seiring dengan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Permintaan kredit dari sisi *demand* yang menguat akan menopang prospek kredit tahun 2026. Hal ini sejalan dengan kinerja pembiayaan korporasi yang diperkirakan meningkat seiring tetap terjaganya SSK. Sementara di sisi RT, pertumbuhan kredit konsumsi diperkirakan membaik terbatas.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial dalam mendorong akselerasi pertumbuhan kredit perbankan ke depan. *Stance* kebijakan makroprudensial diarahkan *pro-growth* dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mendorong kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Hal ini mempertimbangkan siklus keuangan Indonesia ke depan (tahun 2026 dan 2027) yang masih berada di bawah kapasitas pembiayaan optimal sejalan dengan siklus ekonomi yang masih di bawah kapasitas *output* nasional akibat belum kuatnya permintaan konsumsi dan investasi di tengah kondisi global (Grafik 6.1.1). Pada tahun 2026, arah bauran kebijakan makroprudensial akan ditempuh melalui 3 (tiga) langkah utama: (i) penguatan efektivitas KLM *forward looking lending channel* sebesar 5% dari DPK, agar bank lebih efektif meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk penyesuaian sektor dan



Grafik 6.1.1. Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia

besarnya insentif yang diberikan, maupun sinergi dengan Pemerintah, KSSK dan pihak terkait; (ii) penguatan efektivitas KLM *forward looking interest channel* sebesar 0,5% dari DPK untuk mendorong percepatan penurunan suku bunga perbankan untuk pertumbuhan kredit lebih tinggi, termasuk koordinasi dengan KSSK dan publikasi asesmen transparansi SBDK bank secara rutin; serta (iii) penguatan surveilans sistemik untuk menjaga ketahanan perbankan dari dampak rambatan risiko gejolak global dan risiko operasional termasuk melalui penguatan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT). Adapun instrumen kebijakan makroprudensial lainnya dipertahankan tetap longgar.

Bank Indonesia juga terus memperluas dan memperkuat perannya dalam mendorong percepatan IEKB sebagai dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya tahan dan berkelanjutan. Penguatan tersebut difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing. Selain itu, Bank Indonesia juga menitikberatkan pada optimalisasi pembiayaan, literasi, dan sinergi di bidang ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan yang terus diperluas. Dengan demikian, penguatan intermediasi perbankan tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan pembiayaan semakin inklusif, memperluas akses, dan selaras dengan agenda keuangan berkelanjutan.

6.2 Demand Pembiayaan Korporasi Diprakirakan Membaik

Sejalan dengan prospek penyaluran kredit perbankan yang diprakirakan membaik terbatas, kinerja pembiayaan korporasi juga diprakirakan meningkat. Peningkatan tersebut didorong melalui perbaikan tarif dan harga komoditas ekspor serta peningkatan belanja modal yang mendorong kebutuhan pembiayaan usaha. Korporasi diperkirakan mulai melakukan ekspansi secara lebih berhati-hati dengan mengoptimalkan dana internal, sebagaimana tercermin dalam rasio *undisbursed loan to plafond* yang masih relatif tinggi. Akselerasi dan implementasi program prioritas Pemerintah berpotensi memperkuat pertumbuhan *demand* kredit produktif dalam jangka pendek dan menengah, terutama dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Di sisi RT, pertumbuhan kredit konsumsi diprakirakan membaik terbatas yang berkontribusi oleh peningkatan penyaluran KPR subsidi dan KMG beragunan.

Akselerasi program prioritas Pemerintah diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja dan permintaan pembiayaan korporasi secara bertahap, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang dapat memperkuat kinerja RT dan menopang permintaan kredit. Namun, terdapat tantangan yang perlu diwaspadai mencakup perilaku korporasi yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penarikan kredit di tengah ketidakpastian, serta potensi peningkatan risiko kredit di segmen RT dan UMKM. Kondisi ini dapat menahan laju permintaan kredit sekaligus mendorong perbankan memperketat seleksi penyaluran kredit untuk menjaga kualitas aset. Belum optimalnya sisi permintaan, Bank Indonesia menginisiasi sinergi dan koordinasi lintas kebijakan melalui kegiatan PINISI.

6.3 Sinergi Meningkatkan Pembiayaan Perekonomian

Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan sinergi kebijakan nasional untuk meningkatkan pembiayaan perekonomian dalam mencapai pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Mempertimbangkan kondisi siklus keuangan Indonesia tahun 2026 dan 2027 yang masih di bawah kapasitas pembiayaan optimal, sejalan dengan siklus ekonomi yang masih di bawah kapasitas *output* nasional, diperlukan sinergi erat dengan pemangku kebijakan strategis lainnya untuk memberikan daya ungkit bagi perekonomian melalui dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, koordinasi erat terus dilakukan Bank Indonesia dengan KSSK secara triwulanan dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, termasuk

upaya mendorong kredit/pembiayaan sektor keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perekonomian yang besar. Dalam hal ini, sinergi kebijakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS melalui KSSK dapat terorkestrasi dengan baik dan diarahkan secara lebih efektif untuk menghasilkan dukungan pembiayaan yang lebih optimal. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan makropudensial diarahkan tetap akomodatif dengan mempertahankan prinsip kehati-hatian untuk bersinergi dengan kebijakan lainnya guna meningkatkan likuiditas perekonomian sebagai sumber pembiayaan dan memperkuat aktivitas ekonomi domestik. Sinergi tersebut dilakukan dengan tetap menjaga pengawasan terhadap risiko operasional.

Ke depan, penguatan kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk melanjutkan dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program prioritas Pemerintah. Hal ini tercermin dari penguatan kebijakan makroprudensial yang mendukung penuh pembiayaan dan implementasi Asta Cita serta program-program strategis nasional. Selain bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia juga akan meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan lembaga keuangan, salah satunya Danantara Indonesia untuk memastikan investasi dan pembiayaan mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi juga dilakukan untuk mendorong akselerasi IEKB yang ditempuh melalui (i) pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing; (ii) pembiayaan inklusif dan berkelanjutan yang optimal; dan (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas.

Bank Indonesia turut mendukung akselerasi pembiayaan perekonomian melalui program ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan dengan terus melanjutkan berbagai inisiatif strategis. Program utama dilakukan melalui (i) pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan agar berdaya saing; (ii) penguatan pembiayaan inklusif dan berkelanjutan agar lebih optimal; dan (iii) perluasan literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan. Program pertama dilakukan antara lain melalui kegiatan *business matching* pembiayaan dan ekspor, *on boarding* UMKM, serta peningkatan kapasitas untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM. Program kedua berfokus pada sinergi mendorong pembiayaan melalui harmonisasi dan implementasi kebijakan yang mendukung pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung (Kalkulator Hijau versi 2) untuk memfasilitasi perbankan dan dunia usaha dalam pemenuhan pelaporan keberlanjutan, sehingga dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau. Sinergi ini sejalan dengan inisiatif otoritas lain dalam mendorong perluasan akses pembiayaan hijau seperti Taksonomi Berkelanjutan yang diinisiasi OJK sebagai panduan klasifikasi aktivitas ekonomi dengan prinsip berkelanjutan. Lebih

lanjut, upaya perluasan literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan melengkapi kedua program lainnya untuk memperkuat pemahaman dan akses kepada sumber pembiayaan perekonomian bagi seluruh lapisan pelaku usaha secara lebih luas. Upaya ini memperkuat fondasi sektor keuangan dalam membiayai perekonomian sekaligus memastikan keselarasan kebijakan antarotoritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan.

Penguatan standar pengungkapan keberlanjutan menjadi katalis percepatan pembiayaan hijau dan investasi lintas negara. Keterlibatan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK sebagai anggota *ex-officio* dalam Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI) turut memperkuat sinergi antarotoritas dan industri dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Pada 1 Juli 2025, DSK-IAI mengesahkan PSPK³⁹ 1 dan 2, yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Penerapan standar pengungkapan keberlanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi dunia usaha dalam memenuhi ekspektasi investor, mitra dagang, serta lembaga internasional, sehingga mendukung percepatan pembiayaan hijau dan investasi lintas negara. Selain itu, sejalan dengan mandat UU PPSK, akan dibentuk Komite Keuangan Berkelanjutan sebagai wadah sinergi yang vital untuk mengoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, mikroprudensial, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan tersebut, penguatan kebijakan dan infrastruktur keuangan berkelanjutan, serta sinergi antar Kementerian/Lembaga, prospek pembiayaan inklusif dan berkelanjutan berpotensi meningkat pada tahun 2026.

Di tingkat internasional, sinergi dan koordinasi dengan otoritas sektor keuangan di negara lain serta lembaga internasional diperkuat melalui keanggotaan aktif di berbagai forum regional dan internasional. Di forum regional, kepemimpinan

39 PSPK 1 mengatur Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan dan PSPK 2 mengatur Pengungkapan terkait Iklim.

dan keanggotaan aktif Bank Indonesia tercermin dalam kapasitas Bank Indonesia sebagai *co-chair* bersama State Bank of Vietnam di ASEAN *Senior Level Committee on Financial Integration – Task Force on Sustainable Finance* (SLC-TF) untuk periode 2024–2026. Selama *chairmanship* tersebut, ASEAN SLC-TF telah menyelesaikan ASEAN *Green Map* yang berisi pemetaan berbagai inisiatif terkait keuangan berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN, termasuk peluang dan tantangan yang ada, dalam rangka harmonisasi kebijakan di ASEAN. SLC TF juga berencana menyusun *Common Ground Framework on Climate Risk Stress Test* di ASEAN untuk menilai potensi dampak risiko iklim terhadap stabilitas sistem keuangan di kawasan. Di forum internasional, Bank Indonesia merupakan anggota *The Network of Central Banks and Supervisors*

for Greening the Financial System (NGFS), G20 *Sustainable Finance Working Group* (G20-SFWG) dan BRICS *Transition-Sustainable Finance Initiative*. Dalam forum G20, Bank Indonesia menyoroti pentingnya penguatan arsitektur global keuangan berkelanjutan; peningkatan pembiayaan adaptasi iklim; dan penguatan potensi pembiayaan dari pasar karbon. Forum-forum tersebut menjadi wadah bagi Bank Indonesia untuk melakukan *exchange views*, *benchmarking* serta memastikan berbagai standar yang diadopsi di Indonesia selaras dengan *global best practices*. Melalui forum dimaksud juga Bank Indonesia berkontribusi dalam penyusunan riset, pengembangan data, dan skenario untuk *climate risk stress test*, serta menyuarakan isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan di negara berkembang.

Boks 6.1

Penguatan Sisi *Demand* Melalui Kegiatan Percepatan Intermediasi Indonesia

Kegiatan PINISI merupakan inisiatif Bank Indonesia yang dirancang sebagai *platform* sinergi dan koordinasi lintas kebijakan untuk mendorong percepatan intermediasi perbankan yang optimal, seimbang, dan inklusif. Program ini bertujuan mengatasi hambatan (*debottlenecking*) intermediasi dengan memastikan penyaluran pembiayaan perbankan selaras dengan kebutuhan riil sektor ekonomi prioritas serta potensi unggulan daerah, sekaligus berperan sebagai instrumen komunikasi kebijakan makroprudensial dalam memperkuat transmisi kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Inisiatif PINISI dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya sisi permintaan pembiayaan, tercermin dari sikap *wait and see* pelaku usaha, belum pulihnya konsumsi RT, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kondisi tersebut menahan permintaan pembiayaan, meningkatkan *undisbursed loan*, dan menghambat optimalisasi fungsi intermediasi perbankan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

PINISI dilaksanakan sepanjang tahun, didukung oleh rangkaian kegiatan bulanan berupa seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *business matching* pembiayaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian/Lembaga terkait, otoritas, dan satuan kerja di Bank Indonesia, sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat kebijakan makroprudensial yang *pro-growth*, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. PINISI diawali dengan diseminasi untuk memperkuat pemahaman dan penyaluran program dengan para pemangku kepentingan, termasuk penekanan pada sektor-sektor prioritas. Selanjutnya, PINISI difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dan lintas kebijakan guna mendorong intermediasi perbankan ke sektor-sektor strategis yang mendukung ketahanan dan hilirisasi ekonomi. Pada tahap lanjutan, program diarahkan untuk memperluas dan mengakselerasi pembiayaan ke sektor-sektor produktif guna mendorong

penciptaan nilai tambah dan penguatan UMKM. Rangkaian PINISI kemudian ditutup dengan tahap konsolidasi dan penguatan hasil, dengan fokus pada sektor industri dan pemanfaatan digitalisasi sebagai pengungkit daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, PINISI memperkuat keterkaitan antara upaya Bank Indonesia dalam mendorong intermediasi perbankan dan berbagai program prioritas pembangunan nasional. Sebagai contoh, melalui pemanfaatan instrumen KLM, Bank Indonesia mendorong peningkatan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Sektor

ketahanan pangan menjadi salah satu fokus, sejalan dengan upaya memperkuat stabilitas pasokan dan akses pangan nasional. Selain itu, dukungan terhadap pembiayaan UMKM terus diperkuat mengingat perannya yang dominan dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, pembiayaan ke sektor energi hijau, digital, dan investasi berkelanjutan juga didorong sebagai bagian dari proses transisi ekonomi dan penguatan struktur ekonomi.

Keseluruhan rangkaian tersebut dilaksanakan dalam satu kerangka besar PINISI sebagai upaya berkelanjutan Bank Indonesia untuk ***mempercepat intermediasi dan memperkuat ekonomi***, melalui sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Boks 6.2

Sinergi Program Prioritas Pemerintah dengan Potensi Pembiayaan 2026

Program prioritas Pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan menjadi pendorong utama penguatan intermediasi melalui peningkatan aktivitas sektor riil. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun yang diarahkan untuk mendukung 8 (delapan) strategi jangka menengah: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) program MBG; (iv) pendidikan bermutu; (v) kesehatan berkualitas; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) penguatan pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Pada tahun 2026, beberapa program strategis diperkirakan memasuki fase implementasi yang lebih matang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Program MBG direncanakan mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp335 triliun, seiring perluasan cakupan penerima manfaat dan penguatan kapasitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah. Sementara itu, implementasi program KDKMP diperkirakan dapat dipercepat seiring perubahan skema pembangunan serta penyaluran kredit program yang tersentralisasi melalui Agrinas Pangan.

Program prioritas ini berpotensi mendorong peningkatan *demand* pembiayaan di sektor-sektor prioritas. Beberapa sektor ekonomi utama yang diperkirakan akan mendapatkan dampak positif, antara lain sektor Pertanian Tanaman Pangan, Industri Makanan dan Minuman, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Industri Furnitur, serta Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional. Peningkatan kebutuhan pembiayaan diperkirakan terkait dengan kebutuhan modal kerja dan investasi untuk mendukung produksi, pengolahan, distribusi, serta penguatan infrastruktur penunjang program. Selain dampak langsung terhadap sektor-sektor terkait program, penguatan aktivitas juga diperkirakan mengalir ke sektor pendukung melalui *backward linkage* (kebutuhan bahan baku, logistik, dan jasa penunjang) serta *forward linkage* (distribusi, perdagangan, dan layanan turunan), sehingga memperluas basis permintaan pembiayaan secara bertahap.

Bank Indonesia turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi fokus prioritas nasional, antara lain melalui implementasi KLM. Pada

2026, cakupan sektor KLM akan terus diarahkan kepada sektor-sektor yang sejalan dengan program prioritas Pemerintah: (i) Pertanian, Industri, dan Hilirisasi; (ii) Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif; (iii) Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan; serta (iv) UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Keberlanjutan. Harapannya melalui dukungan insentif likuiditas tersebut, perbankan akan semakin terstimulus untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih tinggi kepada sektor-sektor prioritas, sehingga pada akhirnya tujuan dari program prioritas nasional dapat tercapai secara optimal.

Implementasi pembangunan KDKMP mulai terlihat pada akhir 2025 dan berpotensi terakselerasi pada awal tahun 2026.

Pemerintah mengakselerasi pembangunan gerai dan implementasi program KDKMP dengan menunjuk salah satu BUMN untuk membangun fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan KDKMP dengan bantuan kredit dari bank HIMBARA. Per November 2025 aktivitas pembangunan gerai KDKMP mulai terlihat. Sektor terkait pembiayaan KDKMP, yaitu Pertanian dan Konstruksi mengalami akselerasi kredit yang signifikan yaitu masing-masing sebesar 7,56% dan 8,14% per November 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,54% dan 0,19% yoy. Nilai kredit tersebut berpotensi terus meningkat pada 2026 sampai dengan ±Rp210 triliun saat pembangunan di seluruh titik KDKMP dilaksanakan.

Kebijakan Program 3 Juta Rumah oleh Pemerintah berperan dalam menahan pelemahan yang lebih dalam di pembiayaan sektor properti, khususnya untuk segmen MBR.

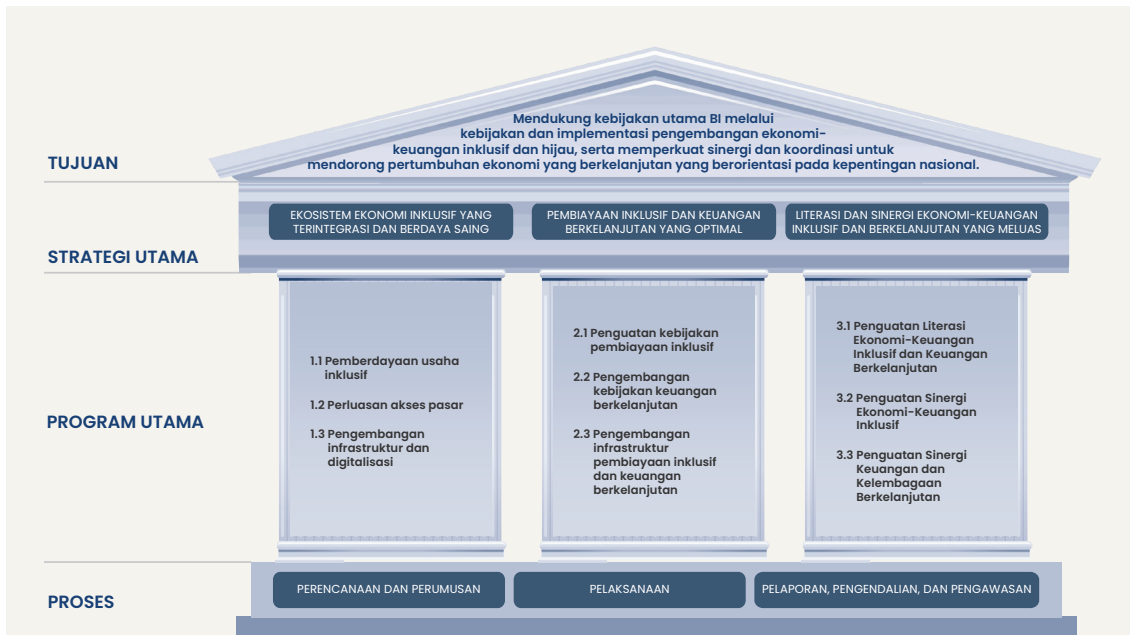
Hal tersebut tercermin dari kinerja KPR subsidi yang tumbuh 11,52% (yoy) per Desember 2025, lebih tinggi daripada posisi Desember 2024 maupun Juni 2025. Kenaikan kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada Juli 2025 berhasil mengakselerasi penyaluran FLPP yang mencapai 278.868 unit, tertinggi sepanjang implementasi program FLPP. Ke depan, pembangunan dan renovasi Program 3 Juta Rumah akan terus didorong dengan melanjutkan target pengaluran sebanyak 285.000 unit dengan ruang peningkatan hingga 350.000 unit. Pemerintah juga akan mendorong inovasi pembiayaan perumahan bagi pelaku UMKM melalui KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan dengan porsi pendanaan mencapai Rp130 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas hunian rumah turut diperkuat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan target renovasi 400 ribu unit rumah, meningkat signifikan dibandingkan dengan target 2025 yang sebanyak 45.000 unit. Berbagai upaya Pemerintah dalam mendorong realisasi Program 3 Juta Rumah tersebut diproyeksikan turut mendorong kinerja pembiayaan di sektor Perumahan.

**Boks
6.3**

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan

Bank Indonesia memiliki peran strategis untuk meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Pasal 35A UU P2SK memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga SSK melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi,

inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Dengan penguatan mandat tersebut, Bank Indonesia merumuskan kebijakan IEKB yang ditujukan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia melalui kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar B6.3.1. Kerangka Kerja Kebijakan IEKB

Kebijakan IEKB menempatkan pemberdayaan usaha inklusif sebagai pengungkit utama untuk meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok subsisten melalui pendekatan *end-to-end* dari hulu ke hilir baik secara konvensional maupun syariah. Di sisi hulu, pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan ketahanan usaha melalui korporatisasi, penguatan produktivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana agar pelaku usaha memiliki kemampuan adaptasi terhadap dinamika permintaan pasar dan tekanan risiko ekonomi maupun iklim. Di sisi hilir, pemberdayaan diarahkan pada perluasan akses pasar melalui integrasi rantai pasok termasuk pada penguatan ekosistem *Halal Value Chain* baik secara domestik maupun global, fasilitasi *business matching*, dan promosi perdagangan yang terarah. Pemanfaatan digitalisasi berperan strategis sebagai penghubung antara hulu dan hilir dengan mendorong *onboarding* UMKM ke *platform* digital dan sistem pembayaran, serta pengembangan *tools* dan basis data yang terintegrasi untuk membuka akses pembiayaan. Melalui pendekatan *end-to-end* ini, peningkatan kapasitas produksi tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti oleh kepastian akses pasar dan intermediasi keuangan yang lebih efektif, sehingga pemberdayaan UMKM baik secara konvensional maupun syariah

dan kelompok subsisten dapat menghasilkan peningkatan daya saing, nilai tambah, dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong pembiayaan berkelanjutan baik secara konvensional maupun syariah dan mempercepat transisi pelaku usaha menuju ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia bersama otoritas terkait memperkuat kebijakan keuangan berkelanjutan termasuk infrastruktur pendukungnya seperti Kalkulator Hijau sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data. Penguatan kebijakan telah dilakukan melalui perluasan cakupan pemberian insentif KLM kepada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebagai upaya mendorong peran intermediasi perbankan dalam pembiayaan aktivitas ekonomi rendah emisi, pengembangan ekonomi sirkular, dan pengembangan infrastruktur *waste management*. Di aspek penghitungan emisi, Bank Indonesia tengah melakukan pengembangan Kalkulator Hijau sebagai alat bantu pengukuran dan pelaporan jejak emisi guna meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menjawab tantangan dan kebutuhan terkait rencana transisi. Selanjutnya, pengembangan taksonomi berkelanjutan dilakukan melalui

koordinasi dengan OJK dan Kementerian/Lembaga terkait agar implementasinya berjalan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan industri, serta konsisten dengan ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk melalui Komite Keuangan Berkelanjutan sesuai amanat UU P2SK. Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan rangkaian ISEF dan FESyar sebagai forum strategis juga memperkuat sinergi kebijakan dan jejaring antara Pemerintah, Kementerian/Lembaga, industri, asosiasi, dan pelaku usaha. Selain itu, penguatan aspek pengungkapan (*disclosure*) diwujudkan melalui keanggotaan Bank Indonesia sebagai *ex-officio* dalam DSK-IAI, yang berperan dalam pengembangan dan penerapan standar pelaporan keberlanjutan. Secara umum, dukungan Bank Indonesia terhadap infrastruktur pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas pembiayaan berkelanjutan, memperkuat proses *due diligence*, serta mendorong penyaluran pembiayaan hijau yang lebih efektif dan berintegritas.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran ekonomi dan keuangan baik secara konvensional maupun syariah pada RPJMN 2025–2029, Bank Indonesia telah merumuskan beberapa inisiatif strategis kebijakan ekonomi dan keuangan sebagai bentuk kolaborasi nasional, antara lain (i) Kelompok Kerja Pengembangan Kalkulator Hijau v2, (ii) Karya Kreatif Indonesia, (iii) Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal (Gerbang Santri); (iv) Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor (JAWARA Ekspor); (v) Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal (GEMA Halal); (vi) Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah (SAPA Syariah); (vii) Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF (KANAL ZISWAF); dan (viii) Gerakan Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas (Lentera Emas). Inisiatif-inisiatif tersebut, menjadi strategi utama untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berdaya saing, pembiayaan yang optimal, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan secara luas.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN

NO.46, Februari 2026

PENGARAH

Destry Damayanti – Solikin M. Juhro – Evie Sylviani – Dhaha Praviandi Kuantan – Merywati – Alexander Lubis

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Satwika Lulu – Alia Fariza – Elis Deriantino – Justina Adamanti – Arnita Rishanty – Gilang Andrianty – Ida Ari Kusumawati

TIM PENYUSUN

Galoeh Andita Widorini, Widyastanto Nugroho, Ratna Oktriyani, Anita, Dedy Swares Sinaga, Dirwanta Firsta, Friska Zehan Phalupy, Riyan Galuh Pratama, Vidi Adyatma Nugraha, Dwi Oktaviyanti, Prayoga Dharma, Afrah Asfarina Ghassani, Charvin Lim, Fany Wresti Buana Putri, Retno Khoirunnisa, Kevin Joshua Sinaga, Irman Ramdani, Muhammad Harits Abdullah, Muhammad Iqbal Pratama, Luthfiana Rahma, Julius Indra Permana, Satria Mulia Purnomo, Muhammad Ammar Erdianto, Nabilah Az-Zahro', Nia Nirmala Sari Ambarita, Siptian Nugrahawan, Fakhurridda Clarendia Widodo, Sekar Pawestri Gita Ramadhani, Rafdy Hifdhurrahman, Dea Ayu Fahrunnisya, Randy Cavendish, Nazhif Fa'Iq Nur Rizqi

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter dan Market (DSMM)
Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK)
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)
Departemen Ekonomi Inklusif dan Hijau (DEIH)
Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada Februari 2026, didasarkan pada data dan informasi per Desember 2025, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEBSITE BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia
Email : KomunikasiMakroprudensial@bi.go.id



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA